

**“KIPRAH SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA (SBII) DALAM
MENINGKATKAN PENGHIDUPAN BURUH TAHUN 1947-1960”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Persyaratan Guna Menyusun Skripsi



Oleh:

NISA FAUZIYAH

NIM 19.613.1003

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN BAHASA

UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fauziyah

NIM : 196131003

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Sukoharjo, 15 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Nisa Fauziyah

NIM: 196131003

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Nisa Fauziyah

NIM : 196131003

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab

dan Bahasa

UIN Raden Mas Said

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Nisa Fauziyah

NIM : 196131003

Judul : **Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960**


Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 15 Juni 2023

Pembimbing


Aan Ratmanto

NIP. -

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBI) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960** yang disusun oleh **Nisa Fauzyah** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa pada hari Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

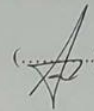
Penguji Utama : Dr. H. Moh. Mahbub, S. Ag., M. Si.
NIP 19700410 199703 1 004



Penguji I, Merangkap Ketua : Martina Safitry, M. A.
NIP 19860308 201801 2 001



Penguji II, Merangkap Sekretaris : Aan Ratmanto, M. A.
NIP –



(Pembimbing

Sukoharjo, 15 Juni 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19710403 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta,

Ayahku Pariyono, Ibuku Eni Susilowati, Kedua adikku As'ad Naabih Fauzi dan

Nahila Nuha Fauziyah, Nenek (Alm) Sutarmi, Kakek Suharno.

Segenap dosen Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan ilmunya.

Manusia-manusia hebat yang juga menemani perjalanan hidupku,

Adam Aditya, Albert Alfianto, Fakhriza Alma Kurniawati, Kiki Aryo Kurniawan,

Tegar Sanjaya, Siti Wakhidatul Mukharomah, dan Sekar Berlianny.

Kampusku tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.

MOTTO

Apapun yang akan kamu hadapi, jangan lupa utamakan tidur.

(Andi Luqmanul Qosim, Lc., M.Pd.I.)

Berapa pun sisa waktu yang ada, usahakan dan maksimalkan yang terbaik.

(Adi Nurrohman, S. Pd.)

Beraniilah mengambil keputusan.

(Kiki Aryo Kurniawan, S. Ikom)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora. Penelitian yang ditulis ini mengkaji tentang KIPRAH SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA (SBII) DALAM MENINGKATKAN PENGHIDUPAN BURUH TAHUN 1947-1960.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. P.d. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. A.g. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa.
3. Ibu Martina Safitry, S.S, M. A. selaku koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said sekaligus dosen penguji skripsi yang turut memberikan arahan dan saran kepada penulis.
4. Bapak Latif Kusairi, S. Hum., M. A. selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa.
5. Bapak Dr. Muh Fajar Shodiq, M. Ag. selaku wakil ketua Dekan Fakultas Adab dan Bahasa dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan.
6. Bapak Aan Ratmanto, M. A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan serta motivasinya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. H. Moh. Mahbub S. Ag., M. Si. Selaku dosen penguji skripsi yang juga memberikan arahan dan sarannya dalam proses kepenulisan skripsi.

8. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said Surakarta karena berkat pengajaran dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan Akademik yang telah memberikan bantuan untuk keperluan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh Staf *Jogja Library Center* dan Monumen Pers yang telah membantu dalam pencarian sumber data terkait.
11. Orang tua tercinta, Ayah Pariyono dan Ibu Eni Susilowati yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan juga kepenulisan skripsi ini.
12. Kedua adikku, As'ad Naabih Fauzi dan Nahila Nuha Fauziyah yang selalu memberikan semangat dan sering mengganggu ketika sedang mengerjakan tugas kuliah ataupun skripsi.
13. Keluarga besar, Alm. Mbah Putri Sutarmi, Mbah Kakung Suharno, Bulek Sri Lanjari, Bude dan Pakde Toro, serta keponakanku Rangga Prasetya yang telah memberikan dukungan moral untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kiki Aryo Kurniawan yang selalu memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan, Sekar Berlianny, Alif Ramadhani, Laili Rahmawati, Asma', Fahmi Kartika, Fuad Nur, Abdul Aziiz, Bilal Wais, Rina Muthoharoh, Fajri Anna, Rifky Arya, Tri Hidayat dan teman-teman Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2019 yang telah menemani penulis selama ini dalam berproses di kampus dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Skripsi ini tentunya memiliki banyak kekurangan baik dalam hal tata tulisan ataupun isinya, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sukoharjo, Juni 2023

Nisa Fauziyah

NIM: 196131003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	25

H. Sistematika Penulisan	29
BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA SBII	31
A. Kondisi Umum Perburuhan di Indonesia Pasca Revolusi	31
B. Perkembangan Sektor Perekonomian 1945-1949	42
C. Berdirinya Serikat Buruh Islam Indonesia	48
BAB III MASJUMI, ISLAM DAN BURUH	56
A. Perjalanan Kerja Sama Partai Masjumi dengan SBII	56
B. Dasar Ideologi Masjumi dan SBII	66
BAB IV KIPRAH SBII	82
A. Aksi SBII dalam Memperjuangkan Hak Buruh	82
B. Runtuhnya SBII	107
BAB V KESIMPULAN	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	129

ABSTRAK

Nisa Fauziyah, 2023, Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960. Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam memperjuangkan hak-hak para buruh dengan berdasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam pada tahun 1947-1960. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh kehidupan para buruh yang selalu kesulitan dalam memperoleh haknya. Kondisi ini membuat banyak serikat atau organisasi buruh lahir dan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. SBII, menjadi salah satu serikat yang turut memperjuangkan hak para buruh dan memberikan warna yang berbeda dalam sejarah buruh.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan dan menyusun sumber-sumber yang telah ditemukan melalui arsip, buku, jurnal, koran, skripsi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, para buruh masih belum bisa mendapatkan hak-hak yang harusnya telah diterima. SBII yang dibentuk langsung oleh Partai Masjumi diharapkan dapat membantu dan mengupayakan hak para buruh. Kenaikan upah dan besar kecilnya jumlah tunjangan yang diterima oleh para buruh menjadi fokus utama dalam perjuangan SBII. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh SBII selalu didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, Partai Masjumi selaku induk organisasi pun memiliki keterlibatan dalam setiap pengambilan keputusan oleh SBII. Sebagai induk organisasi, Partai Masjumi menginginkan SBII dapat membantu dalam bidang politik. Desakan ini menjadikan SBII menjadi organisasi yang independen. Setelah melalui perjalanan yang panjang, SBII mampu menjadi organisasi independen yang tidak terlibat dengan partai manapun. Kondisi ini membuat SBII lebih leluasa untuk memperjuangkan hak buruh dan melakukan pendekatan dengan pemerintah. SBII pun berhasil melanjutkan perjuangan dan memberikan hasil yang memuaskan bagi para buruh.

Kata Kunci : Buruh, Masjumi, Pemerintah, SBII

ABSTRACT

Nisa Fauziyah, 2023, Gait of the Indonesian Islamic Trade Union (SBII) in Improving Workers' Livelihoods in 1947-1960. Thesis: History of Islamic Civilization Study Program, Faculty of Adab and Language, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta.

This study explains how the progress of the Indonesian Islamic Trade Union (SBII) in fighting for the rights of workers based on Islamic religious teachings in 1947-1960. The choice of this topic is motivated by the life of workers who always have difficulty obtaining their rights. This condition has led to the emergence of many labor unions or organizations aimed at fighting for their rights. SBII, became one of the unions that participated in fighting for the rights of workers and gave a different color to labor history.

This thesis research uses historical research methods, namely topic selection, source gathering, verification, interpretation and historiography. In carrying out this thesis research, the author tries to collect and compile sources that have been found through archives, books, journals, newspapers, theses and other sources related to research.

The results of this study indicate that after Indonesia's independence, workers still cannot get the rights they should have received. It is hoped that SBII, which was formed directly by the Masjumi Party, can help and strive for workers' rights. Increases in wages and the size of the amount of benefits received by workers are the main focus in the struggle for SBII. Decision-making by SBII is always based on Islamic teachings, the Masjumi Party as the parent organization is also involved in every decision-making by SBII. As the parent organization, Masjumi Party wants SBII to help in the political field. This insistence made SBII an independent organization. After going through a long journey, SBII was able to become an independent organization that was not involved with any party. This condition made SBII more flexible in fighting for labor rights and approaching the government. SBII also managed to continue the struggle and provide satisfactory results for the workers.

Keywords: Labor, Masjumi, Government, SBII

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Foto Koran <i>De Drije Pers</i> 5 Desember 1950	129
Lampiran 02 Foto Koran <i>Indische Courant Voor Nederland</i> 7 Maret 1951	129
Lampiran 03 Foto Koran <i>Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode</i> 5 Juni 1951	130
Lampiran 04 Foto Koran <i>Het Nieuwsblad Voor Sumatra</i> 12 Juli 1955	130
Lampiran 05 Foto Koran <i>Indische Courant Voor Nederland</i> 18 Juli 1955	131
Lampiran 06 Foto Koran <i>Het Nieuwsblad Voor Sumatra</i> 28 Juli 1955	131
Lampiran 07 Foto Koran <i>Java-Bode: Nieuws, Handels-En Advertentieblad Voor Nederland</i> 10 November 1955	132
Lampiran 08 Foto Koran <i>Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode</i> 25 Juni 1956	132
Lampiran 09 Foto Koran Merdeka 1 November 1956	133
Lampiran 10 Foto Koran <i>Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode</i> 3 November 1956	133
Lampiran 11 Foto Koran Merdeka 3 November 1956	134
Lampiran 12 Foto Koran Merdeka 5 November 1956	134
Lampiran 13 Foto Koran Merdeka 9 November 1956	135
Lampiran 14 Foto Koran Merdeka 12 November 1956	135
Lampiran 15 Foto Koran Merdeka 13 November 1956	136
Lampiran 16 Foto Koran Merdeka 6 Desember 1956	136

Lampiran 17 Foto Koran <i>Java-Bode: Nieuws, Handels-En Advertentieblad Voor Nederland</i> 22 Juli 1957	137
Lampiran 18 Foto Koran <i>Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode</i> 2 September 1957	137
Lampiran 19 Foto Koran <i>Het Nieuwsblad Voor Sumatra</i> 15 Oktober 1957	138
Lampiran 20 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 8 November 1958	138
Lampiran 21 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 17 November 1958	139
Lampiran 22 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 21 November 1958	139
Lampiran 23 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 26 November 1958	140
Lampiran 24 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 14 Desember 1958	140
Lampiran 25 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 28 Desember 1958	141
Lampiran 26 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 2 Januari 1959	141
Lampiran 27 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 12 Januari 1959	142
Lampiran 28 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 7 Januari 1960	142
Lampiran 29 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 11 Januari 1960	143
Lampiran 30 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 16 Januari 1960	143
Lampiran 31 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 18 Januari 1960	144
Lampiran 32 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 23 Januari 1960	144
Lampiran 33 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 23 Januari 1960	145
Lampiran 34 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 29 Januari 1960	145
Lampiran 35 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 29 Januari 1960	146
Lampiran 36 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 22 Maret 1960	146
Lampiran 37 Foto Koran <i>Harian Abadi</i> 28 November 1960	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pemulihan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 terasalah oleh pemerintah, bahwa nasib rakyat Indonesia yang pada umumnya sangat menderita sebagai akibat berbagai keadaan dan kejadian wajib diperhatikan dan diperbaiki.¹ Bentuk perhatian dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah telah dibuktikan dengan munculnya kebijakan hadiah lebaran. Melalui radio, Soekiman Wirjosandjojo selaku perdana menteri pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai kebijakan tersebut. Pidato yang disampaikan pada hari Rabu, 27 Juni 1951, menjadi awal sejarah dari Tunjangan Hari Raya (THR) yang sampai detik ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah mengenai hadiah lebaran sangat disesuaikan dengan harapan masyarakat pada saat itu. Masyarakat menginginkan pemerintah turut menambah semarak pada hari besar, terkhusus hari raya Idul Fitri. Sebagai awal dilaksanakannya tradisi hadiah lebaran, pemerintah telah membuat keputusan bahwa hadiah lebaran pada tahun 1951 akan diwujudkan dengan uang. Keputusan ini pun berlanjut dengan

¹ Pem. Turut Rasakan Penderitaan Rakyat sbg Akibat Perjuangan Memberikan Hadiah Lebaran yang Berupakan Uang Injectie Tenaga Membli dikalangan Masyarakat. *Harian Abadi*, 28 Juni 1951. hal. 1

pemberitahuan kementerian keuangan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah lebaran. Kementerian keuangan memberitahukan kepada pegawai negeri beserta pekerja-pekerja tetap warga negara Indonesia yang beragama Islam, termasuk juga pegawai dan pekerja tetap daerah-daerah autonom yang pada tanggal 28 Juni 1951 sudah diangkat atau sudah bekerja, diberi hadiah lebaran sebesar jumlah-jumlah tersebut.²

Hasil keputusan pemerintah mengenai golongan-golongan masyarakat yang akan mendapatkan hadiah lebaran menimbulkan banyak perdebatan di beberapa kalangan masyarakat, khususnya kalangan buruh. Golongan buruh beranggapan bahwa kebijakan yang semula dibuat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat berujung pada pengabaian golongan buruh yang juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam percakapan dengan “Antara” Menteri perburuhan I Tedjasukmana menerangkan bahwa berhubung dengan adanya pemogokan-pemogokan pada waktu yang akhir-akhir ini Menteri perburuhan mengambil tindakan untuk menjelaskan sendiri perselisihan-perselisihan besar antara buruh dan majikan atau dengan perantaraan P-4.³ Perselisihan yang terjadi tak lain disebabkan karena kebijakan hadiah lebaran yang dibuat oleh pemerintah.

² *Ibid.*

³ Tuntutan Buruh Hendaknja Djangan Rugikan Perjuangan. *Harian Abadi*, 28 Juni 1951.

Perselisihan ini pun diwarnai dengan aksi menolak kerja lembur yang dilakukan oleh SBPP-*Scheenvaart Vereniging*. Aksi ini menimbulkan kerugian bagi negara sebab dapat menambah kongesti dan kapal-kapal yang secara khusus telah membawa barang untuk Indonesia terpaksa meninggalkan pelabuhan tanpa membongkar muatan. Melihat kerugian yang ada, pemerintah pun mengadakan rapat selama tiga hari berturut-turut. Rapat yang dijalankan oleh pemerintah tetap tidak dapat menghasilkan solusi dari permasalahan hadiah lebaran bagi buruh. Hingga akhirnya, menteri menyatakan persetujuannya terhadap adanya hadiah lebaran yang kini menjadi tuntutan dari pada serikat-serikat buruh; dalam pada itu ia mengharap hendaknya kaum buruh dapat membedakan perjuangan untuk hadiah lebaran dengan perjuangan buruh untuk mempertinggi tingkat penghidupannya.⁴

Perjuangan buruh pada pasca kemerdekaan merupakan lanjutan dari perjuangan buruh terdahulu, ketika industrialisasi mulai muncul pada masa kolonialisme. Kerja upahan telah diberlakukan di Indonesia sedini tahun 1870.⁵ Dimana pada saat itu, belum terdapat satu pun organisasi atau serikat buruh. Sekitar tahun 1894, untuk pertama kalinya organisasi kaum pekerja upahan atau buruh mulai dikenal di Indonesia. *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG) menjadi organisasi pekerja upahan yang anggotanya merupakan para guru sekolah dasar dan menengah

⁴ *Ibid.*

⁵ Iskandar Tedjasukmana. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. (Jakarta: TURC. 2008) hal. 7 (Tedjasukmana, 2008)

Belanda. Akan tetapi, organisasi ini tidak memiliki catatan sejarah yang berkaitan dalam upaya untuk memperjuangkan hak buruh di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, para guru yang tergabung dalam NIOG perlahan mulai dikeluarkan dari sekolah-sekolah. NIOG pun menjadi organisasi kecil yang tetap bertahan di sekolah swasta Belanda. Pada tahun 1956 ia terdaftar pada Kementerian Perburuhan sebagai mempunyai 6 cabang dan suatu jumlah keanggotaan dari 320 individu.⁶

Sekitar tahun 1908, perwakilan kaum buruh yang bekerja di Perkeretaapian Negara, perusahaan kereta api dan tram swasta berkumpul di kota Semarang, Jawa Tengah untuk memproklamasikan lahirnya serikat baru, yakni *Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie* (VSTP). Perserikatan buruh ini merupakan perserikatan baru yang dibangun untuk mengorganisir seluruh buruh kereta api tanpa membeda-bedakan setiap anggotanya. Serikat ini lebih berfokus memperhatikan pekerja tangan daripada para pegawai kerah putih maupun yang lebih tinggi. VSTP menjadi serikat buruh yang agresif dan militan. Kedudukan-kedudukan penting dalam serikat ini ditempati oleh kaum sosialis, seperti C. J Huishoff, H. W. Dekker, Sneevliet, dan Semaoen.

Berdirinya serikat buruh kereta api menjadi awal dari berdirinya serikat-serikat buruh lain, seperti *Bond van Ambtenaren bij de In-en Uitvoerrechten en Accijnzen in Nederlandsch-Indie* (*Douanebond*) yang

⁶ *Ibid.* hal. 8

didirikan pada tahun 1910. Setelah berganti pemimpin, organisasi tersebut mengadopsi nama Indonesia, yakni Perhimpunan Bumiputera Pabean. Selanjutnya di tahun 1912 muncul Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB), *Opiumregiebond* tahun 1915, Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) tahun 1916 dan *Vereeniging Inlandsch Personeel Burgelijke Openbare Werken* (VIP-BOW).

Perserikatan-perserikatan ini menjadi wadah bagi para buruh untuk mengorganisir setiap perjuangan yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing serikat. Serikat-serikat buruh ini akan memaksa majikan untuk melakukan sebuah perjanjian yang memperhatikan hak-hak buruh. Di Indonesia, gerakan buruh tidak hanya berdasar kepada sosial ekonomi. Pasca kemerdekaan, perjuangan partai politik menjadi pelengkap dari gerakan buruh. Keterlibatan partai politik dalam serikat buruh merupakan strategi agar serikat buruh tidak dengan mudahnya dihancurkan oleh kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak penguasa dan partai politik dapat menjadi penyalur aspirasi dalam mempengaruhi keputusan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada buruh.

Keterlibatan partai politik dalam serikat buruh tidak hanya sebatas melindungi mereka dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Permasalahan yang terjadi antara buruh dan majikan dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik. Salah satunya ketika buruh merasa upah yang diberikan sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan para majikan telah merasa

memberikan upah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kebimbangan dalam pemerintahan. Sebab pemerintah tidak mungkin hanya berfokus pada permasalahan perusahaan yang membutuhkan banyak penanam modal, sedangkan meningkatkan penghidupan kaum buruh juga menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Partai politik juga menggunakan para buruh untuk meningkatkan suara pemilih dalam pemilu tahun 1955. Selain itu, partai politik merasa bahwa para buruh dapat melakukan demo atau mogok kerja yang dapat menekan pengusaha dan pemerintahan.

Partai Masjumi menjadi salah satu contoh partai politik Islam yang ikut terlibat dalam perjuangan buruh. Setelah kemerdekaan Indonesia, partai ini berupaya mendirikan beberapa anak organisasi yang dapat memperkuat basis masanya. 1946 menjadi tahun berdirinya anak organisasi Masjumi, yakni Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Serikat Dagang Islam Indonesia (SDII). Di tahun 1947, Masjumi memiliki gagasan untuk mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Setelah SBII terbentuk, Masjumi dan SBII melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas kerja sama yang akan mereka sepakati. Dalam koran *de Drije Pers* yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 1950 disampaikan bahwa, pernyataan tentang kerja sama di bidang politik, organisasi, keuangan, informasi dan jaminan kesejahteraan anggota akan diumumkan kepada publik.

Pertemuan yang dihadiri oleh Tuan Jusuf Wibisono, Moh. Daljono, Nur Jahman, Sjarief Usman dan beberapa perwakilan lainnya menjadi salah

satu bukti keterlibatan partai politik dalam Serikat Buruh Islam Indonesia. Meskipun awalnya SBII dibentuk untuk memperkuat basis masa Masjumi, SBII sebagai serikat yang memperjuangkan buruh tetap dihadapkan dengan permasalahan kaum buruh yang harus diselesaikan dengan berlandas pada agama Islam. Pada perkembangannya SBII mampu membuktikan bahwa Islam dan buruh bukanlah dua hal yang bertolak belakang. Bahkan Islam pun selalu mengajarkan untuk memperjuangkan kepentingan umum dibanding kepentingan suatu kelompok.

Serikat buruh ini kemudian dapat berkembang dengan sangat baik. Namun dalam hal keanggotaan, SBII masih jauh di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Di tahun 1956 SOBSI memiliki jutaan anggota, sedangkan SBII hanya memiliki ratusan ribu anggota. Jumlah ini sangat bertolak belakang dengan jumlah mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Meskipun berjalan demikian, SBII masih terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dengan berlandas kepada ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Dalam perjuangan meningkatkan penghidupan kaum buruh, SBII juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa SBII merupakan alat politik yang diciptakan untuk memperkuat basis masa partai Masjumi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII)?
2. Bagaimana upaya Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam memperjuangkan hak buruh pada masa revolusi tahun 1947 hingga pasca revolusi tahun 1960?
3. Bagaimana akhir perjalanan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam memperjuangkan hak buruh?

C. Batasan Masalah

Seerti halnya pada penelitian sejarah sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang dapat membatasi objek-objek yang akan diteliti oleh penulis. Adanya batasan ini berguna agar membatasi pembahasan sehingga tidak keluar atau melebar dari tema besar yang sedari awal telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat dua ruang lingkup yang membantu penulis untuk melakukan penelitian, yakni lingkup spasial dan lingkup temporal.

Lingkup spasial merupakan batasan yang didasarkan pada satuan wilayah administratif tertentu, sehingga penulis menjadikan lingkup negara Indonesia sebagai batasan dalam ruang lingkup spasial. Batasan ini dibuat agar pembahasan dalam ruang lingkup spasial hanya membahas permasalahan terkait dengan pembahasan yang telah ditentukan oleh penulis. Pembahasan ini dimulai sejak pasca kemerdekaan dimana para

buruh mulai menuntut hak mereka. Sedangkan untuk lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian.⁷

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam poin-poin sebelumnya, tentu terdapat suatu tujuan dan juga manfaat yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII).
2. Untuk mengetahui kondisi buruh pada masa revolusi dan pasca revolusi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam memperjuangkan hak buruh.

Terdapat pula manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, agar mudah dalam pengklasifikasiannya. Penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua, yakni:

a. Manfaat secara Teoritis

- Menambah ilmu pengetahuan terkait bidang sejarah, politik dan juga sosial keagamaan yang ada dalam perkembangan serikat buruh Islam yang ada di Indonesia.

⁷ Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Skripsi: Mahasiswa Program Sastra 1 Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro*. (Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. 2006). hal. 10-11

- Menambah wawasan mengenai upaya buruh dalam memperjuangkan haknya.
- Menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema sejarah serikat buruh Islam di Indonesia.

b. Manfaat secara Praktis

- Menambah referensi bacaan bagi peneliti dengan tema terkait.
- Menjadi bahan acuan atau perbandingan dalam penelitian yang memiliki titik fokus yang sama terkait sejarah buruh Islam di Indonesia.
- Menambah khasanah pengetahuan terkait sejarah buruh yang ada di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi salah satu bab penting dalam penulisan hasil penelitian. Sebab dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menggali informasi dari berbagai sumber referensi yang terdapat dalam buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan tema besar yang telah ditentukan oleh penulis. Hal ini dilakukan agar penulis selaku peneliti mendapatkan informasi yang telah ada jauh sebelum penelitian ini dilakukan. Selain itu kajian pustaka juga berfungsi sebagai bahan acuan agar tidak terjadi replikasi yang tidak disengaja.

Beberapa literatur yang sesuai dengan tema yang dibahas pun digunakan oleh penulis, seperti buku berjudul *Watak Politik Gerakan*

Serikat Buruh Indonesia yang merupakan karya dari Iskandar Tedjasukmana. Dalam buku ini, Iskandar Tedjasukmana membahas tentang bagaimana pergerakan buruh yang terindoktrinasi oleh ideologi-ideologi politik. Dimana gagasan dan cita-cita politik menjadi alasan utama mendorong gerakan tersebut. Penciptaan gerakan buruh pada saat itu tidak dapat terlepas dari aktivitas politik yang mampu mempengaruhi serikat buruh yang rentan dengan kebijakan pemerintah.

Buku ini pun menjelaskan beberapa serikat buruh yang memiliki hubungan dengan partai-partai penyokongnya, tak terkecuali Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang terbentuk atas gagasan dari partai Masjumi. Selain itu, buku karya Iskandar Tedjasukmana juga membahas terkait watak politik yang memiliki pengaruh kuat dalam serikat buruh. Dijelaskan dalam buku ini bahwa watak politik dapat menimbulkan kekacauan yang mampu menghentikan arah dari setiap serikat buruh. Pada akhirnya, Iskandar Tedjasukmana menjelaskan bahwa mereka (serikat-serikat buruh) harus menerima setiap watak politik yang *fait accompli*, sehingga dapat mempermudah upaya dalam memperjuangkan hak buruh.

Selanjutnya, penulis menjadikan buku *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia: dari Tahun 1905 sampai 1926* karya D. N. Aidit sebagai referensi dan juga sumber dalam kepenulisan ini. Buku ini membahas sejarah gerakan buruh Indonesia yang sangat diperlukan untuk mempersiapkan kader-kader yang akan memperjuangkan hak buruh. Pembahasan ini jelas sangat berkaitan erat dengan topik penelitian penulis.

D. N. Aidit menjelaskan tentang bagaimana masyarakat kapitalis mencapai titik tertinggi dari sistem kapitalisme yang mereka terapkan. Imperialisme menjadi sebutan ketika sistem kapitalisme yang telah diterapkan mencapai titik tertinggi.

Buku ini juga menjelaskan tentang zaman imperialisme yang pada saat itu hanya terdapat satu sistem ekonomi yang menguasai dunia. Hal ini jelas menjadi pemicu munculnya gerakan buruh. Gerakan buruh yang ada berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya, yang selama ini sulit untuk mereka dapatkan. Meskipun begitu, perkembangan gerakan buruh pada saat itu jauh dari kata layak untuk meningkatkan penghidupan kaum buruh. Buku karya D. N. Aidit ini memang tidak menyinggung pergerakan Serikat Buruh Islam Indonesia, namun buku sejarah ini dapat menjadi sebuah referensi terkait perjuangan hak buruh dan bagaimana kehidupan buruh yang dijalani jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka.

Kemudian penulis menjadikan buku yang berjudul *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru* sebagai bahan acuan berikutnya. Soegiri DS dan Edi Cahyono selaku penulis buku ini menjelaskan bahwa, pada saat itu para pribumi dipaksa untuk menyisihkan setiap bagian tanahnya agar para penjajah kolonial dapat menanam tanaman yang akan mereka ekspor. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para pribumi saat itu dapat membangkitkan semangat juang untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial.

Penjelasan terkait zaman bergerak yang terjadi pada abad ke-19 pun dibahas dalam buku karya Soegiri DS dan Adi Cahyono. Zaman bergerak yang dimaksud adalah zaman yang menjadi awal berdirinya serikat-serikat buruh yang terbentuk karena terdapat pertumbuhan pergerakan buruh di belanda. Hal ini tentu tidak berkaitan dengan permasalahan rendahnya upah yang diterima oleh para buruh atau tentang memburuknya kondisi sosial tenaga kerja. Namun dari sinilah awal perjuangan serikat buruh mulai bermunculan. Beberapa serikat buruh yang berdiri sebelum atau setelah bangsa Indonesia merdeka pun dibahas dalam buku ini, salah satunya adalah Serikat Buruh Islam Indonesia. Dalam buku ini, pembahasan terkait SBII difokuskan pada prinsip yang mereka terapkan, bahwa perjuangan buruh merupakan hal yang berbeda dengan perjuangan politik.

Selain tiga buku yang telah diuraikan, penulis juga menggunakan skripsi sebagai bahan acuan dari penelitian ini. Penulis menggunakan skripsi dengan judul *Sarekat Buruh Islam Indonesia 1947-1960*. Skripsi karya dari Puji Suwasono ini menitik fokuskan pembahasan terkait gerakan atau upaya yang dilakukan oleh SBII dibawah kepemimpinan Mr. Daljono (1948-1953) dan Jusuf Wibisono (1953-1960). Masing-masing dari kepemimpinan memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa SBII di bawah kepemimpinan Mr. Daljono memfokuskan diri dengan turut menyelesaikan masalah larangan pemogokan. Larangan ini dikeluarkan sebab pada tahun 1950 terjadi mogok masal yang mengakibatkan menurunnya angka perekonomian. Selain itu

para buruh tidak menyadari bahwa mogok masal tidak akan menyelesaikan permasalahan terkait upah, karena hal tersebut sangat bergantung pada perbaikan perekonomian masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dijelaskan oleh Puji Suwasono dalam skripsinya, bahwa pada saat itu SBII tampak mengikuti larangan pemogokan yang dikeluarkan pemerintahan sebab pemogokan yang dilakukan oleh para buruh dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Hal ini tentu tak jauh dari tujuan untuk mencapai cita-cita politik suatu kelompok.

Berbeda dengan masa kepemimpinan Jusuf Wibisono yang pada saat itu berupaya agar SBII sebagai suatu serikat buruh dapat memperjuangkan kenaikan upah pada setiap buruh. Namun ditengah perjalanan perjuangan Jusuf Wibisono dalam memimpin SBII, Jusuf Wibisono dihadapkan dengan permasalahan yang mengharuskan SBII berpisah dengan Partai Masjumi. Permintaan pemisahan ini pun secara langsung disampaikan oleh Mr. Daljono, yang sebelumnya menjadi pemimpin SBII.

Referensi selanjutnya yang digunakan oleh penulis adalah jurnal yang berjudul *Serikat Buruh Islam Indonesia di Surabaya Tahun 1948-1960*. Jurnal yang ditulis oleh M. Sukron Aris Syahroinii dan Muryadi membahas terkait perjalanan SBII dalam memperjuangkan hak buruh di Surabaya. Dalam jurnal ini dijelaskan pula terkait SBII yang menganut politik islam dari partai Masjumi selaku partai induk SBII. Dijelaskan juga bahwa SBII tidak begitu berperan penting dalam bidang politik di Surabaya.

SBII cenderung membutuhkan kehadiran dari partai Masjumi sehingga peran mereka kurang terlihat memiliki pengaruh yang kuat dalam mempertahankan posisi partai Masjumi di Surabaya. Selanjutnya, terdapat pula pembahasan terkait kondisi ekonomi anggota SBII pada jurnal ini. Pembahasan kondisi ekonomi yang bertempat di Surabaya. Pembahasan ekonomi tak jauh dari topik pembicaraan terkait upah para buruh yang diterima pada saat itu, banyak terjadi dinamika perkembangan upah, namun akhirnya dihadapkan dengan inflasi yang turut mempengaruhi sistem pengupahan para buruh.

F. Kerangka Konseptual

a. Konsep Buruh

Istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁸ Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.⁹ Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁰

⁸ Fuad Riyadi. *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*. (Iqtishadia. Vol. 8. No. 1 Maret 2015) hal. 161

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

Pembahasan buruh selalu berkaitan dengan permasalahan fundamental dalam sebuah negara, sebab buruh kerap kali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemberi upah. Tindakan sewenang-wenang ini berwujud dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, adanya pemberhentian kerja sepihak. Permasalahan buruh sendiri menjadi suatu pembahasan yang penting dalam disiplin ilmu ekonomi, baik dalam sudut pandang kapitalisme, sosialisme maupun Islam. Meskipun pembahasan terkait buruh cenderung berkonotasi buruk, namun buruh memiliki peran penting dalam konsep ekonomi. Sebab buruh dianggap sebagai sumber daya manusia yang mampu melakukan proses produksi dan menghasilkan suatu produk yang dapat diperjualbelikan. Berbeda halnya dengan sosialisme, buruh dalam sosialisme dianggap sebagai pihak yang tereksploitasi oleh sistem kapitalisme. Dengan adanya hal ini perlu dihilangkannya konsep kepemilikan individu atas segala sesuatu yang berkaitan dengan alat-alat produksi dan melibatkan pemerintah dalam setiap kegiatan perekonomian.

1. Buruh dalam Perspektif Islam

Banyak persepsi yang menganggap bahwa buruh merupakan salah satu derajat rendah yang dimiliki manusia, padahal dalam

agama Islam tidak terdapat satu pun konsep yang menyinggung hal tersebut. Dalam sudut pandang Islam pun buruh tidak dianggap rendah derajatnya. Islam merupakan agama *rahmatan lil alamien* yang sangat memperhatikan dan memperlakukan buruh dengan semestinya. Meskipun tidak terdapat secara pasti hukum yang membahas tentang buruh, namun terdapat beberapa aspek dalam agama Islam yang telah disinggung dan sangat berkaitan erat dengan permasalahan buruh.

Meskipun tidak disinggung secara pasti terkait buruh dalam perspektif Islam, hukum dalam Islam tetap memiliki penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para buruh. Misalnya tentang hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Pada kenyataannya, buruh masih kesulitan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat dari cara orang-orang kapitalis yang memperlakukan mereka dengan sangat remeh dan hina. Jelas sikap ini sangat tidak sesuai dengan agama Islam. Buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah.¹¹ Dari pernyataan tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah diterapkan oleh para kaum kapitalis sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan jika, seluruh umat manusia merupakan saudara.

¹¹ Aravik, Havis. *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Islamic Banking Vol. 4 No. 1 Agustus 2018) hal. 3

Persaudaraan yang bersifat universal ini tidak terikat ruang ataupun batas-batas geografis. Rasulullah SAW bersabda: “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu.” (HR. Ahmad).¹²

Kemudian terdapat sebuah pendapat dari H. Yusuf Ahmad Lubis tentang kedudukan buruh dalam Islam. Menurut beliau kedudukan buruh terbagi menjadi 3 bagian. *Pertama*, anjuran bekerja dalam Islam yang diibaratkan sebagai bumi yang dijadikan sebagai hidangan Allah yang telah dikaruniakan kepada seluruh umat-Nya. Tentu sebagai umat yang telah disuguhi hidangan mengambil sesuai dengan semestinya. Meskipun umat manusia telah diberi banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, umat manusia juga harus berupaya dan tidak bermalas-malasan. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Mu'minin/23:51, “*Wahai Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”¹³ Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip Islam terkait hubungan buruh dengan majikan.

¹² *Ibid.* hal. 4

¹³ Batubara, Ismed. *KEDUDUKAN BURUH DALAM ISLAM: Pemikiran H. Yufu Ahmad Lubis tentang Buruh.* (Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 1 No. 3 2020) hal. 311

Tentang hubungan buruh dan majikan, menarik untuk menganalisis pendapat H. Yusuf Ahmad Lubis (1968) bahwa “ Disamping buruh melaksanakan tugasnya, ia juga mempunyai kewajiban menuntut hak-haknya. Majikan harus memandang bahwa buruh bukanlah menjadi abdi dan *chadam*-nya, tetapi buruh adalah saudaranya yang melancarkan pekerjaannya itu untuk kemajuan masyarakat bersama, dan buruh adalah *chadam* jabatan, penghidupan, bangsa dan negaranya, bukan *chadam* seseorang.”¹⁴ *Ketiga*, Adapun tanggung jawab negara terhadap buruh adalah kosekuensi dari hadis Nabi Muhammad saw. Bahwa Nabi bersabda: “*semua kamu menjadi pemimpin dan kamu akan ditanyai akan kepemimpinannya*”.¹⁵ Pemerintah menjadi penanggung jawab utama dalam mengatasi permasalahan banyak sedikitnya pengangguran dan seberapa mudah para buruh menerima haknya setelah menjalankan pekerjaannya.

b. Konsep Sosialisme

Sosialisme merupakan salah satu ajaran yang menginginkan penghapusan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.¹⁶ Tentu konsep ini memadupadankan kehidupan mewah dengan kehidupan masyarakat kelas bawah yang akhirnya melahirkan keseimbangan kehidupan dalam sebuah tatanan masyarakat. Konsep sosial sendiri

¹⁴ *Ibid.* hal. 314

¹⁵ *Ibid.* hal 317

¹⁶ Asnawiyah. *Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayid Quthb.* (Jurnal Substantia Vol. 15, No. 1, April 2013) hal. 54

merupakan suatu konsep yang erat dengan kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk menunjuk segala sesuatu yang dapat dipahami secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial merupakan cermin nyata situasi yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁷ Konsep sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki dinamika tanpa batas yang berangsur-angsur mengalami kemajuan. Kemajuan ini banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerja sama.¹⁸ Namun bukan berarti dalam dinamika kehidupan atau konsep sosialisme ini tidak memiliki suatu kecacatan. Terdapat pula ancaman-ancaman yang ada dibalik sebuah kemajuan konsep sosial dalam diri masyarakat. Seperti adanya ketidakadilan atau sikap sewenang-wenang yang dipengaruhi perbedaan kelas sosial, terdapat keberingasan sosial, arogansi kekuasaan, kekayaan dan juga materiil bahkan intelektual sekalipun. Tidak menutup kemungkinan terdapat ancaman yang bersumber dari pengaruh global dan paham-paham menyimpang yang muncul dari negara lain.

Hal ini jelas berkaitan dengan buruh. Buruh secara langsung merupakan bagian dari masyarakat dan ikut merasakan bagaimana dinamika kehidupan sosial ini berlangsung. Umumnya, buruh lebih sering merasakan ancaman-ancaman yang disebabkan faktor internal.

¹⁷ Nurtanio Agus Purwanto. *Pendidikan dan Kehidupan Sosial*. (Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 2 Tahun III, Oktober 2007) hal. 1

¹⁸ *Ibid.*

Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan sifat arogansi manusia yang kurang bisa dikontrol menimbulkan adanya ketidakseimbangan penerimaan hak hidup sebagai buruh ataupun sebagai manusia. Maka dari itu perlu dipahami betul mengenai konsep sosial agar kedepannya tidak terjadi hal-hal tidak manusiawi yang merugikan sesama manusia.

1. Sosialisme dalam Perspektif Islam

Kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Agama Islam pun memandang hal ini sebagai bentuk kesatuan. Di sini Islam memandang alam semesta dan kehidupan didalamnya dengan universal, tidak parsial dan terpisah-pisah.¹⁹ Hal ini tentu menjadi penjelasan yang berbeda dibanding penjelasan yang dijelaskan oleh pihak lain.

Pada dasarnya agama Islam dan sosialisme memiliki hal yang sama, yakni sama-sama memperjuangkan hak-hak kaum yang tertindas. Memang kenyataannya Islam dan Sosialisme memiliki gambaran yang berbeda dalam kehidupan manusia, namun tujuan dari dua hal ini dapat dikatakan sama dan sesuai dengan realita sosial yang ada. Bahkan menurut Sayyid Quthb, sosialisme berorientasi kepada ayat-ayat suci al-Qur'an yang didalamnya terdapat konsep-konsep kehidupan sosial yang telah digariskan oleh Allah.

¹⁹ Asnawiyah. *Op.cit.* hal 55

c. Konsep Politik

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat.²⁰ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa manusia menjadi inti utama dari politik karena apapun alasannya konsep politik tidak bisa meninggalkan keterlibatan manusia. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.²¹ Melalui penjelasan dari Deliar Noer dapat dilihat bahwa hakikat politik menunjukkan suatu tingkah laku manusia yang berbentuk kegiatan, sikap dan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pun mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Beliau juga berpendapat bahwa, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tapi yang ada yaitu: bentuk susunan masyarakat, hal mana dapat diketahui sebagai ungkapan yang berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki.²² Konsep politik ini tentu sangat berkaitan erat dengan buruh yang pembahasannya tidak akan terlepas dari konsep politik yang berkaitan erat dengan golongan masyarakat. Golongan-golongan masyarakat juga memiliki dan menggunakan

²⁰ Abdul Kadir B. Nambo, dkk. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu telaah dari sistem politik)*. (Jurnal Mimbar, Vol. XXI, No. 2 April-Juni 2005) hlm. 262

²¹ *Ibid.* hal. 265

²² *Ibid.* hal. 267

kekuasaannya untuk mempengaruhi dan juga mempertahankan suatu kelompok.

Jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan hingga saat ini, konsep politik yang diterapkan dalam dunia buruh sangatlah memprihatinkan. Hal ini dikarenakan buruh atau tenaga pekerja masih dijadikan sebagai objek dalam arah pembangunan ekonomi yang masih saja dianggap remeh dan diabaikan hak-haknya. Biasanya para pengusaha atau majikan akan memanfaatkan para buruh demi meraup keuntungan yang banyak tanpa memedulikan bagaimana nasib buruh kedepannya, tak jarang buruh pun dijadikan sebagai alat untuk memperlancar rencana politik yang telah disiapkan.

a. Politik dalam Perspektif Islam

Jika kata politik dikaitkan dengan Islam, maka lahirlah politik Islam yang aktivitas politik sebagian umat Islam didasarkan kepada hukum-hukum dalam agama Islam. Umumnya politik Islam ini menekankan pada simbolisme keagamaan saat sedang berpolitik, seperti menggunakan istilah-istilah yang mengandung unsur Islam dalam menentukan peraturan dasar organisasi, melakukan khittah perjuangan, menggunakan lambang-lambang Islam dan sejenisnya. Pembahasan terkait politik dalam Islam selalu menjadi pembahasan yang aktual karena hingga saat ini belum ada ketentuan pasti terkait bagaimana agama Islam memandang politik pun sebaliknya. Namun bukan berarti dalam agama Islam tidak ada pembahasan terkait perpolitikan.

Konteks perpolitikan dalam Islam dikenal dengan *fiqh politik* atau *fiqh politik syar'i*. Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syari'at dengan jalan ijtihad.²³ Istilah politik dari kausa kata Arab (*siyasah*) artinya memobilisasi kaum yang dipimpinya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.²⁴ Sedangkan kata syari'ah adalah sesuatu yang menjadikan syari'ah sebagai titik tolak dan sebagai sumber baginya, juga sebagai tujuan baginya, dan menjadikan konsep baginya.²⁵ Dari pengertian-pengertian tersebut, akhirnya dapat disimpulkan jika *fiqh politik syar'i* mencakup suatu hubungan individu dan juga negara atau bisa dikatakan sebagai suatu hubungan antar pemerintah dan yang diperintah.

Kemudian Hassan Hanafi, seorang tokoh intelektual yang besar dalam gejolak konflik dan perang yang terjadi di Mesir, memiliki sudut pandang tersendiri mengenai politik dalam perspektif Islam. Dengan pengaruh tradisi pemikiran filsafat Materialisme Historis Metode Dialektika, Hanafi bermaksud untuk mengadakan sebuah sistematisasi dan juga penyatuan semua aspek pengetahuan dan pengalaman agar dapat tersusun ke dalam satu keutuhan yang inklusif. Pemerintahan yang

²³ Nawawi, Ismail. *Politik dalam Perspektif Islam (Kajian Fiqh Politik Syar'i dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)*. (al-Daulah. Vol. 1, No. 1, April 2011) hal. 73

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

baik dalam sebuah negara menurut Hassan Hanafi adalah adanya keinginan umat Islam untuk lebih progresif mengikuti perkembangan masyarakat, masyarakat jangan cenderung pasrah terhadap realitas kehidupan.²⁶ Hassan Hanafi juga berupaya untuk membuat suatu gagasan terkait keharusan bagi Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dengan berdasar pada dimensi kebebasan.

Wacana pemikiran Kiri Islam adalah pemikiran dan gerakan sosial yang senantiasa melawan, mengkritik, dan memang terkadang amat “nakal” untuk menghancurkan segala hal yang berbau *establishment*, terutama kemapanan kekuasaan otoriter dan juga kapitalisme modern.²⁷ Bagi Hassan Hanafi negara yang benar adalah ketika terdapat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya melibatkan mereka dalam proses produksi tanpa menghiraukan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya Hassan Hanafi juga beranggapan, jika suatu negara yang sesuai dengan hukum Islam dan syariatnya ialah negara yang memiliki sebuah pemerintahan yang tidak dengan mudahnya menjanjikan sebuah keadilan sosial dengan tetap merawat kesengsaraan masyarakat.

Selain penjelasan tersebut, terdapat pula penjelasan-penjelasan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Ayat-ayat ini tentu menjelaskan tentang bagaimana cara manusia agar dapat hidup bermasyarakat dan

²⁶ I’in Mutma’innah. *Pemikiran Politik Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdulla)*. (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. UIN Walisongo Semarang, 2016) hal. 45

²⁷ *Ibid.* hal. 43

juga bernegara. Seperti Q. S al-Hadiid ayat 25 yang menjelaskan terkait misi Rasulullah yang harus menciptakan suatu kondisi yang didalamnya terdapat kehidupan rakyat yang jelas akan mendapat jaminan keadilan dan sosial. Ada pula penjelasan terkait norma-norma yang telah dicanangkan Al-Qur'an dan berisikan perintah agar menjalani dan mencapai kehidupan yang benar-benar disiplin.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dalam setiap proses penelitian. Penelitian sendiri merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.²⁸ Metode penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penelitian. Terdapat beberapa metode penulisan historiografi dalam metodologi sejarah. Namun, penulis akan menggunakan metode penelitian yang terdapat dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995), karya dari Kuntowijoyo. Berikut adalah lima tahapan dalam metode penelitian sejarah:

Pertama, pemilihan topik, Kuntowijoyo berpendapat bahwa dalam pemilihan topik disarankan agar berdasarkan kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Dua syarat itu subyektif dan obyektif, sangat penting karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang.²⁹

²⁸ Dini Silvi Purnia, dkk. *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. (Graha Ilmu; Yogyakarta. 2020) hal. 1

²⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995) hal. 92

Berdasarkan hal tersebut penulis memilih topik penelitian yang sesuai dengan kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Dua hal tersebut mengantarkan penulis untuk memilih topik ***“Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960”***

Kedua, pengumpulan sumber (heuristic), tahapan heuristik merupakan tahapan yang mengumpulkan data-data sejarah disesuaikan dengan jenis dan tema sejarah yang akan ditulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian sejarah yang memerlukan sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, skripsi, koran dan sumber tertulis lainnya serta sumber lisan. Sumber lisan merupakan hasil wawancara kepada saksi sejarah, pelaku sejarah ataupun kepada orang yang telah diwariskan suatu sejarah secara turun temurun. Sumber-sumber ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer (*primary sources*) adalah bila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri (*eye-witness* atau *ear-witness*), atau mengalami sendiri (*the actor*) peristiwa yang dituliskan dalam sumber tersebut.³⁰ Selain itu sumber primer dapat dikatakan sebagai sumber yang belum diolah. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Harian Abadi*, *de Drije Pers*, *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, *Indische Courant voor Nederland*, dan *Algemeen Indisch dagblad: de*

³⁰ Prof. Dr. Nina Herlina, M. S. *Metode Sejarah*. (Satya Historika: Bandung. 2020) hal. 24

Preangerbode serta sumber-sumber primer lain yang terkait. Sumber ini berisi tentang segala aktivitas yang dilakukan oleh buruh Islam dan tak terkecuali juga gagasan yang berasal dari tokoh pergerakan tersebut.

Ketiga, tahap verifikasi atau kritik sumber, Setelah memahami topik pembahasan dan sumber yang dibutuhkan, verifikasi menjadi tahap selanjutnya dalam metode penelitian. Tahap ini merupakan upaya yang juga harus dilakukan oleh penulis agar dapat mengolah dan juga menyaring sumber-sumber yang telah terkumpul. Di tahap ini penulis akan terbantu dalam menyeleksi data, sehingga dalam akhir tahapan ini penulis akan mendapatkan sumber yang relevan dengan tema besar penelitian serta dapat menemukan fakta yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Verifikasi terbagi menjadi dua bagian, kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern merupakan suatu tahapan yang terdapat dalam verifikasi yang berfungsi untuk membantu peneliti mengetahui apakah sumber yang didapatkan adalah sumber autentik atau tidak. Sedangkan untuk kritik intern, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai seluruh sumber data yang didapat penulis dengan tujuan mendapatkan suatu data yang autentik maupun tidak dan agar mendapatkan suatu sumber data yang dapat dipercaya. Membandingkan setiap sumber primer maupun sekunder merupakan cara untuk melakukan tahapan kritik ekstern ini.

Keempat, Interpretasi, tahap ini merupakan tahapan dimana penulis diharuskan mencari hubungan antara sumber data satu dengan sumber data

lainnya. Selain mencari keterkaitan antar sumber, dalam tahap ini penulis harus merangkai dan mengaitkan sumber data yang diperoleh agar menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dengan melakukan tahapan ini, satu pihak akan menghidupkan objek-objek penelitian dan di pihak lain akan ada upaya untuk menggiring data-data pada tema dan topik lainnya. Selain itu, penulis harus berada di bawah ketentuan yang ada dalam metodologi sejarah, sehingga pada akhirnya subjektivitas dapat dihindari atau dihilangkan. Dalam metodologi sejarah sendiri mengharuskan penulis mencantumkan setiap sumber data yang ada. Hal ini diharapkan agar pembaca dapat mengecek kebenaran data dan konsisten dengan interpretasinya.³¹

Kelima, Historiografi, historiografi menjadi tahapan akhir dari lima tahapan yang disebutkan oleh Kuntowijoyo. Dalam tahapan ini pun penulis diminta untuk menyajikan hasil interpretasi atau penafsiran fakta sejarah dalam bentuk tulisan yang akan diubah menjadi kisah. Adapun pola penyajiannya, yakni:

- Informasi deskriptif yaitu penyajian tulisan yang sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperoleh dari sumber-sumber yang diteliti, seperti kutipan dari buku-buku, kutipan dari narasumber, maupun ucapan langsung ketika wawancara.

³¹ Nisful Laili Mauladana. *Sejarah Perkembangan Yayasan Al-Ashar di Rungkit Kidul Surabaya (1981-2016)*. (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018) hal. 15

- Informasi interpretasi, yaitu penyajian dengan menggunakan analisis untuk memperoleh kesimpulan yang sebenarnya.³²

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Tahap sistematika penulisan ini, penulis memperjelas serta mempermudah dalam menggambarkan secara ringkas tentang apa yang telah menjadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulisan skripsi yang berjudul *Kiprah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam Meningkatkan Penghidupan Buruh Tahun 1947-1960* memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, akan membahas tentang sejarah terbentuknya SBII. Bab ini akan mengulas mengenai kondisi umum dari para buruh pasca revolusi yang juga menjadi penyebab dari lahirnya Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang perkembangan sektor perekonomian 1945-1949. Perkembangan sektor perekonomian menjadi gambaran tentang keterkaitan kondisi negara Indonesia yang baru mengumumkan proklamasi kemerdekaan dengan kondisi buruh pada saat itu dan pembahasan terakhir dalam bab ini adalah keterlibatan Partai

³² *Ibid.* hal.16

Masjumi sebagai partai politik dalam sejarah SBII. Keterlibatan Partai Masjumi tentu menjadi awal dari perjalanan panjang SBII dalam mengupayakan hak para buruh.

Selanjutnya pada bab *ketiga*, akan dipaparkan pembahasan mengenai kerja sama yang terjalin antara SBII dengan Partai Masjumi. SBII yang merupakan anak organisasi dari Partai Masjumi tentu tetap mengikuti ideologi yang digunakan oleh Partai Masjumi sejak awal. Hal ini pun membuat segala bentuk upaya yang dilakukan oleh SBII dalam perjuangannya memperbaiki nasib para buruh pada masa revolusi tidak jauh dari Islam sebagai dasar ideologi.

Kemudian untuk bab *keempat*, berisi tentang pembahasan terkait aksi-aksi yang telah dilaksanakan oleh SBII. Aksi ini tentu bertujuan untuk memperjuangkan hak buruh dengan berdasar kepada ajaran-ajaran Islam sebagai dasar Ideologi. Kemudian pembahasan terakhir dalam bab ini akan mengulas tentang awal mulanya SBII dibubarkan. Meski SBII mengalami perkembangan yang cukup baik sejak SBII dilahirkan, namun SBII harus tetap menyesuaikan Partai Masjumi sebagai Partai induk dari SBII.

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA SBII

A. Kondisi Umum Perburuhan di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Beberapa peristiwa penting yang terjadi di pertengahan tahun 1945 sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Masa-masa ini dapat disebut sebagai proses dari restrukturisasi fundamental sistem sosial dan juga politik sebuah masyarakat. Pembahasan ini pun mengarah pada masa revolusi yang menjadi rentang sejarah bangsa Indonesia dan berperan sebagai pusat dari pembentukan negara Indonesia. Di masa ini seluruh lapisan masyarakat turut memperjuangkan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Meski revolusi tidak terjadi begitu saja, namun revolusi mampu menciptakan atmosfer kemarahan dan ketakutan. Atmosfer inilah yang membuat masyarakat sulit untuk berpikir jernih.

Masa revolusi yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan sebuah reaksi dan juga penolakan terhadap penjajah Belanda maupun Jepang. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan yang pada saat itu mengalihkan perhatian pada penyelesaian revolusi nasional setelah berhasil merebut kekuasaan dari kependudukan Jepang. Revolusi 1945 digerakkan oleh kekuatan dan cita-cita yang berkembang sejak awal abad ke-20 itu

memperoleh militansinya semasa pendudukan Jepang.³³ Pada saat itulah, kekuatan dan cita-cita yang telah lama dipendam pun mampu untuk kembali tumbuh dalam benak setiap masyarakat Indonesia.

Pembaharuan dari segala hal yang bersifat lama merupakan makna dari revolusi. Tentunya masa revolusi menjadi masa yang tepat untuk menunjukkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan meski harus mengibarkan bendera perang. Dalam fase seperti itu, perlu ditunjukkan secara ekstrem bahwa mereka yang revolusioner berbeda, serta panggilan beratus-ratus tahun digumpal menjadi tindakan dalam tempo satu detik.³⁴ Meski tampak seperti upaya yang mengandalkan pertaruhan, pada kenyataannya uji coba ini dapat diwujudkan dan menjadi pelengkap dari sejarah Republik Indonesia.

Saat revolusi terjadi, politik menjadi salah satu aspek penting yang mengkoordinasi masyarakat. Tentu dalam hal ini terdapat konflik yang disebabkan oleh persaingan-persaingan yang terjadi antar kekuatan politik. Konflik ini pun memicu terbentuknya suatu badan perjuangan yang turut mempertahankan kemerdekaan. Masing-masing dari badan perjuangan ini juga menawarkan ideologi tertentu, sesuai dengan arah dari kekuatan politik yang ada. Selain hal tersebut, setiap badan perjuangan juga mengeluarkan tuntutan tentang kedaulatan rakyat. Dalam koran kedaulatan rakyat edisi 7 Februari 1946, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat sering dipahami

³³ Tahi Bonar Simatupang, *Dari Revolusi ke Pembangunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hal. 1

³⁴ Soe Hok Gie. *Simpang Kiri dari Sebuah Djalan* (Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1969), hal 106.

sebagai kesempatan bagi tiap golongan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kehendak masing-masing. Pemahaman inilah yang membuat beberapa golongan masyarakat memutuskan dan melakukan segala sesuatu atas kehendak golongan. Namun pada kenyataannya, kehendak golongan masyarakat pada saat itu sangat bertentangan dengan putusan pemerintahan yang sebenar-benarnya menjalankan kedaulatan demi kepentingan rakyat.

Pemerintah berusaha untuk dapat menempatkan diri diantara militansi dan juga aksi yang terjadi pasca proklamasi. Salah satu hal yang harus diupayakan pemerintah pada saat itu adalah militer. Urgensi akan organisasi militer tersebut bagi negara yang baru merdeka dari kolonialisme adalah untuk mempertahankannya dari ancaman kembalinya bangsa kolonial.³⁵ Pemerintah pun berupaya agar aparat sipil dan militer dapat menjangkau ke seluruh penjuru negeri. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah agung terkendala oleh sarana komunikasi yang pada saat itu masih belum memadai.

Hal ini dapat terlihat dari cara penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh kaum muda. Tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak pemerintahan pun tidak dapat direalisasikan karena pemerintah masih menghadapi banyak kendala. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan ini dilakukan secara terang-terangan oleh kaum muda. Mereka tak segan untuk menyampaikan berita

³⁵ Hadi Nafis Kamil. *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*. (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hal 1.

ini melalui telegraf Jepang dan juga kantor-kantor berita. Meski banyak upaya yang telah dilakukan oleh kaum muda maupun pemerintahan, berita ini masih sulit sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian besar warga kota di Jawa yang telah mendengar kabar proklamasi itu cenderung tidak tahu bagaimana caranya menyambut dan mengisi arti kemerdekaan.³⁶ Bahkan beberapa kota di Indonesia belum banyak yang mengetahui kabar tersebut, apalagi berita tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945.³⁷

Sejak 15 Agustus 1945 hingga 2 September 1945, seluruh wilayah kekuasaan Jepang (termasuk Indonesia) mengalami *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan). Ketika hal ini terjadi, tentu para tokoh menyadari betapa besarnya peluang yang ada untuk membentuk dan juga menata negara yang nantinya akan terus berkembang. Itulah sebabnya pasca proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesai (PPKI) melaksanakan sidang sebanyak tiga kali. 18 Agustus 1945 merupakan tanggal pelaksanaan sidang pertama yang dilaksanakan oleh PPKI. Pada sidang ini PPKI berhasil mengambil beberapa keputusan, diantaranya:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme;
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Hatta sebagai wakil presiden;

³⁶ Arya Wisesa, E Dwi. *Partai Buruh Indonesia, 1945-1946 Mencari Identitas Organisasi*. (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 1988). hal. 3

³⁷ *Ibid.*

3. Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.³⁸

Kemudian PPKI melaksanakan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun hasil dari sidang kedua ini ialah:

1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi;
2. Merancang pembentukan dua belas departemen dan menunjuk para menteri-menterinya;
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.³⁹

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sumatera, Sulawesi, Borneo dan Sunda Kecil merupakan 8 provinsi yang pada saat itu telah disebutkan dalam sidang PPKI yang kedua. Tiap-tiap provinsi yang telah dibentuk, dipimpin oleh gubernur yang ditugaskan untuk membentuk juga menata pemerintahan di masing-masing wilayah. Selanjutnya dibentuk pula 12 kementerian, yakni Kementerian Keuangan Kemakmuran; Perhubungan; Pertahanan, Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Dalam Negeri; Luar Negeri; Sosial; Penerangan; dan Kehakiman. 12 kementerian tersebut dipimpin oleh seorang menteri yang penentuannya juga dilakukan dalam sidang PPKI yang kedua.

³⁸ Rohayuningsing, Heri. *Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 1*. (Forum Ilmu Sosial. Vol. 36. No. 2. Desember 2009) hal. 190

³⁹ *Ibid.*

Selanjutnya, PPKI kembali mengadakan sidangnya yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini terdapat beberapa hasil putusan, yakni:

1. Membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) yang dirancang menjadi partai tunggal Negara Indonesia, namun kemudian dibatalkan.
2. Membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum.
3. Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan.⁴⁰

Upaya mempersiapkan sebuah sistem pemerintahan tidak hanya berhenti pada sidang yang telah dilaksanakan oleh PPKI. Beberapa tokoh yang telah memiliki kekuasaan atas pemerintahan Republik Indonesia pun turut mempersiapkan hal lain. Akan tetapi, waktu yang dimiliki oleh para tokoh atau pemimpin di pemerintahan Republik Indonesia terbilang tidak cukup untuk membentuk dan mempersiapkan birokrasi sipil dan juga militer. Minimnya konsep perencanaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan gelora revolusi pada saat itu membuat pemerintah Republik Indonesia mengalami kesulitan untuk memaksimalkan upaya yang dapat dilakukan. Melihat kondisi saat itu membuat Ir. Soekarno yang telah

⁴⁰ *Ibid.* hal. 191

menjabat sebagai presiden, mempersiapkan berbagai hal agar dapat kembali mengupayakan perkembangan Republik Indonesia.

Ketika pemerintahan fokus pada upaya pembentukan sistem pemerintahan Republik Indonesia, sebuah gerakan masyarakat terlahir kembali. Gerakan masyarakat ini merupakan kaum pekerja yang berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi awal dari pembebasan kaum pekerja. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kaum pekerja atau buruh selalu menghabiskan waktu untuk bekerja tanpa bayaran yang setimpal. Hal ini tentu terjadi pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Umumnya disini, pihak pemberi kerja, lebih suka melihat kaum buruhnya tidak berserikat.⁴¹ Berapa banyak pegawai dari sesuatu perusahaan dilepas dari pekerjaannya, karena “berani” menjadi promotor dari perserikatan kaum sekerja.⁴² Kondisi inilah yang membuat kaum buruh segera membentuk sebuah serikat perjuangan yang dinyatakan sebagai upaya mereka untuk mempertahankan juga menjaga kemerdekaan Republik Indonesia.

Tentu mempertahankan dan juga menjaga kemerdekaan Republik Indonesia memiliki dua makna yang berbeda jika dijadikan sebagai tujuan dari pembentukan suatu serikat buruh. Bisa jadi, makna dari mempertahankan dan juga menjaga kemerdekaan Republik Indonesia adalah mengutamakan suatu kepentingan yang secara langsung dapat

⁴¹ Apa Sebab di Indonesia, Pernah didapati Pertentangan jg Tadjam Antara Kaoem Boeroch dan Kaoem Madjikan?. *Sinar Deli*, 14 Maret 1930. hal. 1

⁴² *Ibid.*

mempengaruhi kehidupan para buruh atau dapat dimaknai sebagai suatu perjuangan yang harus diutamakan demi menegakkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Meski terdapat makna yang berbeda dari penafsiran tujuan suatu serikat buruh, kaum buruh masih terus aktif berjuang dengan berbagai cara yang dapat mereka lakukan. Seperti misalnya, mendirikan beberapa organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mengambil alih bagian dari pemerintah, pabrik atau perusahaan milik swasta yang masih dioperasikan oleh pemerintahan Jepang. Dari sinilah akhirnya para pemimpin buruh menyadari bahwa perjuangan mereka menjaga kemerdekaan Republik Indonesia harus disesuaikan dengan asas gerakan buruh. Kesadaran ini pun menjadi awal dari pembentukan organisasi buruh yang diharapkan dapat menyatukan dan juga mewakili setiap serikat buruh. Hingga akhirnya, pada tanggal 15 September 1945, lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia).⁴³

BBI diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan bagi para buruh. Setelah BBI berdiri, BBI menyatakan bahwa BBI merupakan organisasi perjuangan yang nantinya akan membentuk serikat buruh dan tidak melupakan tugas utamanya yakni menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kongres BBI di Solo pada bulan November 1945, setelah melalui perdebatan karena adanya isu akan

⁴³ Kirom, Sazalil. *Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekeja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)*. (Avatara. Vol. 1 No. 1. Januari 2013). hal. 13

diselenggarakannya pemilihan umum pada bulan Januari 1946, BBI berubah menjadi PBI.⁴⁴ Maksudnya, ialah agar partai ini juga dapat ikut serta dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan kelak.⁴⁵ Nama yang dipakai sesuai dengan usulan Sjamsoe Harja-Oedaja berikut tambahan kata “Indonesia” di belakang nama partai, yakni Partai Buruh Indonesia (PBI).⁴⁶ Dengan meleburnya BBI menjadi PBI yang merupakan sebuah partai politik, menjadikan segala bentuk perjuangan terkait kaum buruh, diwakilkan oleh PBI.

Setelah PBI terbentuk, terdapat pula beberapa hasil keputusan yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat kongres. Salah satu keputusan yang ada ialah memilih ketua sementara. Sjamsoe Harja-Oedaya terpilih sebagai ketua kemudian membentuk sebuah panitia kecil dengan tugas menyusun anggaran dasar dan program partai.⁴⁷ Pemilihan ini berdasarkan hasil keputusan akhir kongres buruh dan tani yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 9 November 1945. Surakarta menjadi wilayah yang dipilih untuk mengadakan acara kongres ini, sebab Surakarta dinilai sebagai wilayah yang aman dari jangkauan musuh. Kongres buruh dan tani juga menjadi kongres pertama yang diadakan oleh para buruh dan juga tani se-Indonesia. Mulanya kongres ini hanya diperuntukan bagi para buruh saja, namun dijelaskan dalam rapat bahwa

⁴⁴ Wijaya, Endra. *Pendekatan Historis dan Politik Hukum Terhadap Keberadaan Partai Kaum Buruh di Indonesia*. (Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 03. September 2016) hal. 314

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Arya Wisesa, E Dwi. *Op.Cit* hal 28

⁴⁷ *Ibid.* hal. 30

beberapa pemimpin dari kaum tani meminta agar dapat diikuti sertakan dalam kongres ini.

31 Desember 1945, menjadi kesempatan bagi PBI untuk kembali menggelar rapat yang dilaksanakan di Blitar, Jawa Timur. Dalam rapat tersebut PBI mencoba untuk meninjau kembali kontribusi PBI dalam revolusi nasional. Kontribusi yang dimaksud ialah tentang upaya PBI dalam membentuk dan juga menyempurnakan serikat atau organisasi buruh. Selanjutnya PBI juga memperjelas terkait keterlibatan partai yang ruang geraknya terbatas pada ranah politik dan juga hubungan internasional. Akan tetapi, serikat-serikat buruh yang telah ada atau terbentuk diperkenankan untuk memilih secara otonom atau menjadi bagian dari PBI.

Rapat yang diadakan di kota Blitar ini juga melahirkan sebuah badan perjuangan yang diberi nama Laskar Buruh Indonesia (LBI). Dengan terbentuknya LBI, diharapkan agar LBI dapat fokus melakukan pelatihan-pelatihan kemiliteran, memberi tuntutan atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan politik, menjalin kerja sama dengan organisasi atau serikat perjuangan lainnya dan melakukan penjagaan di lingkup pabrik. Dengan kata lain, LBI berkewajiban untuk membela hak dan juga kepentingan para buruh dan tani. LBI bersifat otonom, sehingga LBI tidak menjadi bagian dari PBI. Namun, setelah BBI “dihidupkan” kembali pada awal Januari 1946, LBI otomatis masuk ke dalam tubuh BBI dengan nama “Bagian Pembelaan”.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* hal. 60

Setelah kemunculan BBI dan juga LBI, terdapat pula Barisan Buruh Wanita (BBW). BBW merupakan wadah untuk menghimpun para buruh wanita juga istri buruh. Sesuai hasil kongres BBW yang dilaksanakan di Kediri pada tanggal 25 hingga 26 Januari, disebutkan bahwa BBW, sebagai organisasi buruh wanita harus bersama-sama dengan para buruh laki-laki agar dapat memperjuangkan nasib para buruh dan juga mampu merobohkan imperialisme dan kapitalisme yang masih membelenggu masyarakat Indonesia pada saat itu. Dalam menjalankan tugasnya, BBW membentuk barisan penolong, dimana mereka ditugaskan untuk merawat korban perang, mengatur pengiriman bahan pangan dan bertanggung jawab penuh atas urusan dapur umum.

Munculnya Barisan Buruh Indonesia (BBI), Laskar Buruh Indonesia (LBI), dan juga Barisan Buruh Wanita (BBW), tentu menjadi awal mula dari perjuangan para buruh dalam memperjuangkan haknya. Pada tahun 1946 dalam kongresnya di Madiun, BBI dibubarkan dan diganti dengan GASBI (Gabungan Sarekat Buruh Indonesia).⁴⁹ Kemudian sebagian dari anggota GASBI mencoba untuk mendirikan GSBV (Gabungan Sarekat Buruh Vertikal). Namun pada bulan November tahun 1946, GASBI dan GSBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), peleburan ini merupakan hasil jerih payah dari Alimin dan Harjono. SOBSI merupakan organisasi yang bersifat demokratis

⁴⁹ Suwasono, Puji. *Sarekat Buruh Islam Indonesia*. (Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 2002). hal. 21

sentralisme, pengurus sentral bertanggung jawab penuh pada setiap kongres yang dilaksanakan.

SOBSI sendiri menjadi bukti kemajuan besar dalam gerakan buruh, hal ini disebabkan karena SOSBI berhasil menyatukan 34 serikat buruh. Pesatnya perkembangan SOBSI juga diikuti dengan pernyataan bahwa mereka bukanlah bagian dari sebuah partai politik. Namun pada kenyataannya, SOBSI berafiliasi terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Tentu hal ini menjadi kekhawatiran bagi kaum muslim. Pasalnya SOBSI yang merupakan bagian dari PKI mampu menguasai kaum buruh di Indonesia, komunis merupakan musuh dari kaum muslim. Melihat hal ini tentu membuat Partai Masjumi yang menjadi salah satu partai Islam terbesar mendirikan sebuah serikat buruh, bernama Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Bentuk dari SBII sendiri tidak seperti organisasi atau serikat buruh pada umumnya, hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam SBII adalah agama Islam. Buruh yang diizinkan bergabung pun hanya buruh yang beragama Islam. Dari sini terlihat jelas tentang misi yang akan dijalankan SBII, yakni menanamkan ideologi Islam kepada umat muslim di tengah-tengah upaya memperjuangkan setiap hak buruh, terutama buruh yang beragama Islam.

B. Perkembangan Sektor Perekonomian 1945-1949

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, seluruh jajaran pemerintahan yang saat itu dibentuk, bertanggung jawab penuh atas perkembangan setiap sektor yang ada. Sektor perekonomian menjadi salah

satu hal yang harus diurus oleh pihak pemerintahan. Tuntutan ini hadir bukan tanpa sebab, melainkan karena situasi Indonesia yang pada saat itu masih jauh dari kata mampu untuk langsung memberikan banyak perubahan yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Meskipun begitu, pihak pemerintahan pada saat itu telah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 diikuti dengan pembentukan struktur pemerintahan. Namun situasi yang berlangsung di tengah-tengah pemberlakuan status quo oleh pihak sekutu terhadap seluruh wilayah kedudukan Jepang sebagai pihak yang kalah perang dan disusul oleh bayang-bayang kembalinya kekuatan kolonial Belanda, tidak memungkinkan kabinet yang dibentuk menjalankan roda pemerintahan sebagai semestinya.⁵⁰

Seiring waktu, masyarakat Indonesia menyatakan ketidakpuasan terhadap sikap Jepang yang belum menyatakan atau mengakui Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Bahkan, Jepang masih mempertahankan status quo dengan mengatasnamakan sekutu. Situasi ini memicu masyarakat Indonesia untuk tetap melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjadi harapan bagi pemerintahan dan juga masyarakat Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, tentu akan sulit menemukan perencanaan pembangunan perekonomian dalam setiap program kabinet. Dapat dikatakan pada periode ini perekonomian Indonesia

⁵⁰ R. Z. Lerissa, dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. 1996) hal. 92

masih sangat kacau. Hal ini terlihat dari pembiayaan perjuangan yang diupayakan melalui berbagai cara dan tidak terkoordinir secara baik atau terpusat.

Selain hal tersebut terdapat penyebab lain yang membuat perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan tergolong sangat buruk, diantaranya ialah:

1. Pemerintahan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, seperti mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang dan mata uang De Javasche Bank. Banyaknya jenis mata uang yang ada menyebabkan Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi.
2. Sejak November 1945, terdapat blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Hal ini bertujuan agar dapat menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia.
3. Oktober 1946, menjadi waktu dimana pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia), tentu hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai pengganti dari uang Jepang. Namun ternyata sebelum hal ini terjadi, Panglima AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies* atau pasukan sekutu), menyatakan bahwa uang NICA akan berlaku di setiap daerah yang dikuasi oleh sekutu.

Berkaca dari penyebab buruknya kondisi perekonomian di Indonesia, pemerintahan pun berupaya untuk mengatasi hal-hal tersebut, Adapun upaya yang dilakukan ialah:

1. Diadakannya konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946, konferensi ini bertujuan memperoleh suatu hasil mufakat yang bulat. Tentu hal ini akan menanggulangi permasalahan ekonomi yang mendesak, seperti: masalah sandang, status, administrasi setiap perkebunan dan dapat mengatasi permasalahan produksi dan distribusi makanan.
2. Pada bulan Juli 1946, menteri keuangan, Ir. Surachman melaksanakan program pinjaman nasional. Pelaksanaan ini tentu atas persetujuan dari pihak BP-KNIP.
3. Membentuk *Planning Board* atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947
4. Tahun 1948, menjadi waktu bagi Rera. Rera sendiri merupakan Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Program pemerintah Hatta ini diharapkan dapat mengurangi dan mengefisienkan jumlah angkatan bersenjata atau dapat dikatakan sebagai upaya pengalihan tenaga bekas angkatan perang ke beberapa sektor produktif, seperti sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor terbengkalai semenjak perang berlangsung.

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar), beban hutang luar negeri sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan hutang dalam negeri Rp. 2.800.000.000.⁵¹ Dalam situasi saat itu, tentu sangat menggambarkan bagaimana permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya masih belum dapat diatasi dengan maksimal. Hal ini pun akhirnya berpengaruh pada harga barang yang semakin melonjak dan nilai rupiah masih sangat rendah. Rendahnya nilai rupiah ini membuat negara lain sulit meletakkan kepercayaan pada mata uang rupiah.

Buruknya perekonomian yang dialami bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan hingga tahun 1949, membuat banyak masyarakat hidup dalam kesengsaraan. Meski kesengsaraan yang dirasakan masyarakat tidak mutlak dari perekonomian yang buruk, akan tetapi salah satu penyebab ini menimbulkan dampak yang cukup besar sepanjang sejarah Indonesia. Masyarakat Indonesia terkhusus buruh, melakukan aksi pemogokan kerja. Sebenarnya aksi pemogokan ini bukanlah suatu hal yang baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah Indonesia berhasil merdeka dari penjajahan, aksi ini menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan masyarakat Indonesia tidak berhenti sampai di kemerdekaan Indonesia saja.

⁵¹ Djuanda. *Ekonomi Nasional*. (Mimbar Indonesia, No. 32 Thn IV. 12 Agustus 1950). hal.

Suatu momen yang penting dalam pemogokan Delanggu ialah terjadi pada tanggal 26 Mei 1948.⁵² Delanggu merupakan tempat yang memiliki banyak usaha pabrik karung goni dan penanaman kapas yang dikelola oleh pemerintah. Bisa dikatakan, pada saat itu wilayah Delanggu menjadi wilayah yang masyarakatnya memiliki penghasilan yang cukup dan tidak terlalu miskin. Bagi PKI atau FDR (Front Demokrasi Rakyat) wilayah Delanggu menjadi wilayah yang tepat untuk melakukan aksi perjuangan melawan pemerintah. Perlawanan yang didasarkan akibat dari buruknya perekonomian dan digerakkan oleh faktor politik serta faktor militer membuat aksi ini menjadi sedikit lebih kompleks. Bagi masyarakat Delanggu, aksi mogok kerja ini merupakan suatu hal yang baru, dimana para buruh perkebunan kapas dan juga buruh pabrik karung goni melakukan aksi mogok kerja yang sistematis.

Selain melibatkan para buruh, aksi pemogokan buruh ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa partai. Kemudian, SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) dan SOBSI secara langsung memiliki peran dalam aksi pemogokan ini. Sekitar 60% dari buruh yang terlibat dalam pemogokan pada pabrik karung Delanggu adalah pengikut SARBUPRI.⁵³ Pihak buruh yang bernaung di bawah SOBSI telah mengajukan tuntutan mereka. Mereka menuntut agar buruh tetap dan buruh

⁵² Lestari. *Aksi Buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Cabang Madiun Tahun 1957-1959*. (Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004). hal. 56

⁵³ *Ibid.* hal. 57

lepas (musiman) diberikan gaji *in natura* (disamping uang) sebanyak 3 meter kain untuk tahun 1947 dan 20 kilogram (maksimum 35 kg) beras sekerluarga per bulan.⁵⁴ Pemerintah pada prinsipnya setuju untuk meluluskan permintaan buruh, tetapi soal-soal praktis mengahalanginya, misalnya tidak adanya persediaan tekstil yang cukup dan juga kerugian-kerugian yang timbul dan membahayakan nasib perusahaan tersebut.⁵⁵ Saat aksi pemogokan berlangsung, kader-kader FDR bertugas untuk memberikan bantuan dengan jalan meneror para golongan-golongan yang hendak mengisi kekosongan yang disebabkan oleh aksi pemogokan. Meski begitu, aksi pemogokan ini dapat dikatakan berjalan dengan tertib. Namun, beberapa pertikaian darah terjadi, misalnya di daerah Juwiring dan Delanggu kota.⁵⁶ Pertikaian ini terjadi antara pendukung Masjumi dengan pendukung FDR. Akibat pertikaian ini, daerah Delanggu menjadi wilayah yang diawasi langsung oleh pemerintahan militer.

C. Berdirinya Serikat Buruh Islam Indonesia

Pembaharuan Islam memiliki pengaruh dalam sejarah berkembangnya negara Indonesia. Pembaharuan atau pemikiran modern Islam sendiri mulai muncul di kepulauan Melayu sekitar awal abad ke-17, akan tetapi penyebaran pemikiran modern islam ini mulai memiliki pengaruh yang cukup besar ketika memasuki abad ke-20. Hal ini dapat

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. (Yogyakarta: Bentang, 1997) hal. 24-25

⁵⁶ Lestari. *Op.cit.* hal. 58

terlihat dari gerakan sosial pendidikan dan juga politik yang perkembangannya cukup signifikan. Salah satu contoh yang tepat untuk dijadikan pembahasan adalah pengaruh pemikiran modern Islam dalam gerakan politik di Indonesia. Pengaruh ini berimbas kepada banyaknya partai-partai yang terbentuk dengan berdasar kepada agama Islam, seperti Persatuan Muslimin Islam Indonesia, Sarekat Islam (SI), Partai Islam Indonesia dan sejenisnya. Pada awal abad ke-20, partai-partai yang berdasar pada agama Islam akhirnya mulai berkembang dengan melalui Partai Masjumi. Partai Masjumi sendiri merupakan satu-satunya alat politik bagi umat islam. Di awal kemerdekaan dengan masuknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdhtul Ulama, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam sebagai organisasi pertama yang masuk Masjumi.⁵⁷ Organisasi-organisasi tersebut menjadi saksi perjalanan Partai Masjumi yang menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia.

Secara eksplisit pemikiran modern yang ada pada Partai Masjumi dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan tentang partai yang dasarnya didasarkan pada Islam. Hukum-hukum yang ada pada Islam juga mengatur setiap anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Ini dapat dibuktikan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun-tahun awal kemerdekaan seperti yang dikeluarkan pada tahun 1945 berisi rumusan-rumusan tentang program partai tujuan dan cita-cita yang kurang mendetail

⁵⁷ Khumaidi, Faiq Nur. *Pemikiran Modern Islam dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1960*. (Avatara. Vol. 11, No. 11, 2021).

dalam uraiannya.⁵⁸ Tentu hal ini dipengaruhi oleh masa kepemimpinan golongan tua yang sebagian besar anggotanya merupakan bagian dari organisasi Islam yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Tak jarang mereka akan membawa pengalaman yang didapat selama menjadi bagian dari organisasi Islam zaman kolonial ke permasalahan yang tengah dihadapi organisasi Islam atau Partai Islam yang baru terbentuk pasca kemerdekaan.

Sejak awal berdirinya Partai Masjumi, tiap anggotanya telah sepakat untuk menjadikan Islam sebagai asas atau dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Asas Islam ini pun dicantumkan dalam Ad/ART Partai. Sebagai sebuah partai, tentu Masjumi memiliki tujuan. Tujuan ini tak lain demi mewujudkan negara Indonesia yang berkadaulatan rakyat dan terdapat persamaan hak yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, persamaan hak ini pun bersifat modern dan demokratis. Secara tidak langsung, pemikiran modern Islam yang diterapkan oleh partai Masjumi memberikan pengaruh yang cukup beragam dan dapat kembali direproduksi agar dapat disesuaikan dengan Islam. Hal ini pun dapat diwujudkan jika masih dalam lingkup muamalat yang dapat ditemukan dalam setiap program-program partai Masjumi.

Kehadiran partai Masjumi tentu menjadi kesempatan bagi para umat Islam untuk bersatu dan melanjutkan perjuangan yang sempat tertunda, pasalnya kedudukan umat Islam dari segi politis tidak terlalu

⁵⁸ *Ibid.*

menguntungkan, terutama di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Sebab itulah, partai Masjumi juga disebut sebagai wadah persatuan perjuangan umat Islam Indonesia. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, partai Masjumi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan yang mencolok adalah saat organisasi islam yang bersifat lokal, mulai bergabung dalam partai Masjumi, sehingga jumlah keanggotaan partai Masjumi terus bertambah. Selain jumlah keanggotaan yang terus bertambah, relasi yang dimiliki partai Masjumi semakin meluas. Tak heran jika partai Masjumi mampu memiliki jumlah suara yang cukup banyak untuk sebuah partai politik.

Tidak hanya memperluas kesempatan bagi organisasi-organisasi Islam untuk bergabung ke partai Masjumi, partai Masjumi juga mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) tepat pada tanggal 26 Oktober 1946. Dengan berdirinya STII, partai Masjumi bertujuan untuk merekrut anggota Masjumi dari kalangan petani. Meski memiliki sebuah tujuan politik, namun partai Masjumi juga turut membela dan memperjuangkan setiap hak petani. Selain STII, partai Masjumi juga mendirikan anak organisasi yakni Serikat Dagang Islam Indonesia (SDII) yang juga berdiri di akhir tahun 1946, kemudian partai Masjumi kembali membentuk anak organisasi yang dikhususkan untuk para wanita.

Ketika partai Masjumi tengah sibuk mendirikan anak organisasi agar dapat saling membantu, terutama dibagian perolehan jumlah suara bagi partai dan perjuangan hak sebagian besar masyarakat Indonesia, partai

Masjumi menyadari bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) telah berhasil menyusun kekuatan politik dengan dukungan dari kaum buruh dan juga tani. Dukungan ini tentu menambah jumlah suara pendukung PKI, ditambah kaum buruh menjadi kunci utama dalam proses produksi makanan dan barang. Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai strategi untuk merebut posisi pemerintahan yang anti-komunis. Perebutan posisi pemerintahan yang dapat dilakukan oleh kaum buruh pada saat itu tak lain adalah pemogokan nasional. Melihat situasi ini, tentu partai Masjumi merasa bahwa partainya perlu memiliki serikat buruh yang ideologinya didasarkan pada Islam. Pembentukan serikat buruh ini juga dimaksudkan untuk menyaingi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang memiliki kedudukannya cukup kuat dan berdiri dibawah naungan PKI.

Setahun setelah pendirian Sarekat Tani Islam Indonesia (STII), November 1947 atas Prakarsa Ketua Masjumi, Soekiman, didirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII).⁵⁹ Usulan ini disinggung dalam konferensi yang membahas tentang perlunya mendirikan suatu serikat buruh yang berbasas Islam. Prakarsa ini pun tentu menjadi topik yang harus dibahas dalam konferensi tersebut. Sebab, SBII merupakan organisasi buruh yang nantinya akan menggunakan dasar-dasar Islam sebagai ideologi. Tentu, SBII menjadi serikat buruh yang berbeda dari serikat buruh yang

⁵⁹ M. Sukron, dkk. *Serikat Buruh Islam Indonesia di Surabaya Tahun 1948-1960*. (Verleden: Jurnal Kesejarahan. Vol. 10, No. 1, Juni 2017) hal. 14-15

sebelumnya telah berdiri. Dapat dikatakan bahwa, ideologi SBII merupakan wujud dari ideologi partai induknya yaitu Masjumi.

Selain hal tersebut, terdapat pembahasan lain yang juga dibahas dalam konferensi. Konferensi itu menyimpulkan bahwa:

1. Tidak ada masalah perburuhan khusus dalam Islam, setiap masalah yang berhubungan dengan perburuhan oleh karenanya mesti diselesaikan sebagai suatu masalah yang bersifat manusiawi.
2. Menurut Islam terdapat beberapa masalah yang sangat erat mempengaruhi kaum buruh (pekerja), dan terdapat tanda-tanda di dalam ajaran juga tradisi Nabi Muhammad yang menunjukkan bagaimana persoalan perburuhan mesti diselesaikan.
3. Pada umumnya, Islam tidak berbicara tentang kepentingan-kepentingan istimewa dari kelompok-kelompok rakyat khusus. Islam melihat lebih jauh pada perkembangan sosial rakyat dalam suatu periode waktu khusus, dan dalam kasus-kasus seperti itu bagi Islam tersedia sekumpulan petunjuk yang dapat diterapkan. Demikianlah bahwa tidak merupakan suatu kesalahan jika suatu serikat buruh khusus didirikan berdasarkan Islam.⁶⁰

⁶⁰ Satrio Kuncoro, Agfa Aditya. *Dinamika Gerakan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) di Surakarta Tahun 1950-1960*. (Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2019) hal. 60

Konferensi terkait pembentukan SBII ini pun berlanjut di tahun berikutnya, yakni 1948. Konferensi ini tentu dihadiri oleh para tokoh dari partai Masjumi, juga tokoh dari serikat buruh. Setelah beberapa hal dibahas dalam konferensi sebelumnya, akhirnya para tamu undangan yang mendatangi konferensi tersebut sepakat bahwa, tidak terdapat ketentuan apapun di dalam Al-Qur'an yang membahas permasalahan terkait buruh. Akan tetapi, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar dari pembentukan SBII, seperti surat Ali-imron ayat 103 dan surat at-Takastur ayat 1-2. Selain hal tersebut terdapat pula tradisi Nabi Muhammad yang dapat dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan terkait kaum pekerja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam tidak terdapat larangan untuk mendirikan suatu serikat buruh.

Setelah pembahasan ini mencapai kata mufakat, SBII pun terbentuk pada tanggal 27 November 1948. Kembali lagi ditegaskan bahwa setiap anggota partai Masjumi memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya gerakan serikat buruh dan seberapa besar pengaruh yang dapat diberikan terhadap partai. SBII berafiliasi dengan Masjumi sebagai yang dinamakan anggota istimewa.⁶¹ SBII mempunyai prinsip bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik.⁶² Apabila serikat buruh berhasil memperjuangkan setiap tuntutan, maka buruh yang bersangkutanlah yang akan langsung merasakan. Seperti misalnya, serikat buruh sedang

⁶¹ Tedjasukmana, Iskandar. *Op. cit* hal. 46

⁶² Soegiri DS, dkk. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. (Hasta Mitra. 2005) hal. 30

memperjuangkan tentang kenaikan upah dan hadiah tunjangan. Jika hal serikat buruh berhasil menaikkan upah dan membuat kesepakatan dengan para majikan terkait hadiah tunjangan, maka para buruh yang akan merasakan langsung tanpa diperantarai oleh SBII. SBII sendiri menegaskan bahwa persatuan menjadi hal utama dan penting untuk tetap dijaga, selain hal itu, SBII juga melarang kaum buruh bermusuhan dengan majikannya, sebab hal ini akan mempersulit SBII dalam memperjuangkan hak para buruh. Untuk itu pengurus besar SBII mengusahakan pertolongan bagi kaum buruh, baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya.⁶³ Hal ini bertujuan agar setiap tempat kerja buruh dapat terjalin keharmonisan.

⁶³ *Ibid.*

BAB III

Masjumi, Islam dan Buruh

A. Perjalanan Kerja Sama Partai Masjumi dengan SBII

Tahun 1950 menjadi kesempatan bagi para partai politik untuk memperkuat kekuatan politik masing-masing. Dinamika politik ini pun kian terasa ketika ratusan organisasi serikat buruh menjalin hubungan kerja sama dengan kekuatan politik yang ada, seperti misalnya, SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia) yang bekerja sama dengan NU, SBII yang telah jelas menjalin kerja sama dengan Partai Masjumi dan SOBSI yang menjadi pendukung dari PKI. PKI dengan cepat menyesuaikan diri dengan memanfaatkan momentum yang ada. Sebagai partai politik, tentu PKI berupaya untuk memaksimalkan kesempatan ini agar dapat memperoleh dukungan dari para buruh dan juga tani. Di tengah upaya yang dilakukan oleh PKI melalui SOBSI, SOBSI pun dapat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 1950-an. SOBSI berhasil menjadi suatu gerakan atau serikat buruh terbesar pada saat itu. Beranggotakan 2,5 juta orang, dari 34 serikat buruh.⁶⁴ Meski perkembangan SOBSI membawa pengaruh yang cukup baik bagi PKI, pada kenyataannya SOBSI menyatakan, bahwa mereka merupakan organisasi buruh yang berdiri sendiri. Pernyataan tersebut tentu memunculkan berbagai pendapat. Berbagai sangkalan dari masing-masing anggota SOBSI dan juga PKI

⁶⁴ *Ibid*, hal. 27

terkait hubungan kerja sama mereka pun terus bermunculan. Akan tetapi, setiap alasan yang disebutkan oleh masing-masing anggota SOBSI dan PKI dinilai cukup lemah karena pendapat tersebut dapat ditafsirkan dengan beberapa sudut pandang. Seperti misalnya, perwakilan anggota SOBSI yang menyatakan bahwa SOBSI merupakan organisasi yang non-partai. Non-partai disini dapat disimpulkan sebagai suatu organisasi yang secara mutlak netral terhadap seluruh partai politik dan dapat ditafsirkan pula bahwa SOBSI bukanlah bagian dari organisasi politik yang sudah semestinya tidak akan berperilaku seperti sebuah partai politik.

Terlepas dari bentuk hubungan yang dijalin oleh SOBSI dan PKI, SOBSI mampu memberikan sebuah perkembangan yang signifikan melalui banyaknya jumlah anggota yang mereka miliki. Jumlah anggota SOBSI yang terdiri dari golongan tani dan juga buruh jelas menjadi persiapan yang cukup meyakinkan bagi PKI, sebab PKI telah mutlak mendapatkan dukungan yang akan membantu meraih kemenangan dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 1955. Keberhasilan PKI dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 1955 pun menjadi sorotan dari setiap partai politik. Akibatnya banyak dari mereka yang mencoba menempuh jalan yang sama dengan tujuan menandingi keberhasilan kerja sama dari SOBSI dan PKI. Partai Masjumi menjadi salah satu partai yang segera menyadari ketertinggalan persiapan mereka dalam menghadapi pemilu tahun 1955. Pada situasi ini, Partai Masjumi menyadari betapa besar

pengaruh dan kesempatan yang akan diterima, ketika pola dari SOBSI dan PKI juga diterapkan dalam strategi Partai Masjumi menuju pemilu 1955.

Sejak pelaksanaan Muktamar Umat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945, Masjumi resmi menjadi sebuah partai Islam yang telah mendapatkan dukungan dari organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah dan NU. Dukungan dari kedua organisasi ini tentu dapat dilihat dari keterlibatan anggotanya dalam mempersiapkan pelaksanaan Muktamar Umat Islam. Tak hanya membantu mempersiapkan muktamar, kedua organisasi Islam ini juga bergabung dan menjadi bagian dari Partai Masjumi. Bergabungnya dua organisasi ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan Masjumi. Selain mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah dan juga NU, Masjumi juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi Islam yang bersifat lokal, seperti Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Dengan bergabungnya keempat organisasi Islam membuat Partai Masjumi menjadi sebuah partai yang bersifat tradisional dalam bidang agama dengan tetap memiliki sisi modern atau sisi keduniawian yang akhirnya dapat memudahkan Partai Masjumi untuk menjalin kerja sama dengan kalangan modernis. Kemudian keanggotaan Partai Masjumi terus bertambah ketika Persatuan Islam (Persis), *Jami-ah al-Wasliyah* dan *al-Ittihadiyah* mulai bergabung pada tahun 1948 dan di tahun 1949-1950 Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), *al-Irsyad*, *Mathlaul Anwar* dan *Nahdatul Wathon* secara resmi menjadi anggota dari Partai Masjumi.

Organisasi-organisasi Islam yang telah bergabung dengan Partai Masjumi disebut sebagai anggota istimewa. Sebab, dalam Partai Masjumi terdapat dua jenis keanggotaan, yakni organisasi dan perorangan. Untuk anggota yang berasal dari organisasi, mereka akan menjadi anggota istimewa dimana mereka memiliki hak untuk memberikan nasehat ataupun saran yang berguna bagi perkembangan Partai Masjumi. Sedangkan untuk jenis anggota perorangan, hanya diberikan kepada seseorang yang telah berusia minimal 18 tahun atau sudah berkeluarga, tidak merangkap menjadi anggota partai lain dan setiap yang mendaftar hanya memiliki hak suara dalam proses perkembangan Partai Masjumi. Penerapan dua jenis keanggotaan dalam Partai Masjumi cukup menjadikan Partai Masjumi sebagai partai yang dapat melebarkan sayapnya hingga seluruh penjuru Nusantara. Meskipun Partai Masjumi telah berkembang dengan pesat, Partai Masjumi tetap melakukan upaya perekrutan anggota dengan cara lain. Seperti dengan mendirikan berbagai bentuk organisasi yang bersifat otonom.

26 Oktober 1946, Partai Masjumi mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII). Pendirian serikat ini bertujuan agar Partai Masjumi dapat merekrut anggota yang berasal dari kalangan Petani. Selanjutnya Partai Masjumi juga mendirikan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Dengan adanya dukungan yang berasal dari serikat-serikat yang telah dibentuk, Partai Masjumi dapat meningkatkan kuantitas anggota yang pada akhirnya memberikan pengaruh

yang cukup kuat dalam perkembangan Partai Masjumi. Hal ini dibuktikan dengan adanya cabang dan anak cabang dari Partai Masjumi yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, Partai Masjumi juga memiliki cabang di Kepulauan Kai (Irian) yang pada saat itu masih menjadi sebuah kawasan yang dipersengketakan dengan negara Belanda. Hingga tanggal 31 Desember 1950, Partai Masjumi telah memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting dan kurang lebih 10.000.000 anggota partai, tak mengherankan jika pada saat itu Partai Masjumi menyandang status partai terbesar di Indonesia. Keberhasilan yang telah diraih oleh Partai Masjumi menjadi sebuah langkah untuk mengimbangi dan juga menyaingi kerja sama yang telah terjalin antara SOBSI dan PKI. Sebagai sebuah partai politik, tentu Partai Masjumi menyadari bahwa dalam upaya untuk mengembangkan ideologi partai dibutuhkan peran dari masyarakat, buruh menjadi salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap partai politik.

Memasuki masa persiapan menuju pemilu tahun 1955, serikat-serikat buruh yang telah terbentuk dinilai memiliki kekuatan politik dan juga sosial yang mampu memberikan pengaruh yang cukup besar dibanding serikat-serikat dengan kalangan profesi tertentu. Selain itu, kalangan buruh berperan dalam proses produksi barang, kebutuhan konsumsi dan jasa di sektor-sektor vital, seperti transportasi, komunikasi dan kesehatan yang tentu dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam melawan pemerintahan. Bahkan dengan peran ini, kalangan buruh juga dapat melakukan mogok

nasional, sabotase dan dapat melancarkan aksi demo atau huru-hara di berbagai wilayah. Dari sini, jelas terlihat bagaimana hubungan antara serikat buruh dengan unsur-unsur politik. Serikat-serikat buruh menginginkan cita-cita politik, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, dengan memelihara hubungan-hubungan yang erat dengan partai-partai politik.⁶⁵ Kemudian bagi serikat buruh, politik diharapkan dapat menjadi media atau perantara yang dapat membantu untuk mewujudkan setiap hak para buruh yang masih sulit untuk terpenuhi. Harapan yang sama juga tumbuh pada Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Meski hidup dibawah naungan Partai Masjumi, SBII tetap menginginkan serikat ini menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang dilandaskan pada Islam. Keinginan ini tentu mendapatkan respon yang baik dari Partai Masjumi. Sebagai sebuah partai politik, tentu hal ini tidak menjadi suatu persoalan. Sebab, akan ada hubungan timbal balik yang diterima oleh partai.

4 Desember 1950 menjadi waktu dimana pengurus utama Partai Masjumi dan SBII mengadakan sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta. Tuan Jusuf Wibisono, Z. A. Achmad, Taufiqurrachman, Sjaried Usman, Jamaluddin Nagum dan Moh. Ali hadir sebagai perwakilan dari Partai Masjumi, sedangkan dari pihak SBII terdapat Bapak Moh. Daljono, Sjaipsuddin, Nur Jahman dan Sosrosubroto. Dalam pertemuan tersebut mereka tentu membahas bagaimana kerja sama yang nantinya akan dijalin

⁶⁵ Silaban, Rekson. *Reposisi Gerkana Buruh Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009) hal. 142

antar Partai Masjumi dengan SBII. Dalam *de Vrije Pers: ochtenbulletin* yang diterbitkan pada 6 Desember 1950, disebutkan bahwa sejak pertemuan ini dilaksanakan, Masjumi dan SBII akan saling bekerja sama memperluas kegiatan-kegiatan SBII, selanjutnya terkait kerja sama yang terjalin di bidang politik, organisasi, keuangan, informasi dan jaminan kesejahteraan anggota akan segera dipublikasikan. Setelah kerja sama terjalin, SBII yang mulanya menjadi bagian dari Partai Masjumi pun memisahkan diri dan menjadi sebuah organisasi tersendiri. Meski begitu, SBII tetap berstatus sebagai anak organisasi dari Partai Masjumi.

Pemisahan ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan pada saat itu buruh dinilai memiliki potensi yang sangat besar jika upaya perjuangan haknya lebih difokuskan dan dilakukan oleh suatu organisasi buruh yang memiliki kewenangan luas tanpa campur tangan dari sebuah partai. Dalam hal ini, menentukan strategi yang tepat menjadi penting bagi Partai Masjumi. Sebab dalam situasi ini, Partai Masjumi harus mampu bersaing dengan PKI yang memiliki banyak pengalaman dalam memimpin para buruh. Dalam musyawarah daerah Masjumi Jawa Barat yang diadakan di Sukabumi pada tanggal 31 Mei sampai dengan 3 Juni diputuskan antara lain untuk SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi buruh dan STII (Serikat Tani Islam Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi petani dan sudah menjadi kewajiban seluruh buruh dan petani

muslim di Indonesia untuk bergabung dalam organisasi tersebut.⁶⁶ Selanjutnya setiap anggota Masjumi dan Muslimat yang tinggal di wilayah Jawa Barat telah diperintahkan untuk bergabung dengan organisasi yang ada sesuai dengan kelas buruh atau tani. Selama konferensi, “diputuskan untuk menginstruksikan semua anggota biasa, bahwa pendukung mereka tidak boleh bergaul dengan partai politik selain Masjumi.⁶⁷

Meski telah diputuskan jika buruh muslim wajib menjadi bagian dari SBII. SBII juga mempersilakan buruh-buruh yang bukan beragama Islam turut serta menjadi bagian dari SBII. Iskandar menerangkan selanjutnya bahwa orang-orang yang bukan beragama Islam diperkenankan menjadi anggota SBII pula.⁶⁸ Kemudian diharapkan bagi buruh-buruh non muslim yang telah menjadi anggota SBII dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar dari SBII dalam memperjuangkan hak buruh. Aturan ini jelas berbeda dengan prinsip yang telah diterapkan oleh SOBSI, sebab SBII tidak menghendaki perjuangan hak buruh didasarkan pada kelas-kelas masyarakat. Justru perbedaan kelas inilah yang dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan hak buruh.

Setelah resmi memisahkan diri, SBII mengadakan kongres keempat pada 23-26 Desember 1951. Kongres yang diselenggarakan di Jakarta ini dimaksudkan untuk memilih kepengurusan baru. Ketuanya adalah Bapak

⁶⁶ *Masjumi-leden dienen zich bij vakbond aan te sluiten. Algemeen Indisch dagblad: de Preamerbode.* 5 Juni 1951

⁶⁷ *Isl. Groepsoorganisaties. De nieuwsgier.* 11 Juni 1951

⁶⁸ Serikat buruh Islam bekerdja dengan diam-diam, Djuga bukan beragama Islam dpt djadi anggota. *Harian Abadi.* 4 Juli 1951.

Moh. Daljono dengan dibantu oleh tiga wakil ketua yaitu Bapak Jusuf Wibisono, Dr. Abp Hanifah dan Bapak Muchtar Gozali; selain itu juga telah dibentuk badan perencanaan yang terdiri dari Dr. Sukiman Wijosandjojo, Moh. Natsir, Bapak Moh. Roem, Bapak Sjafruddin Prawirangeara, Bapak Kasman Singodimedjo, K. Taufiqurachman dan Tengku Daud Bireueh.⁶⁹ SBII saat ini terbagi menjadi 7 seksi, yaitu seksi dalam negeri, lalu lintas, kepelabuhan, perindustrian, perusahaan, pertambangan dan umum.⁷⁰ Dalam kongres pun SBII menyampaikan bahwa mereka akan mendesak pihak pemerintahan agar dapat memperbanyak tenaga kerja. Desakan ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menghilangkan pengangguran, termasuk implementasi rencana industrialisasi dan transmigrasi. Selain mendesak pemerintah, Menteri Perburuhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa menyelesaikan soal politik perburuhan juga merupakan tugas dari serikat buruh sendiri. Kaum buruh yang kenyataannya sekarang ini ada dalam penderitaan penghidupan yang terpengaruh oleh dan propaganda yang muluk-muluk.⁷¹ Mengenal soal organisasi dikatakan bahwa akan diusahakan perlengkapan susunan pengurus konsultat, komiasariat-komisariat dan kring-kring.⁷² Dan untuk soal pendidikan buruh, ditentukan agar mengadakan kursus kader serta mengusahakan guru-guru agama yang setiap waktu siap sedia untuk

⁶⁹ *Besluiten van SBII-Congres. Het nieuwsblad voor Sumatra.* 29 Desember 1951

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Kongres Serikat Buruh Islam Indonesia Berakhir, Merdeka.* 28 Desember 1951

⁷² Muktamar Serikat Buruh Islam Indonesia “ Resepsi Penutup Muktamar diadakan Semalam”. *Harian Abadi.* 27 Desember 1951

dikirimkan dan atau diyempatkan di pusat perburuhan. Menteri Perburuhan pun menganjurkan kepada pimpinan SBII agar dapat memperkuat organisasi, mengadakan pendisiplinan serta kesadaran di setiap anggota.

Selama kongres ini berlangsung, tidak sedikit pun pihak SBII memperlihatkan sisi kemewahan dan pemborosan uang. Hal ini juga disampaikan dalam pidato Moh. Natsir. Kesederhanaan ini dianggap sebagai cara untuk menunjukkan bahwa SBII dapat membatasi diri dari hal-hal yang hakiki dan tidak mati tertipu, tetapi sebagai serikat buruh, SBII tetap mengusahakan perjuangan dengan penuh kesederhanaan dengan menargetkan pokok pangkal permasalahan buruh. Kongres SBII yang dilangsungkan dalam 3 hari itu pada akhirnya telah mencapai putusan kongres. Putusan ini diakhiri dengan menyusun badan pemikir, terdiri dari Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Moh. Natsir, Mr. Moh. Roem, Mr. Syafruddin P. Mr. Kasman S. K. Taufikurrachaman, dan beberapa lainnya. Pengurus besar diketuai oleh Mr. Moh. Daljono, Mr. Jusuf Wibisono. Dr. Abuhahanifah dan Muchtar Gozali, masing-masing sebagai ketua I, II, dan II, Sekdjen.⁷³ Kemudian, tiap anggota yang menghadiri kongres SBII sepakat bahwa bulan Desember 1952 akan diadakan kembali kongres kelima yang akan diadakan di Medan.

⁷³ *Ibid.*

B. Dasar Ideologi Masjumi dan SBII

Upah kecil menjadi suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan buruh. Pemerintah dan juga serikat buruh berusaha mengupayakan agar paling tidak, upah yang diterima oleh buruh sesuai dengan hasil kerja mereka. Akan tetapi, permasalahan upah ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu atau dua langkah saja. Butuh banyak kerja sama yang terjalin dan butuh kesabaran agar kesejahteraan dapat diberikan kepada para buruh. Selain permasalahan upah, pembahasan buruh juga berkesinambungan dengan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja biasanya dilakukan oleh para buruh sebagai wujud protes akan tuntutan yang tidak lekas terpenuhi. Meski aksi dari para buruh ini bisa disebut sebagai upaya mereka memperjuangkan hak, namun terkadang para buruh lupa bahwa aksi mogok ini akan berakhir dengan sia-sia. Karena pada dasarnya nasib buruh akan mengalami perubahan ketika terjadi perbaikan perekonomian secara menyeluruh.

1950 menjadi tahun dimana banyak buruh yang melakukan aksi mogok kerja massal. Salah satu mogok kerja yang menyita perhatian di tahun 1950 adalah mogok kerja di Sumatera Timur dan Tanjung Perak. Para buruh melancarkan aksi ini agar mereka dapat merasakan kenaikan upah dan menerima lebih banyak pengiriman beras, terutama di wilayah Sumatera Timur. Pemogokan tersebut berhasil menaikkan gaji kaum buruh sebesar 50%.⁷⁴ Hasil ini tentu menjadi kabar baik bagi para buruh, akan tetapi para buruh dan juga masyarakat Sumatera Timur harus menerima dampak

⁷⁴ Suwasono, Puji. *Op. cit.* hal. 45

negatif dari aksi mogok masal ini. Pasalnya perekonomian masyarakat Sumatera Timur harus terganggu sebab aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Medan tidak dapat dilakukan seperti biasanya.

Aktivitas perekonomian yang terganggu ini membuat harga beras dan barang lainnya melonjak tinggi. Akibatnya kenaikan upah yang diterima para buruh setelah melakukan aksi mogok kerja masal menjadi suatu hal yang sia-sia. Di bulan Januari tahun 1950 harga barang di wilayah Sumatera Timur masih sama dengan harga barang yang berada di wilayah Jakarta. Namun setelah terganggunya aktivitas perekonomian di Sumatera Timur, barang-barang memiliki harga yang jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Melonjaknya harga barang ini juga disebabkan oleh kenaikan upah buruh yang tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah barang di pasar. Bahkan dalam situasi ini, pemasukan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sangat jauh berbeda dibanding biasanya.

Kasus sejenis ini juga terjadi di wilayah lain, seperti misalnya aksi mogok kerja masal yang dilakukan kaum buruh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aksi mogok yang dilakukan para buruh sebelum Idul Fitri ini menghambat pembongkaran muatan bahan tekstil. Situasi ini jelas menyulitkan para penjual bahan tekstil, sebab menjelang hari raya kebutuhan akan bahan tekstil mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan adanya hambatan dalam proses pembongkaran bahan tekstil, bahan tekstil pun menjadi sulit untuk didapatkan. Kelangkaan bahan tekstil ini pun

menyebabkan kenaikan harga yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat setempat.

Banyaknya aksi mogok masal yang dilakukan oleh para buruh pun akhirnya mendapatkan respon dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah merasa bahwa aksi mogok yang dilakukan oleh para buruh hanya akan memperburuk roda perekonomian nasional. Untuk itu, melalui Menteri Pertahanan, Mohamad Natsir, disampaikan bahwa akan dikeluarkan peraturan baru yang menjelaskan terkait perusahaan vital, jawatan-jawatan dan juga badan-badan yang ditunjuk pemerintah, agar tidak menghentikan aktivitas perekonomian apapun hambatannya. Hal ini pun dijelaskan dalam pasal 2 peraturan militer yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan pemogokan, atau memerintahkan, menganjurkan, mengajak, memaksa atau memancing supaya diadakan pemogokan atau penutupan di dalam perusahaan, jawatan atau badan vital, dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau denda sepuluh ribu rupiah.”⁷⁵

Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1951 menjelaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi antara kaum buruh dengan majikan dengan konteks kenaikan upah. Dalam hal ini pemerintah hanya akan menghalangi aksi mogok kerja yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kemudian pemerintah juga akan mencampuri permasalahan buruh dan juga majikan, oleh sebabnya buruh

⁷⁵ Suwasono, Puji. *Op. cit.* hal. 47

dan juga majikan harus menaati keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika terjadi pertikaian antara buruh dan juga majikan, kelancaran produksi atau aktivitas perekonomian tetap harus berjalan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berusaha untuk memperjuangkan hak buruh dengan tetap mempertahankan dan memperbaiki roda perekonomian nasional. Selain hal tersebut, pemerintahan juga berusaha menciptakan ketertiban dan juga keamanan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi pemulihan.

Sebagai serikat buruh, SBII sangat mendukung larangan pemerintah tentang aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh. Dukungan ini tentu bukan tanpa sebab, SBII menilai jika peraturan ini bukan wujud pemerintah untuk membatasi para buruh memperjuangkan haknya, melainkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan pertikaian buruh dan juga majikan. Upaya ini tak lain untuk menghindarkan kerugian yang nantinya akan diterima oleh masyarakat Indonesia, terkhusus golongan buruh. Selain itu, SBII juga beranggapan bahwa aksi mogok masal yang dilakukan oleh para buruh justru menjadi kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa pihak tertentu agar muncul rasa cemas dan ragu dalam mewujudkan cita-cita politik dari suatu kelompok tertentu yang bertentangan dengan impian dari kamu buruh.

Namun meski SBII menyatakan bahwa secara penuh mendukung larangan pemerintah tentang aksi mogok kerja, SBII tetap mengeluarkan

pernyataan tentang permasalahan ini. Bagi SBII, larangan pemerintah tentang aksi mogok kerja ini bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh. Sebab, larangan mogok ini akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah menggunakan haknya dengan tidak baik melalui peraturan darurat ini. Memang jika ditelisik lebih jauh, larangan mogok ini mudah untuk dikeluarkan, pun banyak hal dapat dikatakan lebih baik dibanding saat aksi mogok dijalankan, terutama di bidang perekonomian. Akan tetapi, lebih demokratis rasanya, jikalau pemerintah mengadakan larangan itu dengan peraturan pemerintah atau undang-undang darurat yang kemudian harus disahkan oleh DPR, karena ini mengenai hak asasi yang dijamin dalam undang-undang dasar sementara.⁷⁶

Tepat pada tanggal 7 Maret 1951, Jusuf Wibisono menyampaikan sebuah pernyataan kepada pihak pemerintahan. Saya telah menerima laporan dari kabupaten Situbondo (Besuki) yang menyatakan sebagai berikut: sekitar akhir Januari, ketua lingkaran Serikat Butuh Islam Indonesia di Pandji, Sur Marsu dibunuh secara brutal.⁷⁷ Dia digantung dari katrol di dalam sumur, dengan kaki terikat. H. Moechtar ketua lingkaran SBII Asoenbagus juga diculik sejak 10 Februari dan masih belum kembali hingga saat ini. Tn. Jusuf Wibisono mencontohkan aksi mogok yang dilakukan di Aseonbagus oleh serikat pekerja di Sarekat Buruh Gula. SBII menentang

⁷⁶ Hak Mogok hanya Alat Perjuangan untuk Memperbaiki Nasib Buruh. *Harian Abadi*. 13 Maret 1951

⁷⁷ *Veiligheid niet Stakende Arbeiders, Indische Courant Voor Nederland*. 7 Maret 1951

pemogokan ini dan terus bekerja.⁷⁸ Menurut Jusuf Wibisono, bisa jadi permasalahan ini diakibatkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak korban dan pelaku, namun terlepas dari hal itu Jusuf Wibisono menanyakan kembali kepada pihak yang berwenang di Situbondo, kemudian Jusuf Wibisono juga menanyakan kepada pihak pemerintah tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjamin keselamatan bagi para pekerja yang tidak mau ikut mogok karena memiliki pendapat yang berbeda terkait aksi mogok masal.

Kasus pembunuhan tersebut akhirnya menjadi tamparan bagi seluruh pihak yang terkait dalam aksi mogok masal yang dilakukan oleh buruh. Sebab, kerugian yang diterima tidak hanya berimbas pada roda perekonomian nasional. Tak mengherankan jika aksi mogok kerja yang dinilai dapat menjadi upaya untuk memperjuangkan hak buruh menjadi suatu hal yang sudah semestinya dilarang. Disinilah kerja sama antara buruh, majikan, serikat buruh dan juga pemerintah harus terjalin dengan baik. Meski hal-hal tak terduga masih sulit untuk dihindari, tapi kerja sama yang terjalin akan menjadi sebuah jaminan bahwa masing-masing pihak telah mengupayakan yang terbaik untuk menghindari kerugian yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Serikat Buruh Islam Indonesia telah menentukan posisinya dalam kemungkinan pemogokan, mereka pun akhirnya berupaya untuk

⁷⁸ *Ibid.*

mengambil sikap dari permasalahan-permasalahan terkait pemogokan kerja yang dapat diselenggarakan sehubungan dengan klaim manfaat Lebaran.

SBII berpendapat bahwa:

1. Setiap klaim manfaat Lebaran harus diperiksa sendiri berdasarkan situasi perusahaan yang bersangkutan;

2. Jika ternyata persyaratan tersebut dibenarkan, maka SBII dukungan janji; yang dianggap adil adalah jika tuntutan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan keputusan P4 Pusat tahun 1952 dan paling banyak sebesar yang dapat disediakan oleh majikan;

3. Jika persyaratan tersebut memang tidak dapat dipenuhi oleh pemberi kerja yang bersangkutan, maka SBII tidak mendukung persyaratan tersebut;

4. Karena suatu jabatan, baik yang mendukung maupun yang menentang pemogokan akibat tuntutan tunjangan Lebaran, baik dari pemberi kerja maupun karyawan, yang mengambil posisi berbeda dari SBII dapat menimbulkan kontradiksi, organisasi menghimbau para anggotanya untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, agar kebijakan organisasi dapat dilaksanakan dengan lancar;

5. Setiap tindakan harus diberitahukan pada waktu yang tepat kepada badan-badan pemerintah agar perlindungan hukum dapat diperoleh.⁷⁹

⁷⁹ *Islamietische Arbeiders niet Voor Staken Zonder Meer. Indische Courant Voor Nederland.* 3 Juni 1953

Bagi SBII, pemogokan merupakan sebuah media untuk memperluas pengaruh komunis. Sedangkan menurut komunis sendiri, pemogokan merupakan suatu kesempatan yang jika dilakukan terus-menerus akan menimbulkan dampak yang nantinya akan mengacaukan roda perekonomian. Jika roda perekonomian mengalami kekacauan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan masyarakat akan kehilangan stabilitas. Selain itu masyarakat juga akan menjalani kehidupan dengan banyaknya penderitaan yang dirasakan. Tentu, penderitaan ini disebabkan oleh rusaknya roda perekonomian menjadi sebuah kesempatan untuk komunisme melebarkan sayapnya.

Sejak SBII resmi menjadi serikat yang memperjuangkan hak para buruh, SBII selalu bertolak belakang dengan serikat-serikat yang condong pada komunisme. Hal ini tidak menjadi suatu hal yang baru, mengingat SBII merupakan anak organisasi dari Partai Masjumi. Partai Masjumi sendiri merupakan partai yang menolak komunisme dan juga kapitalisme. Bagi Partai Masjumi, komunisme dan kapitalisme merupakan paham kebendaan yang lebih mengutamakan harta dibanding manusia, dan oleh sifat serta tabiatnya menguatkan asas untuk memperebutkan hidup, paham ini pun juga meletakkan kekuatan jauh di atas kebenaran. Dalam tinjauan Islam, menurut Sjafruddin “Bukanlah komunisme yang akan menang, juga bukan kapitalisme, tapi dalam pergolakan paham dan ideologi di masa sekarang ini akhirnya Islamlah yang akan tampil ke muka dan bertindak sebagai juru

pisah”.⁸⁰ Alasannya: *Pertama*, karena ajaran-ajaran dan sifat-sifat Islam, *Kedua*, berdasarkan sejarah Islam.⁸¹

Sebagai partai yang bertolak belakang dengan komunisme, Partai Masjumi menyikapi komunisme dengan mengeluarkan fatwa hukum Islam yang diputuskan dalam Mukhtamar VII Masjumi yang dilaksanakan pada 3-7 Desember 1954 di Surabaya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa komunisme dalam hukum Islam merupakan kufur, bagi seseorang yang menganut komunisme dengan sadar dan menyakini bahwa paham komunisme adalah benar maka hukumnya adalah kafir. Jika seseorang menyakini paham dan atau mengikuti organisasi komunisme tanpa memiliki dasar pengetahuan dan keyakinan pada ajaran, falsafah, tujuan serta cara-cara perjuangan komunis maka hukumnya sesat. Fatwa ini didasarkan pada kenyataan tentang komunisme yang bertentangan dengan Islam. Dari segi pengertian, komunisme merupakan falsafah yang berdasar kepada materialism-historis atau paham kebendaan yang didasarkan pada sejarah. Jelas hal ini bertentangan dengan Islam sebab dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa yang menjadikan dan juga memberikan segala sesuatu, baik yang berwujud kerohanian atau kebendaan hanyalah Allah. Penjelasan ini pun terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an, seperti:

وَوَلَدَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁸⁰ Nuri, Wasul. *Perserteruan Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia 194-1960*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Adab. 2008). Hal 72

⁸¹ *Ibid.*

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (Q. S. al-Jasiyah Ayat 22)

Selain berdasar kepada paham materialism-historis, komunisme juga mengingkari adanya Tuhan (*atheism*). Bagi orang-orang yang meyakini dan menerapkan konsep komunisme dalam kehidupannya, mereka akan menanamkan prinsip ke dalam diri mereka masing-masing bahwa pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan merupakan suatu hal yang sah-sah saja apabila dilakukan. Bahkan mereka tak segan untuk memperjuangkan impian mereka dengan sistem diktator dan proletar.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ طَوْلٌ لَّا أَنتَ فَطَأَّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (Q.S Ali 'Imran Ayat 159)

Arah perjuangan sebuah partai politik dapat terlihat dari ideologi yang mereka gunakan. Hal ini pun berlaku bagi anak organisasinya, seperti

Partai Masjumi dengan SBII. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh, umumnya strategi yang diterapkan oleh SBII tidak jauh berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh serikat lain, akan tetapi dalam proses pengambilan keputusan, SBII tetap mendasarkan segala sesuatunya terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Meski begitu, SBII tetap menjadi sebuah serikat buruh yang selalu siap bekerja sama dengan serikat-serikat buruh lainnya, dengan syarat, serikat manapun yang ingin bekerja sama dengan SBII harus memahami bahwa politik yang diterapkan SBII merupakan politik yang juga dijalankan oleh Partai Masjumi. Prinsip yang diterapkan SBII ini membawa mereka lebih dekat dengan serikat-serikat buruh lokal yang berbasis agama, tak jarang SBII juga menjalin kerja sama dengan serikat buruh yang berhaluan pada sosial demokrat. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki keselerasan dalam penerapan prinsip-prinsip agama.

Terdapat 5 ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh para buruh. 5 ayat ini merupakan isi dari manifes SBII. Pasal-pasal yang ada menggunakan tafsir sebuah ayat Al-Qur'an dalam menggambarkan kondisi yang dialami oleh buruh dan apa yang harus dilakukan oleh buruh Islam.⁸² Jika diperhatikan, tafsir ini tampak kurang mempertimbangkan konteks pesan yang ada dalam setiap ayat yang digunakan. Bahkan tafsir yang digunakan dalam manifes SBII hanya

⁸² *Ibid.* hal. 69

sebatas dalam penggunaan kutipan kalimat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut adalah 5 ayat yang terdapat dalam manifes SBII:

1. Q. S al-Baqarah ayat 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan pergilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk bermusuhan kecuali pada kedzaliman. Jika dikaitkan dengan permasalahan buruh, maka dapat dikaitkan dengan kedzaliman yang telah dilakukan oleh suatu pihak terhadap kalangan masyarakat. Kedzaliman ini bisa berwujud sikap menindas orang lain ataupun pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, seperti pemerasan yang dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya ataupun pemerasan yang dilakukan para penjajah terhadap rakyat pribumi. Akan tetapi, ayat ini tidak memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk memusuhi orang yang bertindak dzalim, kita hanya diminta untuk menghindari juga memusuhi sifat-sifat dzalim yang ada pada diri manusia.

2. Q. S. at-Takatsur ayat 1-2

وَالَّذِينَ كَانُوا يُضَاهَوْنَ أُمَّةً -

وَالَّذِينَ كَانُوا يُضَاهَوْنَ أُمَّةً -

Artinya: - Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, -
sampai kamu masuk ke dalam kubur

Islam melarang umatnya untuk menimbun harta kekayaan, pada kenyataannya kebiasaan ini kerap kali dilakukan oleh kaum-kaum kapitalis atau seseorang yang memiliki modal. Penimbunan harta kekayaan ini tak lain demi memuaskan hawa nafsu seseorang. Kebiasaan ini tentu akan menyebabkan kerugian yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Bayangkan jika penimbunan ini dilakukan pada kebutuhan sehari-hari, tentu harga barang tersebut akan melonjak naik. Naiknya harga disini jelas merugikan setiap masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.

3. Q. S. Ali 'Imron ayat 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia sudah semestinya kita berpegang teguh pada agama Islam dan tetap

menjaga persatuan. Sebagai sebuah serikat, SBII selalu berupaya untuk menyerukan persatuan. Selain demi menerapkan ajaran-ajaran agama Islam, menjaga persatuan juga dapat menghimpun kekuatan yang nantinya akan membantu upaya mereka dalam menghadapi majikan-majikan yang masih bersikap sewenang-wenang terhadap para buruhnya. Majikan yang memiliki modal (kapitalis) tentu memiliki kekuatan dan juga akses terhadap sarana prasarana yang ada, akan tetapi hal tersebut bisa dihadapi dan diatasi ketika kaum buruh mulai menyatukan kekuatan dan menjaga rasa persatuan dan juga ketakwaan agar tetap dapat memperjuangkan haknya tanpa berperilaku diluar ajaran Islam.

4. Q. S. al-Anbiya ayat 105

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Artinya: *Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.*

Ayat ini dapat menggambarkan bagaimana kehidupan di zaman feodal, yang pada saat itu kaum bangsawan atau keluarga kerajaanlah yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. Lalu berbeda dengan zaman kaum kapitalis, dimana hanya kaum-kaum kapitalis yang memiliki kekuatan dan juga dapat menciptakan kesempatan untuk menguasai dan mengatur sarana

prasana yang adam seperti dalam bidang produksi, perusahaan, sumber daya alam dan lain-lain. Di zaman kapitalisme ini banyak orang yang merasa dirinya mampu, lalu bertindak sewenang-wenangnya terhadap para buruh atau masyarakat yang hidup dari upah yang mereka berikan.

5. Q. S. al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Agama menjadi suatu hal yang tidak bisa diperoleh melalui rasa keterpaksaan, untuk itu sebagai seorang umat yang beragama, kita diwajibkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama. Agama Islam telah melakukan dakwah atau menyebarkan ajaran agama-agama Islam, aktivitas ini terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Dalam agama Islam, tidak pernah sedikit pun diajarkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui kekerasan. Hal ini pun diterapkan oleh SBII,

serikat buruh ini memiliki tugas untuk memperjuangkan ideologi Islam dan menyebarkan ajaran agama Islam. Melalui serikat buruh, diharapkan SBII tetap memperjuangkan hak-hak buruh dengan tetap menggunakan ideologi Islam dan juga menyebarkan ajaran agama Islam.

BAB IV

KIPRAH SBII

A. Aksi SBII dalam Memperjuangkan Hak Buruh

1955 menjadi tahun dimana pemilihan umum pertama kali dilakukan di Indonesia. Untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia menggunakan hak suara mereka. Dalam kesempatan ini, masyarakat Indonesia berhak menentukan siapa yang pantas menjadi wakil daripada parlemen dan konstituante. Pemilihan umum dilaksanakan sebanyak dua tahap, yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 pemilihan umum untuk konstituante.⁸³ Antusias masyarakat Indonesia dapat tergambarkan, sebab pemilihan umum menjadi suatu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, terhitung sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar pemilihan umum dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa pada saat itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi maupun ancaman terhadap keamanan.⁸⁴

Pelaksanaan pemilihan umum dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kekuatan setiap partai-partai politik yang terlibat. Selain itu, pemilihan umum juga dapat menjadi sarana demokrasi yang dapat membentuk sistem

⁸³ Marwati Djoned Poesponegoro, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1984) hal. 222

⁸⁴ Friyanti, Fiska. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*. (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 2005) hal. 47

kekuasaan negara yang berkedaulatan kepada rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut menjadi suatu gambaran, bahwa rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan suatu negara. Bagi Indonesia, pemilihan umum dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kehendak asasi politik bangsa. Kehendak yang dimaksud adalah menjadi pengubah atau pendukung anggota dari suatu lembaga negara, mendapatkan dukungan dari rakyat dalam proses penentuan pemegang kekuasaan negara dan dapat mengawasi juga mengoreksi lembaga eksekutif.

Sejak tahun 1950 hingga 1955, terdapat lima kabinet yang jatuh bangun, Kabinet Mohammad Natsir dari Partai Masjumi (September 1950-April 1951), Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masjumi (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo dari PNI (Partai Nasional Indonesia) (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari PNI (Juli 1953-Juli 1955) dan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masjumi (Agustus 1955-Maret 1956). Namun pemilihan umum tahun 1955 menjadi pemilihan yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda, antara lain Kabinet Wilopo sebagai kabinet yang mempersiapkan pemilihan umum. Sedangkan Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap berperan sebagai pelaksana. Dalam upayanya, Kabinet Wilopo mempersiapkan rancangan dan mengesahkan undang-undang tentang pemilihan umum. Kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo melakukan

persiapan pelaksanaan pemilihan umum hingga tahap kampanye dan tahap pemungutan suara dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh 4 partai besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masjumi, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Pada saat itu, pemilihan umum menerapkan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Hal ini bertujuan agar pemilihan umum dapat mewujudkan keinginan rakyat yang akan menjadi dasar kekuasaan dan juga dapat membentuk konstituante yang nantinya akan menetapkan suatu undang-undang dasar bagi Indonesia. Untuk menghadapi hal ini, tentu tiap-tiap partai politik memerlukan strategi yang tepat agar dapat menunjang jumlah suara yang akan mereka peroleh. Kampanye menjadi salah satu upaya yang diterapkan oleh setiap partai dalam mencari suara pendukung partai. Kampanye-kampanye mulai dilakukan dan frekuensinya meningkat setelah Panitia Pemilihan Indonesia ada tanggal 16 April 1955 mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen diadakan pada tanggal 29 September 1955.⁸⁵

Partai Masjumi menjadi salah satu partai yang terus mengupayakan banyak cara agar dapat meningkatkan jumlah pendukung untuk menghadapi pemilihan umum tahun 1955. Dengan mempertahankan ciri khas dari Partai Masjumi, partai ini mampu merumuskan citra Islam dan cita-cita kebangsaan yang dikemas secara modern, tentu hal semacam ini dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia. Partai Masjumi mulai menjalin

⁸⁵ Marwati Djoned Poesponegoro, dkk. *op.cit* hal. 219

kerja sama dengan partai-partai Islam lainnya, bahkan Partai Masjumi memiliki anak organisasi yang dapat menyokong jumlah pendukung partai. SBII menjadi salah satu anak organisasi yang turut berupaya menaikkan jumlah pendukung Partai Masjumi. Sejak tahun 1950 hingga 1955, SBII mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini pun diutarakan oleh Jusuf Wibisono saat memberikan ceramah tentang perjuangan buruh di Yogyakarta. Meski belum sebesar SOBSI dan KBSI, namun perkembangan SBII menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah pendukung Partai Masjumi.

Pembentukan SBII tentu tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, serikat buruh ini juga memiliki tugas untuk memperjuangkan hak para buruh yang pada saat itu mengalami banyak ketidakadilan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentu sebagai sebuah serikat, SBII harus memiliki atau menyusun langkah yang tepat agar dapat melakukan perjuangan secara maksimal. Dalam upayanya, mereka memiliki langkah-langkah yang jelas berbeda dengan serikat buruh pada umumnya. Sebab, SBII berideologi sama dengan Partai Masjumi. Tentu hal ini membuat upaya SBII tidak begitu dikenal oleh para buruh pada umumnya. Meski demikian, bukan berarti SBII tidak menghasilkan dampak yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh pada saat itu. Seperti misalnya, pada saat itu banyak serikat buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Bagi SBII aksi mogok kerja merupakan hal yang akan berujung pada hambatan proses produksi dan berimbas pada kelangkaan barang yang akan membuat harga

melonjak. Tentu situasi ini akan mempersulit kalangan buruh, untuk itu sebagai sebuah serikat, SBII sangat jarang melakukan aksi mogok kerja. SBII lebih memfokuskan diri pada proses pendekatan dengan berasas kekeluargaan baik terhadap pelaku usaha ataupun pengampu kebijakan jika pendekatan terhadap majikan gagal dilakukan.

Meskipun SBII beranggapan bahwa aksi mogok kerja dapat menyebabkan rusaknya aktivitas ekonomi akibat kelangkaan barang, dalam satu waktu SBII juga akan melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini tentu dilakukan jika terdapat suatu permasalahan yang mendesak, sehingga mengharuskan SBII turut melancarkan aksi mogok kerja. Seperti Federasi Serikat Pekerja Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 1955. Dalam konferensi darurat yang diadakan di Bandung ini, KBSI berusaha untuk mencari jalan keluar dari situasi yang dialami oleh para buruh atau pekerja. KBSI telah membentuk panitia aksi yang bertugas untuk mengkaji gaji pekerja. Dalam situasi ini, KBSI merasa bahwa aksi mogok kerja perlu untuk dilakukan. Tindakan oleh KBSI akan melibatkan sekitar 500.000 orang berpartisipasi, menurut manajemen pusat, juga bapak Jusuf Wibisono yang merupakan ketua umum dari SBII.⁸⁶ Jusuf Wibisono menyatakan kepada Keng Po, bahwa SBII sepenuhnya setuju dengan keputusan dari KBSI. SBII akan dikirimkan pada bulan Februari atau Maret menyelenggarakan kongres yang antara lain akan membahas kerja sama dengan KBSI. Menurut bapak Jusuf, tindakan yang diambil oleh SBII akan

⁸⁶ *KBSI en SBII willen staken. Nieuwsgier: Ochtendblad voor Indonesie.* 17 Januari 1955

menghasilkan sekitar 180.000 pria berpartisipasi.⁸⁷ Kerja sama ini tentu membantah tuduhan terkait SBII yang dianggap sebagai serikat buruh yang anti mogok dan terlalu membela kepentingan para pengusaha atau majikan. Jusuf Wibisono mengatakan bahwa SBII tetap akan melakukan aksi mogok kerja ketika tuntutan terkait hak-hak buruh tidak direspon atau ditolak oleh majikan.

Selain aksi mogok kerja yang dilakukan bersama dengan KBSI, SBII juga melakukan beberapa aksi lainnya pada tahun 1955. Pada bulan Februari 1955, sekitar 1500 buruh pelabuhan dan *remailing* anggota SBII Lampung Selatan menganggur. Menganggurnya para buruh disebabkan karena terdapat larangan *export slabs* (lempengan karet), melihat situasi ini membuat SBII segera bertindak dengan memberikan tuntutan kepada pemerintah, agar pemerintah dapat menampung para buruh yang menganggur dan memberikan tunjangan sebesar 40% dari gaji. Kemudian di bulan Maret, SBII juga melancarkan aksi menuntut hak-hak buruh. SBII komisariat Tanjung Priuk mencoba untuk menuntut perbaikan nasib tiap anggotanya dengan meminta didirikan rumah ibadah supaya buruh yang beragam Islam dapat melaksanakan ibadahnya.

Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh SBII sebenarnya menyita banyak perhatian. Pasalnya SBII sudah dikenal sebagai serikat buruh yang jarang melakukan aksi mogok kerja, bahkan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan terkait larangan mogok kerja, SBII dengan terbuka

⁸⁷ *Ibid*

menyatakan bahwa mereka setuju dengan larangan tersebut. Menurut Jusuf Wibisono, mengenai teori “perjuangan kelas”, narasumber mengatakan bahwa Islam menentang teori tersebut, namun Islam tidak melarang buruh untuk melakukan aksi.⁸⁸ Islam tidak melarang buruh mogok kerja, jika terpaksa, menurut Wibisono.⁸⁹ Dari pernyataan Jusuf Wibisono, dapat disimpulkan bahwa SBII sangat-sangat berhati-hati dalam melaksanakan sebuah strategi atau tindakan yang berkaitan dengan buruh. Meski tetap berdasar kepada ajaran Islam, SBII juga menyadari betul kosekuensi apa yang akan diterima oleh kaum buruh jika suatu langkah diterapkan dalam upaya memperjuangkan hak mereka.

Hal ini dibuktikan dengan respon SBII terhadap permasalahan yang dibahas dalam konferensi SBII yang dilaksanakan di Tamiang, Aceh Timur. Dalam konferensi ini diputuskan bahwa SBII menuntut pengunduran diri dari Nirwonojudo, koordinator lapangan minyak di Sumatera Utara. Tentu hal ini tidak serta merta dilakukan oleh SBII, sebelumnya SBII telah menerima laporan yang berasal dari buruh tambang minyak. Laporan tersebut berisikan tentang sikap Nirwonojudo yang bertindak sewenang-wenang dan cenderung tidak memihak kaum buruh. Setelah menerima laporan ini, akhirnya SBII memberikan tuntutan kepada kabinet baru agar bersifat presidensial. Selain itu, untuk memulihkan keamanan di Aceh, SBII berharap pemerintah tidak hanya menggunakan kekerasan di sini, tetapi

⁸⁸ *Mr. Jusuf Wibisono Over de Principes van de SBII. Het Nieuwsblad voor Sumatra.* 12 Juli 1955

⁸⁹ *Mr. Jusuf Wibisono Over de Arbeidersbeweging. Indische Courant voor Nederland.* 18 Juli 1955

juga menggunakan cara-cara lain yang dapat lebih mendekati masyarakat.⁹⁰ Terkait tindakan yang akan dilakukan oleh aparaturnegara, SBII hanya berharap agar tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, melainkan juga ditujukan kepada penguasa atau majikan yang melakukan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan.

Tidak berhenti sampai disitu, SBII menyampaikan sebuah tuntutan terhadap pemerintah dalam konferensi yang diadakan di Medan. Departemen Perminyakan SBII Sumatera Utara, memutuskan untuk meminta pemerintah menyelidiki kebijakan keuangan yang diambil oleh pimpinan sumur, minyak Sumatera Utara dan penjualan logam bekas. Hal ini didasarkan dari penilaian SBII, SBII menilai kebijakan keuangan yang dilakukan oleh bapak Nirwonojudo, koordinator sumur, minyak di Sumatera Utara, menimbulkan kecurigaan.⁹¹ Kemudian SBII menyetujui penunjukan Djohan sebagai pengawas perusahaan. Penunjukan Djohan mendapatkan respon dari 200 pekerja buruh yang hadir dalam acara penyambutan Van Anondo yang berasal dari direktorat pertambangan. Buruh-buruh tersebut membawa poster yang isinya menyatakan protes atas penunjukan Djohan sebagai pengawas sumur minyak. Tahun berikutnya, bertepatan pada bulan Mei, SBII cabang Sumatera Utara mengirimkan delegasi ke Jakarta. Pengiriman delegasi ini bertujuan untuk membicarakan nasib buruh ladang minyak di Sumatera Utara dengan pemerintah. Delegasi

⁹⁰ *Conferentie an SBII in Tamiang. Het Nieuwsblad voor Sumatra. 28 Juli 1955*

⁹¹ *SBII Wil Onderzoek Beleid Inzake Oliebronnen. Java-Bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indi. 10 Oktober 1955.*

ini diberangkatkan ke Jakarta, karena Ir. Anondo dari direktorat pertambangan telah berkunjung ke ladang minyak Sumatera Utara, hingga kini belum mengambil keputusan konkrit mengenai status ladang minyak tersebut.⁹²

Kemudian, SBII beberapa kali menjalin kerja sama dengan Buruh Tekstil Bersatu dan Perkumpulan Pekerja Perkebunan. Kerja sama pertama terjalin dengan Buruh Tekstil Bersatu. Bersama Buruh Tekstil Bersatu, SBII membuat pelatihan penanganan buruh yang terkena penyakit akibat pekerjaan. Selanjutnya, kerja sama kembali terjalin ketika anggota SBII bentrok dengan pengikut PKI. Sebagian anggota SBII yang enggan mengikuti aksi perselisihan ini diharuskan bersembunyi di rumah para pengurus Buruh Tekstil Bersatu dan untuk Perkumpulan Pekerja Perkebunan, SBII menjalin kerja sama dengan membangun usaha koperasi bersama. Usaha ini dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota SBII dan Perkumpulan Pekerja Perkebunan.

SBII juga terlibat dalam permasalahan internasional yang terjadi pada tahun 1956. Pada tahun ini sedang terjadi perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Di saat yang bersamaan, Gamal Abdul Nasser mengambil sebuah kebijakan yang menjadi sorotan bagi kedua negara yang sedang bersitegang. 26 Juli 1956, Gamal Abdul Nasser mengumumkan kepada dunia bahwa Mesir akan menasionalisasi Terusan Suez. Nasionalisasi Terusan Suez adalah sebuah kebijakan yang sangat berani di

⁹² *De Noord Sumatraanse Olievelden en de SBII. A. I. D: De Preangerbode. 25 Juni 1956*

tengah kepentingan negara-negara besar terhadap peran penting Terusan Suez.⁹³ Terusan suez memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam bidang pembangunan perekonomian di banyak negara, terutama Inggris dan Perancis. Kebijakan yang dibuat oleh Gamal Abdul Nasser pun secara cepat direspon oleh negara-negara yang berkepentingan di Terusan Suez. Sir Robert Anthony Eden, perdana menteri dari Inggris menyampaikan bahwa kebijakan nasionalisasi Terusan Suez membuat negara mereka merasa terhina. Respon yang diberikan oleh Sir Robert Anthony Eden bukanlah tanpa alasan, Inggris merupakan sebuah negara yang pada saat itu sumber daya energinya berasal dari minyak. Sedangkan untuk memperoleh minyak, mereka harus melakukan perjalanan dengan melalui Terusan Suez. Tidak hanya Inggris, Perancis pun cukup geram dengan kebijakan yang dibuat oleh Gamal Abdul Nasser. Selain karena bernasib sama dengan Inggris, Perancis juga dihadapkan dengan perang kemerdekaan Aljazair sejak tahun 1952. Dalam perang ini, pemerintah Perancis menduga jika Aljazair mendapatkan bantuan dan sokongan biaya dari Mesir.

Banyaknya alasan yang membuat beberapa negara tidak menyetujui kebijakan nasionalisasi ini berujung pada perlawanan yang ditujukan pada Mesir. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh Inggris dan juga Perancis, Israel juga turut dalam rencana ini. Perlawanan ini disebut sebagai serangan tripartit, serangan ini diharapkan dapat membuat masyarakat Mesir

⁹³ Bilqis, Hikmatul. *Kebijakan Gamal Abdul Nasser tentang Nasionalisasi Terusan Suez dan Dampaknya terhadap Mesir*. (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Syarif Hidayatullah. 2019) hal. 2

menyalahkan rezim militer. Jika hal ini terjadi maka mereka akan berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Perancis pun berpendapat bahwa mereka dapat menemukan beberapa rezim politis yang nantinya dapat dan mampu memimpin pemerintahan baru dengan tetap menjunjung tinggi loyalitas yang lebih kepada penjajah. Pada kenyataannya, rezim ini tetap tidak jatuh. Di sisi lain invasi Inggris dan Perancis ke Mesir dilakukan dengan ceroboh. Pasukan-pasukan Inggris-Perancis Rebo pagi kemarin di waktu subuh telah mulai melakukan invansi (penjerangan umum) untuk menduduki daerah Suez Kanaal di wilayah Mesir.⁹⁴ Invansi yang telah dilakukan lambat laun terlihat sangat tidak terkoordinasi dan membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet menghentikan pertempuran dan menyetujui invansi yang terjadi di Mesir.

Sesuai dengan putusan SBPP, maka telah diinstruksikan kepada seluruh cabang-cabangnya di Indonesia untuk melancarkan aksi boikot terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran Inggris dan Perancis yang ada di Indonesia.⁹⁵ Sesuai dengan statementnya tanggal 3 November 56 yang mengutuk serangan Inggris, Perancis dan Israel terhadap Mesir, DPP Sarbupsi telah meneruskan instruksi Dewan Nasional SOBSI kepada ranting-rantingnya untuk mengadakan pemogokan umum selama 2 hari di perkebunan-perkebunan milik Inggris dan Perancis di seluruh Indonesia sebagai protes.⁹⁶ Pemogokan yang akan berlangsung dari mulai tanggal 7

⁹⁴ Pasukan-Pasukan Inggris-Perancis duduki Suez. *Merdeka*. 1 November 1956

⁹⁵ Buruh I'nesia bertindah thd Inggris. *Merdeka*. 3 November 1956

⁹⁶ 75.000 Buruh perkebunan mogok. *Merdeka*. 5 November 1956

dan 10 November ini meliputi 10 perkebunan terbesar di seluruh Indonesia, kecuali provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, pimpinan serikat pekerja, KBKI dan SBII, akan membahas pelaksanaan aksi protes terhadap perusahaan Inggris dan Perancis.⁹⁷ Aksi boikot atau mogok kerja ini merupakan respon dari buruh Indonesia terhadap invansi yang dilancarkan ke Mesir. Banyak kerugian yang dirasakan oleh Indonesia dan juga negara-negara lain akibat invansi ini, seperti misalnya adanya keterlambatan pengiriman barang atau bahan dari Eropa yang disebabkan kurangnya peti kemas kosong yang kembali ke wilayah mereka. Untuk mengatasi hal ini, tentu diperlukan kerja sama antar negara agar dapat mewujudkan perdamaian dunia. Tanggal 8 November 1956, bangsa Indonesia menyatakan kesediannya untuk turut serta menyelesaikan Krisis Suez dengan menempatkan pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di wilayah Mesir dalam komando UNEF. Sementara di Indonesia sendiri, berkali-kali terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh. Mogok kerja ini didasarkan pada perusahaan-perusahaan Inggris, Perancis dan juga Israel.

Aksi mogok kerja ini dilakukan oleh hampir seluruh serikat buruh yang ada, seperti misalnya SBBSI (Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia). Dari Pengurus Besar Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) didapat keterangan, bahwa serikat buruh tersebut mulai tanggal 8/11 hari ini akan terus menerus mengadakan aksi-aksinya guna menyokong perjuangan pemerintah dan rakyat Mesir terhadap agresi Inggris-Perancis-Israel, aksi

⁹⁷ *KBKI en SBII. Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerboder*. 3 November 1956

ini akan dilakukan terus sampai keamanan di Mesir pulih kembali dan pihak-pihak aggressor menarik kembali tentaranya masing-masing dari wilayah Mesir.⁹⁸ Tentunya aksi ini dilancarkan pada bank-bank Inggris yang ada di Indonesia. SBBSI juga mengatakan pada pengusaha-pengusaha nasional yang berkebangsaan Asia-Afrika supaya memutuskan hubungannya dengan *The Charter Bank of India, Australia & China* dan *The Hongkong & Shanghai Banking Corporation* di Jakarta, Surabaya dan Medan.

Aksi berikutnya dilakukan oleh buruh perkebunan milik Perancis yang terletak di bogor. Berita yang diterima oleh pihak remis di Bogor kemarin menyatakan bahwa buruh perkebunan kepunjaan Perancis yang ada di Sukabumi dan Cianjur melakukan pemogokan protes terhadap agresi Perancis dan Inggris ke Mesir.⁹⁹ Dilanjut dengan aksi boikot yang dilakukan oleh buruh pelabuhan Tanjung Priok. Hari ini di pelabuhan Tanjung Periuk, aksi-aksi pemboikotan terhadap kapal-kapal dan barang-barang Inggris-Perancis-Israel terus dilancarkan.¹⁰⁰ Pada saat itu para buruh memboikot kapal Inggris “Cletunius” dan “Telemacus”. Aksi mogok atau boikot yang dilakukan oleh seluruh buruh di Indonesia mulai berkurang ketika perwakilan dari KBKI, SOBSI, SBII dan Sarbumusi mengunjungi Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Di dalam pertemuan itu telah dibicarakan aksi-aksi kaum buruh di Indonesia beberapa waktu yang telah dilancarkan

⁹⁸ SBBSI solider. *Merdeka*. 9 November 1956

⁹⁹ Buruh Perkebunan Milik Perantjis Mogok Protes. *Merdeka*. 12 November 1956

¹⁰⁰ Pemboikotan di Priok diteruskan. *Merdeka*. 13 November 1956

terhadap perusahaan-perusahaan Inggris-Perancis di Indonesia berhubung dengan agresi Inggris-Perancis terhadap Mesir.¹⁰¹ Ketua umum KBKI dalam suatu keterangannya kemarin menerangkan, bahwa mengingat perkembangan-perkembangan di Mesir dewasa ini, maka aksi-aksi kaum buruh terhadap perusahaan-perusahaan Inggris-Perancis sudah banyak diperlunak. Dimaksud aksi-aksi ini akan dihapuskan sama sekali setelah pasukan-pasukan Inggris-Perancis benar-benar telah keluar meninggalkan wilayah Mesir, demikian ditambahkannya.¹⁰²

Setelah melunaknya permasalahan invansi yang dilakukan oleh Inggris, Perancis dan Israel, para serikat buruh, terutama SBII kembali memfokuskan diri pada masalah-masalah nasional para buruh. Seperti misalnya pada tahun 1957. Sebagai serikat buruh, SBII berupaya untuk memberi tuntutan pada pemerintah. Pernyataan dari Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) mengatakan bahwa langkah baru pemerintah di bidang keuangan dan ekonomi akan “meringankan beban pekerja”; orang pada umumnya.¹⁰³ Di tahun ini upah para pekerja kerah biru dan karyawan dinilai tidak lagi sesuai dengan naiknya harga kebutuhan hidup. SBII berpendapat bahwa, akan menjadi suatu hal yang berbahaya jika terdapat peraturan moneter dan keuangan yang baru, sebab para buruh akan melakukan aksi mogok. Untuk itu perlu diadakan perbaikan jangka pendek, maka SBII

¹⁰¹ Aksi-aksi buruh thd. Inggris Perancis diperlunak. *Merdeka*. 6 Desember 1956

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *S.B.I.I en monetaire maatregelen. Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*. 22 Juli 1957

membuat persiapan untuk tindakan besar-besaran agar mendapatkan upah yang lebih tinggi dalam batas kemungkinan.

Tindakan besar yang dilakukan oleh SBII adalah memberikan tuntutan pada pemerintah. Mengingat kesulitan yang dihadapi para pekerja saat ini, pengurus SBII telah mengindikasikan dalam surat kepada menteri tenaga kerja pada hari Kamis, antara lain, karena tingkat upah pekerja sangat rendah dibandingkan sebelum peraturan 8.E diundangkan, SBII harus menuntut kenaikan upah untuk mengatasi kesulitan tersebut.¹⁰⁴ SBII memberikan saran kepada Komisi Pemukiman Pusat dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut, diantaranya:

1. SBII berpendapat komposisi Komisi Pemukiman Pusat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keputusan yang diambil oleh Komisi Pemukiman Pusat dan Daerah selalu tidak sesuai dengan kondisi kerja. Susunan panitia-panitia tersebut terdiri dari pengurus yang sama dengan anggota.
2. SBII memandang sudah saatnya Menteri Tenaga Kerja mengambil prakarsa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1372 kepada para pengusaha. Menurut SBII, hal ini dapat memperbaiki cara kerja komite-komite tersebut dan dapat lebih

¹⁰⁴ *Islamietische Arbeidersbond Eis Verhoging van Lonen. Algemeen Indisch Dagblad: de Prenagerbode. 2 September 1957*

mencerminkan keinginan dan pemahaman baik karyawan maupun pemberi kerja.

3. Terakhir, SBII mengatakan bahwa yang terakhir harus dianggap sebagai elemen penting dalam dunia industri.¹⁰⁵

Meski SBII berupaya untuk menjalin kerja sama dan memberikan tuntutan untuk memperjuangkan hak buruh, SBII kembali menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa perjuangan SBII terhadap hak-hak buruh selalu dilandaskan pada ideologi Islam. Departemen “Serikat Buruh Islam Indonesia” (SBII) Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan dimana mereka menolak kerja sama dengan serikat buruh yang berorientasi komunis atau dengan organisasi pekerja pro-komunis.¹⁰⁶ Pernyataan tersebut disampaikan pada muktamar ulama yang dilaksanakan di Palembang. Selain itu, mereka juga sepakat agar pembagian Sumatera Utara akan mengarah pada pembentukan front anti-komunisme.

Tahun 1958, SBII kembali memberikan tuntutan melalui sidang SBII seksi gula se-Jawa. Sidang yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober hingga 1 November ini menghasilkan sebuah rumusan tuntutan SBII untuk perjanjian perburuhan bersama PKB antara SBII dan P3GI tahun 1959. Tuntutan-tuntutan yang dirumuskan oleh sidang tersebut adalah mengenai soal-soal upah uang, catu, tunjangan anak, buruh pension dan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *SBII Distancieert zich van de Communisten. Het Nieuwsblad Voor Sumatera.* 15 Oktober 1957

buruh tebang.¹⁰⁷ Tentang upah uang SBII menuntut dinaikkan upah buruh dari Rp. 4,25 menjadi Rp. 6,75. Bagi buruh yang telah berkeluarga dari Rp. 5 menjadi Rp. 7,50.¹⁰⁸ Tentang soal tjatu, dituntut supaya pembagian beras benar-benar dapat 100% dipenuhi, jangan sampai dikurangi.¹⁰⁹ Buat pembagian penggantian harga sabun dituntut penetapan harga sebatang Rp. 4,25 dan tekstil Rp. 31,52/meter.¹¹⁰ Tentang tunjangan anak dituntut minimum dari Rp. 15 menjadi Rp. 25 dan Rp. 30 menjadi Rp. 50.¹¹¹ Mengenai buruh pension SBII menuntut, supaya kepada buruh pension diberi juga tjatu dengan percuma seperti buruh biasa dan supaya secepat mungkin diaktifkan panitia pension buruh gula.¹¹² Akhirnya tentang buruh tebang, SBII menuntut, supaya harga borong menebang tebu ditambah dari Rp. 1,03/Q menjadi Rp. 1,50/Q dan supaya diadakan premi menebang pada waktu menebang malam dan hujan.¹¹³

Tuntutan selanjutnya disampaikan SBII komisariat Kota Makassar dalam rapatnya yang diadakan pada 9 November 1958. Dalam rapat ini SBII mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah pusat dan daerah. Desakan ini bertujuan agar pemerintah segera mencari jalan dan usaha untuk menurunkan harga barang-barang dan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk. Menurunkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok itu berarti

¹⁰⁷ Sidang SBII seksi gula. *Harian Abadi*. 8 November 1958

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

meringankan penderitaan buruh pada khususnya dan rakyat pada umumnya.¹¹⁴ Tuntutan ini disebabkan oleh harga barang-barang yang meningkat, peningkatan ini mencapai 100-200% dibandingkan harga tahun 1957. Tentu hal ini tetap merugikan para buruh jika pendapatan mereka masih sama seperti tahun 1957, dimana harga barang masih normal atau sesuai dengan penghasilan buruh. Sebagai serikat buruh, SBII juga mengingatkan pemerintah tentang hal ini. Jika permasalahan semacam ini tidak segera teratasi, akan dipastikan rakyat Indonesia akan hidup dalam kemelaratan.

Selain pada pemerintah SBII juga mengajukan tuntutan kenaikan upah buruh pada perusahaan *The Chartered Bank Djakarta Kota*. Pokok-pokok tuntutan SBII yang telah dimajukan itu adalah sebagai berikut:

1. Upah kaum buruh supaya dinaikkan sebanyak 10% (dari upah bruto);
2. Mengenai tunjangan keluarga untuk istri dari Rp. 30, menjadi Rp. 90, anak dari Rp. 12,50 menjadi Rp.30 seorang dn untuk jumlah maximal;
3. Mengenai jaminan sosial SBII menghendaki agar jaminan pengobatan sepenuhnya yang diperlukan bagi kaum buruh dan keluarganya yang menderita sakit menjadi tanggungan pihak Pengusaha dan selama buruh-buruh itu sakit supaya mendapat

¹¹⁴ Pernyataan SBII Komisariat Kota Besar Makassar. *Harian Abadi*. 17 November 1958

upah penuh. Begitu juga bagi istri-istri buruh yang melahirkan supaya diberikan tunjangan sebanyak Rp.300;

4. Kepada kaum buruh yang karena keperluan sebab-sebab perkawinan, meninggal dunia dan lain-lain supaya pengusaha memberikan izin untuk meninggalkan pekerjaannya selama 2 hari.¹¹⁵

Kemudian pada tanggal 24 November 1958, telah dilaksanakan Rapat Ikatan Penjahit Oger Frefes Djakarta. Rapat ini dihadiri oleh segenap anggotanya, dalam rapat tersebut diputuskan jika organisasi Ikatan Penjahit Oger Frefes (IPOF) akan dibubarkan. Namun anggota-anggota dari IPOF akan menggabungkan diri dengan SBII kring Oger Frefes Djakarta. Segala hal dan persoalan perburuhan yang masih ada atau yang belum diselesaikan hingga saat pembubaran IPOF. Tsb. Diambil alih oleh SBII.¹¹⁶ Segala inventarisasi dari IPOF dengan sendirinya menjadi hak milik dari SBII kring Oger Frefes Djakarta.¹¹⁷

Tepat pada tanggal 27 November 1958, SBII mencoba untuk mengesampingkan permasalahan dan tuntutan-tuntutan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh. Sebab pada tanggal ini SBII telah memasuki umur ke-11 tahun. Setelah 11 tahun lamanya SBII berdiri, mereka meluangkan waktu untuk memperingati berdirinya SBII dan

¹¹⁵ SBII menuntut kenaikan upah. *Harian Abadi*. 21 November 1958

¹¹⁶ SBII Kring Tretes. *Harian Abadi*. 28 November 1958

¹¹⁷ *Ibid.*

mengadakan evaluasi terhadap perkembangan yang ada di SBII. Kalau dalam tahun 1947 SBII baru meliputi 47 kring, maka sekarang SBII telah meliputi 1190 kring dan meliputi jumlah anggota sebanyak 700.010.¹¹⁸ Perkembangan ini tentu disambut baik oleh para anggotanya. Namun meski begitu, SBII perlu merenungkan beberapa masalah yang harus segera diselesaikan agar SBII dapat terus berkembang dan tetap bisa memperjuangkan hak-hak buruh. Berikut adalah permasalahan-permasalahan internal yang perlu diatasi oleh SBII:

1. Penegasan Tafsir Asas

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar, maka yang kita jadikan landasan bergerak memperjuangkan cita-cita SBII ialah Islam. Hingga 11 tahun SBII berdiri, SBII masih tetap berpedoman kepada ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi bagi anggota-anggota SBII, perjuangan yang telah dilakukan tidak ada bedanya dengan serikat-serikat buruh yang lain. Padahal, ideologi atau asas yang mereka gunakan jauh berbeda dengan SBII. Dalam evaluasi kali ini, diharapkan agar SBII lebih memperinci perjuangannya dengan berdasar kepada ajaran-ajaran Islam. Hal ini sebetulnya menyangkut pula kepada persoalan yang lebih besar lagi, yaitu struktur ekonomi bagaimana yang dikehendaki oleh Islam.¹¹⁹ Jelasnya, SBII harus

¹¹⁸ "Tantangan bagi SBII" SBII punya kepentingan tersusunnya Front Demokrasi di Indonesia. *Harian Abadi*. 26 November 1958

¹¹⁹ *Ibid*

memiliki tafsir asas untuk dijadikan sebagai pedoman terperinci bagi tiap fase dalam proses pertumbuhan masyarakat. Hal semacam ini tentu harus dilakukan agar dapat menghindari adanya pikiran-pikiran yang kurang realistis, bahwa perjuangan SBII harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, seakan-akan kita hidup di tengah masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam.

2. Penyempurnaan Aparat Organisasi

Selama SBII berdiri, SBII selalu mengupayakan perjuangan di berbagai macam sektor perburuhan. SBII memang sebuah serikat yang sifatnya unitaris, sehingga sangat sesuai dengan upaya perkembangan organisasi secara extensif. SBII harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan, untuk menampung personal-persoalan yang begitu banyak dari perburuhan, yang sangat suka ditampung oleh suatu Pengurus Besar yang sangat terbatas tenaganya seperti sekarang ini.¹²⁰ SBII perlu berupaya lebih keras untuk menghilangkan perilaku yang timbul akibat sifatnya yang unitaris.

3. Hubungan Dan Kerja Sama Dengan Partai Politik

Sejak lahir hingga berusia 11 tahun, SBII merupakan badan otonomo dari partai politik Islam Masjumi. Sesudah status badan

¹²⁰ *Ibid.*

otonom ini berjalan 11 tahun lamanya, maka menurut pendapat kami, kedua belah pihak telah dapat mengadakan penilaian terhadap untung dan ruginya hubungan yang sedemikian itu kita teruskan.¹²¹ Dapat dikatakan pada kesempatan ini SBII telah berpikir ke arah *independent* atau *free trade union*. Bila didasarkan pada riwayat buruh yang ada di luar negeri, maka kita akan lebih melihat banyak keuntungan ketika suatu serikat buruh tidak memiliki hubungan formal dengan partai politik.

Dalam hal ini dapatlah kita melihat pertumbuhan dari *Trade Union Congress* di Inggris dengan Labour Party AFL_CIO dengan Party Demokrat di AS, yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ada hubungan dan kerja sama tetap ada, bahkan kemenangan party-party tersebut dalam pemilihan umum banyak tergantung dari sokongan organisasi-organisasi buruh tersebut.¹²² Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memperjuangkan cita-citanya di bidang politik, SBII memang harus menunjang salah satu partai politik Islam yang memang benar-benar mau untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum buruh pada umumnya, terutama SBII. Dengan demikian, secara tidak langsung SBII dapat menghindari kosekuensi yang diakibatkan oleh kurangnya

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

kelancaran dan pengertian bersama antara serikat buruh dan partai.

4. Pembentukan Pemimpin-Pemimpin yang Cakap dan Terlatih

Banyak orang yang beranggapan bahwa langkah-langkah untuk menjadi seorang pemimpin di SBII sama seperti organisasi atau serikat lain. Hal yang sedemikian itu ternyata tidak benar, karena sebagai pemimpin organisasi buruh membutuhkan suatu pengetahuan dan kecakapan yang khusus. SBII menyadari betapa miskinnya sumber daya manusia yang layak dijadikan pemimpin SBII. Sebab, masih sedikit sekali pemimpin-pemimpin Islam atau dari kalangan akademis yang memiliki minat dan kesanggupan untuk berjuang dalam bidang perburuhan. hal tersebut menyebabkan bahwa organisasi kita SBII belum cukup mempunyai tenaga-tenaga pimpinan, sesuai dengan kebutuhan yang kita rasakan dewasa ini.¹²³ Untuk itulah SBII harus mengadakan program *leader-training* yang dilakukan secara berkelanjutan supaya permasalahan ini akan segera teratasi.

Selanjutnya, terdapat permasalahan eksternal yang membutuhkan perhatian dan harus segera diselesaikan oleh SBII, diantaranya:

1. Usaha Perbaikan Nasib Kaum Buruh

¹²³ *Ibid.*

Terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan buruh. Setelah mengevaluasi permasalahan internal di SBII, SBII harus segera kembali ke perjuangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan buruh. Beberapa masalah tersebut antara lain, masalah pengangguran, kenaikan harga barang-barang pokok, perumahan, kesehatan buruh, jaminan sosial dan sejenisnya. SBII harus selalu tampil kemuka dalam mengusakan pemecahannya, baik melalui jalan perundingan-perundingan maupun perundang-undangan.¹²⁴

2. Usaha Memperkuat Front Demokrasi

SBII sebagai suatu organisasi buruh mempunyai kepentingan yang besar sekali, terhadap tersusunnya front demokrasi di Indoensia dan dunai ini, yang selalu terancam oleh usaha golongan-golongan yang akan memaksakan faham diktatur totaliter.¹²⁵ Sebab SBII berkeyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratis, seluruh umat manusia dapat memiliki kebebasan berpikir dan berbicara serta hak-hak asasi manusia lainnya. Dari hal inilah, SBII harus segera memusatkan dan juga mementingkan upayanya ke arah terbentuknya kekuatan-kekuatan yang demokratis. Menjalani banyak kerja

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

sama dengan serikat buruh yang demokratis menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan.

Setelah berkesempatan untuk mengevaluasi permasalahan internal ataupun eksternal yang ada di SBII. SBII kembali melanjutkan upayanya dalam memperjuangkan hak buruh. Upaya yang dilakukan SBII tidak hanya sebatas mendesak atau memberikan tuntutan pada pemerintah. SBII juga memperbanyak kring atau anggota dengan tujuan memperbesar jumlah anggota SBII. Seperti yang terjadi pada tanggal 28 November 1958. Bertempat di Gedung Yayasan Badan Wakaf (belakang Masjid Besar Semarang), secara resmi Pengurus Baru SBII Kring BAT Semarang periode 1958/1959 dibentuk. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut, Ketua Umum: Sdr. Supardjo, Wk. Ketua I: Sdr. A. K. Djawas, Wk. Ketua II: Sdr. Moch Solechan, Sekretaris Umum: Sdr. Abubakar M.S, Wk. Sekretaris I: Sdr. Abdulkosim, Wk. Sekretaris II: Sdr. Usman Effendy, Bendahara I: Sdr. A. Dja'far, Bendahara II: Sdr. Djuhari. Ekosos: Sdr. Abdulwachid, Pembelaan: Sdr. Masu'd Amin, Penerangan: Sdr. Rochmat.¹²⁶ Terbentuknya SBII Kring BAT Semarang, membuktikan bahwa SBII benar-benar mengupayakan yang terbaik untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Menjelang akhir tahun SBII mendapatkan kabar yang cukup mengembirakan, sebab sekretaris Komisariat SBII daerah tegal,

¹²⁶ SBII Kring BAT Semarang. *Harian Abadi*. 14 Desember 1958

menyampaikan jika tuntutan-tuntutan SBII di wilayah tegal telah berhasil dan akan segera dilaksanakan oleh para perusahaan. Antara lain tuntutan yang berhasil itu adalah gratificatie 1957 pada Mf. Braat; gratificatie 1957 dan 1958 pada N. V. Dwika; kenaikan upah dan jaminan makan tiap hari Rp. 175 pada N. V Percetakan de boer; kenaikan upah 25% dan jaminan sosial pada pabrik limun Aqua-Vitae.¹²⁷ Kabar ini tentu membakar semangat para anggota SBII. Keberhasilan ini menjadi api semangat bagi kring-kring SBII untuk tetap memperjuangkan kenaikan upah dan juga jaminan sosial bagi para buruh.

B. Runtuhnya SBII

Tahun 1959, SBII masih tetap berupaya memperjuangkan hak-hak buruh dengan berasaskan ajaran-ajaran Islam. Salah satu upaya yang dilakukan SBII ialah membuat permintaan pembebasan 13 buruh yang berada di Aldjazair. Menurut kawat yang ditandatangani oleh sekretaris djenderal SBII S. Narto, atas nama 700.000 anggotanya, permintaan pembebasan ke-13 orang buruh itu adalah disebabkan mereka itu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, perjuangan mana tidak bertentangan dengan piagam PBB, demikian SBII.¹²⁸ Sayangnya, upaya yang telah dilakukan SBII dalam memperjuangkan hak-hak buruh kembali disorot. Penyorotan ini muncul akibat perjuangan serikat buruh yang dinilai hanya fokus terhadap kenaikan upah. Oesman Chalik, kepala djawatan

¹²⁷ Tuntutan-Tuntutan SBII Tegal berhasil. *Harian Abadi*. 28 Desember 1958.

¹²⁸ Kawat SBII: Bebasakan 13 Buruh Aldjazair. *Harian Abadi*. 12 Januari 1959

pengawas keselamatan kerjaja buruh daerah I dan II Sumatera Selatan, Tengah dan Djambi menyatakan bahwa umumnya serikat-serikat buruh yang ada hingga kini hanya mementingkan soal-soal sosial ekonomi saja, akan tetapi tidak menaruh perhatian pemberian bimbingan kepada buruh.¹²⁹ Kritikan yang diterima para serikat buruh, terkhusus SBII kemudian disikapi dengan bijak dan terlihat dalam upaya-upaya perjuangan berikutnya.

Akhir tahun 1959 merupakan tahun dimana Partai Masjumi berhadapan dengan permasalahan yang mengharuskan anak-anak organisasinya melepaskan diri dari ikatan partai. Pelepasan ini tentu untuk menyelamatkan anggota-anggota istimewa yang berasal dari anak organisasi Partai Masjumi, seperti SBII, STII dan SDII. Hal ini disetujui pimpinan partai dan pimpinan anggota istimewa itu dalam rapat tanggal 5 September 1959 di Jakarta.¹³⁰ Keputusan yang dinilai menjadi keputusan baik dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi ini, ternyata sesuai dengan keinginan salah satu anak organisasinya, yakni SBII. Pasalnya sejak awal SBII berupaya untuk menjadi organisasi mandiri yang tetap memperjuangkan hak para buruh tanpa terikat dengan partai. Di bawah kepemimpinan Jusuf Wibisono, SBII telah menyadari jika serikat ini masih terus terikat dengan Partai Masjumi, maka upaya-upaya untuk memperjuangkan hak buruh akan dinomorduakan, sebab kepentingan

¹²⁹Oesman Khalik: Serikat-Serikat Buruh Hanja Pentingkan Kenaikan Upah Tidak Memberikan Bimbingan Kepada Buruh. *Harian Abadi*. 2 Januari 1959.

¹³⁰ Suwasono, Puji. *Lok. Cit.* hal. 80

politik Partai Masjumi menjadi kepentingan yang penting dan wajib untuk diutamakan.

Kemudian, Partai Masjumi kembali dipertemukan dengan permasalahan yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya perjalanan Partai Masjumi. Presiden Soekarno di akhir 1959 melarang aktivitas Masjumi dan PSI karena keterlibatan mereka dalam PRRI-Permesta.¹³¹ Kehadiran anggota Partai Masjumi saat terjadi pemberontakan PRRI menjadi pukulan berat bagi Partai Masjumi. Pasalnya, M. Natsir yang merupakan ketua umum dari Partai Masjumi dikabarkan kerap terlibat dalam rapat-rapat militer PRRI. Mengetahui situasi ini, Ir. Soekarno meresponnya dengan mengeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959. Penetapan ini berisi tentang pembubaran partai dan tentang mengatur kehidupan partai politik. Persoalan politik dan kekhawatiran Presiden Ir. Soekarno terhadap Masjumi yang dianggapnya sebagai organisasi kepala batu dan dianggap dapat menghalangi “Penyelesaian Revolusi” semakin membimbangkannya.¹³² Bagi Ir. Soekarno, Partai Masjumi tidak layak untuk hidup di era Demokrasi Terpimpin. Ketidaklayakan ini membuat Ir. Soekarno segera menggolongkan Partai Masjumi menjadi golongan musuh revolusi yang harus segera disingkirkan.

Permasalahan ini pun perlahan menjadi berita yang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Bahkan, terdapat

¹³¹ Soegiri DS, dkk. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Hasta Mitra. 2005. hal 31

¹³² Dr. Warjio, Ph. D. *Gagalnya Partai Politik Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2018. hal. 246

desas-desus mengenai Ir. Soekarno yang akan membubarkan Partai Masjumi. Setelah mendengar kabar ini, Jusuf Wibisono pun mencoba untuk mencari cara agar SBII tidak ikut dibubarkan. Jusuf Wibisono pun akhirnya memperjuangkan SBII di dalam partai agar partai rela melepaskan badan otonomnya. Maka dalam Mukhtar yang diadakan di Semarang pada bulan Januari 1960, diputuskan SBII keluar dari Masjumi.¹³³ Setelah terlepas dari induk organisasinya, Partai Masjumi. SBII kembali ke fokus utamanya, yakni memperjuangkan hak buruh. Sebelum SBII melanjutkan perjuangannya, SBII akan mengadakan kongresnya yang ke-6 di Jogjakarta. Kongres ini telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, anggota SBII pun mempersilakan siapapun untuk turut memberikan sumbangan agar dapat menjadi modal untuk mempersiapkan kongres ini. SBII banyak mendapatkan dana bantuan dari perorang ataupun dari sebuah organisasi. Adapun beberapa nama yang turut menjadi penyumbang dana untuk pelaksanaan kongres SBII yang ke-6, diantaranya ialah:

1. SBII Komisariat SBII Kotapradja Pekalongan Rp. 300,-¹³⁴
2. SBII Sdr. Sjamsahir Kr. Perkeb Labuhan Hadji Rp. 150,-¹³⁵
3. Sdr. Moegni dkk di Djakarta Rp. 50,-¹³⁶
4. Sdr. Machmud VTP Tandjung Priok Rp. 10,-¹³⁷

¹³³ Suwasono, Puji. *Loc. Cit.* hal. 82-83

¹³⁴ Dana SBII. *Harian Abadi*. 7 Januari 1960.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Dana Bantuan SBII. *Harian Abadi*. 11 Januari 1960

¹³⁷ *Ibid.*

5. Sdr. Moh Husein Kantor Pusat PT GIA DJKT Rp. 10,-¹³⁸

6. Sdr. Susanto Kantor Pusat PT GIA Dkt. Rp. 5,-¹³⁹

Sembari menunggu dana bantuan kongres terkumpul, Sekdjen SBII Wartomo memberitahukan bahwa kongres yang akan diadakan di Jogjakarta ini akan mengarah pada pembahasan mengenai konsolidasi organisasi. Saudara Wartomo menjelaskan lebih lanjut bahwa, masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam kongres ialah antara lain masalah status, struktur, dan pimpinan organisasi masalah tafsir azas dan masalah program kerja organisasi.¹⁴⁰ Beliau juga menjelaskan jika dalam kongres ini akan ditegaskan kembali tentang status *indepent* SBII. Sesungguhnya berdasar AD & ART sekarang SBII secara formil organisatoris memang tidak menjadi bagian dari organisasi atau partai mana pun juga.¹⁴¹ Kemudian, kemungkinan besar dalam Kongres jad SBII telah akan dapat merealisir perubahan struktur organisasi, dari unitaris menjadi federasi yang sebenarnya telah lama direncanakan.¹⁴² Kemudian menurut siaran dari panitia penyelenggara Kongres SBII ke-IV bagian penerangan, maka Kongres SBII ke IV itu mempunyai maksud untuk bekerja sama dengan pengusaha yang adil dan melawan pegusaha yang memeras.¹⁴³ Kongres yang akan dihadiri 200 hingga 300 orang ini juga akan membahas tentang

¹³⁸ Dana Kongres SBII. *Harian Abadi*. 16 Januari 1960

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Sekdjen SBII Wartomo: Kongres SBII ke IV akan Ambil Langkah-Langkah Positip kearah Konsolidasi Organisasi. *Harian Abadi*. 18 Januari 1960

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Pengikut Kong. SBII mulai datang. *Harian Abadi*. 23 Januari 1960

lapangan kerja yang harus diperluas dengan diikuti syarat-syarat kerja yang baik serta upah yang pantas. Upaya ini tak lain untuk memperjuangkan hak-hak para buruh dan melawan pengangguran, kemiskinan dan penderitaan yang tak kunjung usai.

Kongres SBII yang ke-6 ini akan berlangsung mulai tanggal 23 hingga 26 Januari 1960. Pada hari pertama pelaksanaan kongres, disebutkan jika selama ini SBII kurang bisa memaksimalkan upayanya dalam memperjuangkan hak buruh. Hal ini tentu disebabkan oleh hubungan yang terjalin dengan Partai Masjumi. SBII lebih banyak menyerahkan perjuangan menegakkan azas-azas Islam kepada partai politik maka dengan kenyataan bahwa SBII kini sudah dapat berdiri dan berjalan sendiri, kiranya tentulah kini akan tambah dirasakan keharusan untuk lebih-lebih mengutamakan lagi chittah perjuangan organisasi yang menjanjikan Islam sebagai dasar perjuangannya.¹⁴⁴ Seluruh peserta kongres pun sepakat jika setelah menjadi serikat yang mandiri, tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang dapat diremehkan sebab SBII telah benar-benar memperjuangkan hak para buruh tanpa keterlibatan Partai Masjumi.

Selain menyadari tentang permasalahan dan harapan SBII kedepannya, dalam kongres ini para peserta juga mengambil suatu keputusan. Keputusan ini tak lain ialah penetapan Jusuf Wibisono sebagai ketua umum Pengurus Besar Serikat Buruh Islam Indonesia untuk periode

¹⁴⁴ Kongres SBII. *Harian Abadi*. 23 Januari 1960

1960/1962. Selanjutnya para peserta menyetujui calon-calon pengurus yang telah diajukan oleh ketua umum SBII, Jusuf Wibisono, adapun diantaranya:

1. Wakil Ketua I : Mohammad Ismail Napu
2. Wakil Ketua II : (masih akan ditentukan lagi)
3. Sekdjen : Warmoto Dwidjojuwono
4. Wakil Sekdjen : Agus Sudomo
5. Bendahara : Mc. Annas¹⁴⁵

Pengurus periode 1960/1960 diharapkan dapat meneruskan perjuangan SBII dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Kongres ke-6 ini pun terus berlanjut hingga selesai. Kongres SBII yang baru saja berakhir antara lain telah mengambil sebuah resolusi mengenai masalah pengangguran yang mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan undang-undang pengangguran dan sambil menunggu keluar-keluarnya undang-undang tersebut supaya penganggur-penganggur diberikan tunjangan.¹⁴⁶ Tuntutan yang masih dalam proses pun membuat SBII kembali menunggu respon dari pemerintah. Namun, ditengah-tengah SBII menunggu respon dari pemerintah dan mengupayakan tuntutan terhadap hak-hak buruh. Terdapat tuntutan yang membuahkan hasil, pasca pelaksanaan Kongres SBII yang ke-6. Berita yang datang dari SBII Kring

¹⁴⁵ Mr. Jusuf Wibisono tetap ketua umum S.B.I.I. *Harian Abadi*. 29 Januari 1960

¹⁴⁶ SBII Tuntut Tunjangan Bagi Para Buruh Penganggur. *Harian Abadi*. 29 Januari 1960

NV Dwika, Tegal, menyatakan bahwa tuntutan mereka kepada pihak majikan telah mendapatkan hasil.¹⁴⁷ Adapun tuntutan yang berhasil, ialah:

1. Untuk buruh-buruh harian/bulanan mendapat kenaikan upah sbb:
Upah sampai Rp. 2,- per jam: 20-25%; Rp. ,- sampai Rp. 3,35 perjam: 15-20%; Rp. 3,35 keatas: 10-15%
2. Buruh-buruh harian yang setiap minggu mendapat tunjangan-selisih-harga beras (antara harga pemerintah dengan pasar), dihapus, dan diganti dengan tambahan upah Rp. 0,80 sejam; selanjutnya diperhitungkan sesuai dengan peraturan upah yang berlaku.
3. Hadiah Lebaran 1960 diperoleh dengan jumlah sebesar 5 minggu upah lama (1 Januari 1960), yang diberikan pada tanggal 12 Maret 1960.¹⁴⁸

Keberhasilan ini menjadi bukti bagaimana SBII mampu memperjuangkan hak buruh, tanpa melibatkan Partai Masjumi. Perlu ditambahkan bahwa SBII juga telah melakukan perundingan dengan pihak pengusaha. SBII mencoba merundingkan berbagai tuntutan yang bisa sesuai dengan hak para buruh dan juga tidak memberatkan pihak pengusaha atau majikan. Tak jarang, SBII kembali menarik tuntutan sebab tuntutan yang diberikan kepada pengusaha atau majikan terlalu besar untuk direalisasikan.

¹⁴⁷ Tuntutan SBII Kring NV Dwika-Tegal hasil. *Harian Abadi*. 22 Maret 1960

¹⁴⁸ *Ibid.*

Tanggal 17 Agustus 1960, Masjumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.¹⁴⁹ Dalam keputusan pembubaran ini SBII dinyatakan selamat sebab tidak ikut dibubarkan. Bahkan setelah pembubaran Partai Masjumi, ketua umum SBII, Jusuf Wibisono diangkat sebagai anggota Front Nasional yang pendirinya adalah Ir. Soekarno. Meski Partai Masjumi telah dibubarkan dan beberapa bulan sebelumnya SBII secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari Partai Masjumi, tetap saja masih banyak gangguan yang dirasakan oleh SBII setelah Partai Masjumi dibubarkan. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan jika SBII merupakan bagian dari Partai Masjumi. Hal ini pun membuat SBII diperlakukan sewenang-wenang oleh masyarakat. Seperti misalnya penangkapan beberapa anggota SBII oleh penguasaan militer karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI. Akan tetapi, gangguan-gangguan ini mulai berkurang menjelang akhir tahun 1960. Pasalnya SBII telah resmi masuk ke dalam Front Nasional yang pelopornya merupakan presiden Indonesia, Ir. Soekarno. Setelah SBII menjadi bagian dari Front Nasional, KBIM (Kesatuan Buruh Islam Merdeka) pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan SBII. Untuk menghargai keputusan ini dan menjaga harga diri dari KBIM, akhirnya SBII berganti nama menjadi GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia). Organisasi buruh Islam baru tersebut berdiri dari pada tahun 1961, sedangkan pimpinannya adalah pimpinan SBII yang lama.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Suwasono, Puji. *Loc. Cit.* hal 84

¹⁵⁰ *Loc. Cit.* hal 85

BAB V

KESIMPULAN

Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) menjadi salah satu serikat buruh yang turut memperjuangkan hak-hak buruh. Dalam perjalanan sejarahnya, tentu pembahasan SBII akan selalu berkaitan dengan Partai Masjumi. Sebab, Partai Masjumi merupakan induk organisasi dari SBII. Pembentukan SBII mulai dibahas sejak tahun 1947 dan kemudian diresmikan pada 27 November 1948. Selain resmi menjadi serikat buruh yang nantinya akan memperjuangkan hak-hak buruh, SBII pun resmi menjadi anak organisasi dari Partai Masjumi. Tentu setelah ini, SBII juga harus berjuang dalam dunia politik Partai Masjumi.

Partai Masjumi yang pada saat itu tengah menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu tahun 1955, Masjumi mencoba untuk membaca situasi dan kondisi pada pasca kemerdekaan. Situasi ini pun mengantarkan Partai Masjumi untuk mencoba mencari dukungan dari buruh dan juga tani, sama halnya seperti yang dilakukan oleh PKI dan SOBSI. Mereka pun menjadi partai dan organisasi buruh yang saling bekerja sama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu tahun 1955. Latar belakang inilah yang sebenarnya menjadi boomerang bagi SBII. Sebab dalam memperjuangkan hak para buruh, mau tidak mau SBII harus melibatkan Partai Masjumi, bahkan segala sesuatu harus dirundingkan dan dengan atas persetujuan Partai Masjumi. Bagi SBII sendiri, memperjuangkan hak buruh dengan

segala hal yang berbau politik jelas menjadi hal yang berbeda dan merupakan suatu hal yang tidak etis. Namun meski SBII memiliki sudut pandang yang berbeda, SBII membutuhkan waktu beberapa tahun lamanya agar dapat terlepas secara resmi dari Partai Masjumi dan menjadi serikat buruh yang *independent*.

Terlepas dari keinginan SBII menjadi sebuah serikat buruh yang *independent*. SBII tetap berupaya melancarkan perjuangan dalam membela hak-hak buruh. Meski pada awalnya pergerakan SBII masih belum terlihat karena harus bersaing dengan serikat buruh yang telah hadir sebelumnya. Memasuki tahun 1950, SBII mulai melebarkan sayapnya dalam memperjuangkan hak buruh. SBII yang hadir dengan prinsip-prinsip Islam dalam memperjuangkan buruh, mampu memberikan aksi yang berbeda dibanding serikat-serikat buruh yang lain. Akan tetapi, prinsip-prinsip Islam yang digunakan oleh SBII, justru membuat SBII sulit untuk dikenal oleh masyarakat luas.

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh SBII, tak membuat para anggota mudah menyerah. SBII tetap melanjutkan perjuangannya dalam membela hak buruh dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. SBII selalu menjunjung tinggi sebuah perdamaian tanpa adanya kekerasan, terbukti dengan aksi SBII yang berupaya untuk melakukan negosiasi antar serikat buruh, majikan dan pemerintah, kemudian SBII secara bertahap menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan agar tetap mau mendengarkan tuntutan dari SBII. Bahkan SBII tak segan mencabut

tuntutan pada perusahaan, apabila dirasa tuntutan tersebut secara jelas tidak bisa diwujudkan oleh perusahaan atau majikan. Meski mengutamakan perdamaian dan perundingan dalam memperjuangkan hak buruh, SBII juga kerap terlibat dalam aksi mogok buruh.

Setelah SBII berupaya untuk memperjuangkan hak buruh dan berusaha untuk memisahkan diri dari Partai Masjumi, akhirnya pada 17 Agustus 1960, SBII secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari Partai Masjumi. Hal ini disebabkan oleh pembubaran Partai Masjumi yang dilakukan oleh Ir. Soekarno. Pembubaran Partai Masjumi dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan karena Partai Masjumi terlibat dalam PRRI dan Persemesta. Keterlibatan ini membuat Ir. Soekarno memutuskan untuk melakukan pembubaran. Kabar ini pun membuat Jusuf Wibisono, ketua SBII pada saat itu mengambil sikap atas permasalahan ini. hingga akhirnya, berkat upaya dari Jusuf Wibisono, SBII terselamatkan dan tidak bernasib sama seperti Partai Masjumi. Setelah pembubaran ini, SBII langsung menjadi bagian dari Front Nasional. Terwujudnya SBII yang *independent*, menjadikan SBII makin memperluas upayanya dalam memperjuangkan hak buruh. Aksi dan hasil yang dilakukan oleh SBII pun banyak diketahui oleh orang, akhirnya SBII mengganti nama organisasinya menjadi GASBIINDO. Meski nama SBII telah berubah menjadi GASBIINDO, SBII tetap melanjutkan upayanya dalam memperjuangkan hak buruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aidit, D. N. 1952. *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia: dari Tahun 1905 sampai 1926* . Jakarta: Jajasan.
- Dini Silvi Purnia, d. 2020. *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dr. Warjio, Ph. D. 2018. *Gagalnya Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuadah, I. S. 2020. *Kehidupan Bangsa Indonesia pada Zaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Modul Sejarah.
- Isnaini Harapah, d. 2015. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah* . Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Poesponegoro, Marwati Djoned, dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*. Jakarta: Balai Pusataka
- Prof. Dr. Nina Herlina, M. S. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- R. Z. Lerissa, dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemene Kebudayaan RI.
- Silaban, Rekson. 2009. *Reposisi Gerakan Buruh Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Simatupang, Tahi Bonar. 1987. *Dari Revolusi ke Pembangunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Soegiri DS, d. 2005. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Soe Hok Gie. 1997. *Orang-Orang di persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Bentang.
- Sulistyo, B. 1995. *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Buruh Serikat Indonesia*. Jakarta: TURC.

B. Jurnal

- Abdul Kadir B. Nambo, dkk. 2005. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu telaah dari sistem politik)*. Jurnal Mimbar. Vol. 21. No. 2.
- Asnawiyah. 2007. *Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayid Quthb*. Jurnal Substantia. Vol. 15. No. 2.
- Aravik, Havis. 2018. *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Islamic Banking Vol. 4. No. 1.
- Batubara, Ismed. 2020. *Kedudukan Buruh dalam Islam: Pemikiran H. Yufu Ahmad Lubis tentang Buruh*. Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 1. No. 3
- Djuanda. 1950. *Ekonomi Nasional*. Jurnal: Mimbar Indonesia. No. 32 Thn IV.
- Khumaidi, Faiq Nur. 2021. *Pemikiran Moden Islam dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1960*. Avatara. Vol. 11

- Kirom, S. 2013. Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama. *Avatar: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 9-15.
- M. Sukron, dkk. 2017. *Serikat Buruh Islam Indonesia di Surabaya Tahun 1948-1960*. Verleden: Jurnal Kesejarahan. Vol. 10, No. 1.
- Nawawi, Ismail. 2011. *Politik dalam Perspektif Islam: Kajian Fiqh Politik Syar' i dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara*. Vol. 1 No. 1
- Purwanto, N. A. 2007. Pendidikan dan Kehidupan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1- 9.
- Riyadi, F. 2015. Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam. *Iqtishada*, 155-188.
- Rohayuningsing, Heri. 2009. *Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 1*. Jurnal: Forum Ilmu Sosial. Vol. 36. No. 2
- Siregar, A. E. 2011. *Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Sosial Demokrasi, 4-15.
- Tricahyono, D. 2020. Buruh dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942. *Istoria: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1-11.
- Wijaya, E. 2016. Pendekatan Historis dan Politik Hukum terhadap Keberadaan Partai Kaum Buruh di Indonesia. *Jurnal Legislasi*

Indonesia, 309-320.

C. Koran

Redaksi Abadi. "Dana Bantuan SBII" *Harian Abadi*. 11 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Dana Kongres SBII" *Harian Abadi*. 16 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Dana SBII" *Harian Abadi*. 7 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Hak Mogok hanya Alat Perjuangan untuk Memperbaiki
Nasib Buruh" *Harian Abadi*. 13 Maret 1951

Redaksi Abadi. "Muktamar Serikat Buruh Islam Indonesia: Resepsi
Penutup Muktamar diadakan Semalam". *Harian Abadi*. 27 Desember
1951

Redaksi Abadi. "Kawat SBII: Bebaskan 13 Buruh Aldzajair" *Harian Abadi*.
12 Januari 1959

Redaksi Abadi. "Kongres SBII" *Harian Abadi*. 23 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Mr. Jusuf Wibisono tetap Ketua Umum S.B.I.I" *Harian
Abadi*. 29 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Oesman Khalik: Serikat-Serikat Buruh Hanja Peningkan
Kenaikan Upah Tidak Memberikan Bimbingan Kepada Buruh."
Harian Abadi. 2 Januari 1959

Redaksi Abadi. "Pem. Turut Rasakan Penderitaan Rakjat sbg Akibat
Perdjuangan Memberikan Hadiah Lebaran jang Berupakan Uang
Injectie Tenaga Membli di kalangan Masjarakat" *Harian Abadi*. 28
Juni 1951

Redaksi Abadi. "Pengikut Kong. SBII mulai datang" *Harian Abadi*. 23 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Pernyataan SBII Komisariat Kota Besar Makassar" *Harian Abadi*. 17 November 1958

Redaksi Abadi. "SBII Kring BAT Semarang" *Harian Abadi*. 14 Desember 1958

Redaksi Abadi. "SBII Kring Tretes" *Harian Abadi*. 28 November 1958

Redaksi Abadi. "SBII Tuntut Kenaikan Upah" *Harian Abadi*. 21 November 1958

Redaksi Abadi. "SBII Tuntut Tunjangan Bagi Para Buruh Penganggur" *Harian Abadi*. 29 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Sekdjen SII Wartomo: Kongres SBII ke IV akan ambil Langkah-langkah Positif kearah Konsolidasi Organisasi" *Harian Abadi*. 18 Januari 1960

Redaksi Abadi. "Serikat Buruh Islam Bekerja dengan Diam-diam, Juga Bukan Beragama Islam dpt Jadi Anggota" *Harian Abadi*. 4 Juli 1951

Redaksi Abadi. "Sidang SBII Seksi Gula" *Harian Abadi*. 8 November 1958

Redaksi Abadi. "Tantangan Bagi SBII: SBII Punya Kepentingan Tersusunnya Front Demokrasi di Indonesia" *Harian Abadi*. 26 November 1958

Redaksi Abadi. "Tuntutan Buruh Hendaknya Jangan Rugikan Perjuangan" *Harian Abadi*. 28 Juni 1951

- Redaksi Abadi. "Tuntutan SBII Kring NV Dwika-Tegal hasil" *Harian Abadi*. 22 Maret 1960
- Redaksi Abadi. "Tuntutan-Tuntutan SBII Tegal Berhasil" *Harian Abadi*. 28 Desember 1958
- Redaksi *de Drije Pers*. "Naar Moslime vakbeweging". *De Drije pers*. 5 Desember 1950
- Redaksi *de Nieuwsgier*. "Isl. Groepsoorganisaties". *De Nieuwsgier*. 11 Juni 1951
- Redaksi *de Preangerbode*. "De Noord Sumatraanse Olievelden en de SBII" *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*. 25 Juni 1956
- Redaksi *de Preangerbode*. "Islamietische Arbeidersbond Eis Verhoging van Lonen" *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*. 2 September 1957
- Redaksi *de Preangerbode* "KBKI en SBII" *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*. 3 November 1956
- Redaksi *de Preangerbode*. "Masjumi-leden dienen zich bij vakbond aan te sluiten" *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*. 5 Juni 1951
- Redaksi Merdeka. "75.000 Buruh Perkebunan Mogok" *Merdeka*. 5 November 1956
- Redaksi Merdeka. "Aksi-aksi Buruh thd. I'gris P'tjis diperlunak" *Merdeka*. 6 Desember 1956
- Redaksi Merdeka. "Buruh I'nesia bertindak thd Inggeris" *Merdeka*. 3 November 1956

Redaksi Merdeka. “Buruh Perkebunan Milik Perantjis Mogok Protes”

Merdeka. 12 November 1956

Redaksi Merdeka. “Kongres Serikat Buruh Islam Indonesia Berakhir”

Merdeka. 28 Desember 1951

Redaksi Merdeka. “Pasukan-Pasukan Inggris-Perancis duduki Suez”

Merdeka. 1 November 1956

Redaksi Merdeka. “Pemboikotan di Priok diteruskan” *Merdeka*. 13

November 1956

Redaksi Merdeka. “SBBSI Solider” *Merdeka*. 9 November 1956

Redaksi *Indische Courant Voor Nederland*. “*Islamietische Arbeiders niet*

Voor Staken Zonder Meer” *Indische Courant Voor Nederland*. 3 Juni

1953

Redaksi *Indische Courant voor Nederland*. “*Mr. Jusuf Wibisono Over de*

Arbeidersbeweging” *Indische Courant voor Nederland*. 18 Juli 1955

Redaksi *Indische Courant Voor Nederland*. “*Veiligheid niet Stakende*

Arbeiders” *Indische Courant Voor Nederland*. 7 Maret 1951

Redaksi *Java-Bode*. “*S.B.I.I en Monetaire Maatregelen*” *Java-Bode*:

nieuws, hadels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indi. 22 Juli

1957

Redaksi *Java-Bode*. “*SBII wil Onderzoek Beleid Inzake Oliebronnen*”

Java-Bode: nieuws, hadels-en advertentieblad voor Nederlandsch-

Indi. 10 Oktober 1955

Redaksi *Nieuwsblad voor Sumatra*. “Besluiten van SBII-Congres” *Het Nieuwsblad voor Sumatra*. 29 Desember 1951

Redaksi *Nieuwsblad voor Sumatra*. “Conferentie an SBII in Tamiang” *Het Nieuwsblad voor Sumatra*. 28 Juli 1955

Redaksi *Nieuwsblad voor Sumatra*. “Mr. Jusuf Wibisono Over de Principes van de SBII”. *Nieuwsblad voor Sumatra*. 12 Juli 1955

Redaksi *Nieuwsblad voor Sumatra*. “SBII Distancieert Zich van de Communisten” *Het Nieuwsblad voor Sumatra*. 15 Oktober 1957

Redaksi *Ochtendblad voor Indonesie*. “KBSI en Sbi willen staken” *Nieuwsgier: Ochtendblad voor Indonesie*. 17 Januari 1955

D. Skripsi

Arya Wisesa, E. Dwi. 1988. *Partai Buruh Indonesia (1945-1946) Mencari Identitas Organisasi*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Bilqis, Himatul. 2019. *Kebijakan Gamal Abdul Nasser tentang Nasionalisasi Terusan Suez dan Dampaknya terhadap Mesir*. Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Friyanti, Fiska. 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Kamil, Hadi Nafis. 2009. *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*.

- Skripsi Sarjana Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lestari. 2004. *Aksi Buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Cabang Madiun Tahun 1957-1959*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mauladana, N. L. 2018. *Sejarah Perkembangan Yayasan Al-Ashar di Rungkit Kidul Surabaya (1981-2016)*. Surabaya: Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora.
- Nuri, Wasul. 2008. *Perseteruan Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia 1949-1960*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab .
- Novia, A. 2014. *Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913-1925*. Semarang: Skripsi Univeristas Negeri Semarang.
- Satrio Kuncoro, Agfa Aditya. 2019. *Dinamika Gerakan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) di Surakarta Tahun 1950-1960*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soe Hok Gie. 1969. *Simpang Kiri dari Sebuah Djalan*. Skripsi: Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Suwasono, Puji. 2002. *Sarekat Buruh Islam Indonesia*. Skripsi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. 2006. *Pedoman Penulisan*. Skripsi: Mahasiswa Program Sastra 1 Jurusan

sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.

Yulianti, D. (n.d.). Nasionalisme Buruh dalam Sejarah Indonesia. Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN 03

Foto Koran Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode 5 Juni 1951

Van Amsterdam
Arzelend is het op de Amsterdamsche beurs...

Leku, althans voor Uw veldspieg...
ver, een teleurstelling: Leku die...

Paters beroofd
Twee indonesische paters werden...

Masjumi-leden dienen zich bij vakbond aan te sluiten
Op de regionale conferentie der...

BOSCOOP PROGRAM
BELTA: Ten for two?
REK: The Borneo
CAPITAL: 500 of France...

ring van het parlement lid...
Tjan, betreffende de...

Wat anderen schrijven
Bank het voorbeeld van Dr. Hou...

mening Sjahrir onder het Indone...
sieur van de Indon...

Tjaski
BEO: Ridsy ryder rids

LAMPIRAN 04

Foto Koran Het Nieuwsblad voor Sumatra 12 Juli 1955

1955aug 2 Juli 1955 het een of enige dat de voor hangen, in Nyaia te mogen overtuigen.

OOSTKUST
Jakartaanse studenten in Medan
Geparkere jeep en bekerke verkwamen
Tussen 1940 en 2100 geparkeerd...

Mr. Jusuf Wibisono over de principes van de SBIE
Zaterdagavond hield Mr. Jusuf...

Weekstaat Nederlandsche Bank
In de weekstaat van de Nederl...

RUBBERMARKTEN
BEURSBERICHTEN
AMSTERDAM
Op de eerste beursdag van de...

Overzicht Djarkabarter: RI-obligaties ingezakt
In de vier vorige beursdagen...

LAMPIRAN 05

Foto Koran Indische Courant voor Nederland 18 Juli 1955

Regeringsverklaring over beleid in legerkwartier

Maatregelen gebaseerd op voorlopige grondwet

De Minister heeft de regering over de legerkwartier... (text continues)

Bataakse kerk ingewijd

In Djakarta is de nieuwe kerk van de Protestantse Kerk van Batak... (text continues)

Deze acht Indische ambassadeurs... (text continues)

Mr. Jusuf Wibisono over de arbeidersbeweging

Zaterdagavond hield mr. Jusuf Wibisono... (text continues)

Proces tegen Jungschlaeger

(Vrijdag vanmiddag) De zaak tegen Jungschlaeger... (text continues)

Verantwoordelijkheid... (text continues)

Gezond... (text continues)

Deze acht Indische ambassadeurs... (text continues)

LAMPIRAN 06

Foto Koran Het Nieuwsblad voor Sumatra 28 Juli 1955

9 leden van een... (text continues)

te heffen, waarvoor uiteraard eerst... (text continues)

Conferentie van SBII in Tamiang

Op een conferentie van de SBII in Tamiang... (text continues)

Met de „Oranje” naar Nederland

Met het m.s. „Oranje”, dat Zaterdagmiddag... (text continues)

Om de veiligheid in Atjeh te herstellen... (text continues)

J. Braam m/echt; L. C. W. de Groot; mevr. J. Hartkamp-Donders... (text continues)

Aldus een resolutie van de conferentie van de SBII te Tamiang... (text continues)

De terreur in Atjeh

Na de installatie vertrok de vice-president... (text continues)

De terreur in Atjeh... (text continues)

Na de installatie vertrok de vice-president... (text continues)

De voorzitter, de heer P. W. J. n a s e n, zette volgens het... (text continues)

Nederlandse haring naar Rusland en O.-Duitsland

Het bestuur van de Redesvereniging van de Nederlandse Haringvisserij... (text continues)

Plan tot vermindering schroottekort

Het bestuur van de Ned. Bond van Haringhandelaren heeft onderhandelingen... (text continues)

Er is wél transfer over 18 gevraagd... (text continues)

DE RUBBE

Zeer interessant is het van de rubberprijs op Sur... (text continues)

De wereldmarktprijs is o... (text continues)

LAMPIRAN 07

Foto Koran Java-Bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederland 10 November 1955

Om te zeggen, hoe het was... Amsterdam, 9 november

Amsterdamse beurs

De markt was lusteloos... Amsterdamse beurs

De Amerikaanse beurs

De Amerikaanse beurs... Amerikaanse beurs

Table with 2 columns: Stock name and price. Includes items like Koninklijke Olie, Philips, etc.

Java-Bode

Dit is de eerste editie van de Java-Bode... Java-Bode

S.B.I.I. wil onderzoek beleid inzake oliebronnen

De olie-afdeling van de Indonésische... S.B.I.I. wil onderzoek

Razzia op vuurwapen in heel Lombok

De politie heeft door heel Lombok... Razzia op vuurwapen

Ontwerp wet op anti-korruptie bij commissie van overleg

Premier Soekarno heeft een ontwerp... Ontwerp wet op anti-korruptie

Papierdistributie

Het parlementair Justitiele Meded... Papierdistributie

Haarsoverleden

Te zijnen eer in Soera is overleden... Haarsoverleden

Djihad Boekhouders

Th. A. Noer van de dj. Boekhouders... Djihad Boekhouders

Ofiantentrecer op Ceylon

Ofianten die zich meestal voor de... Ofiantentrecer op Ceylon

Basketball in Formosa

Het Filipina-Chinese basketbal... Basketball in Formosa

Diefstallen in Djakarta

R. Djoko Utomo van de politie... Diefstallen in Djakarta

Sport in 't kort

De Amerikaanse voetbal... Sport in 't kort

Ernstig noodweer in New England

New-England (V.S.) werd tijdens... Ernstig noodweer in New England

Zestien doden

De Amerikaanse voetbal... Zestien doden

LAMPIRAN 08

Foto Koran Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode 25 Juni 1956

Hoofd DPKN vierde Zaterdag lustrum enking in lerschap

nubrata een kort woord waarin... Hoofd DPKN vierde Zaterdag lustrum

Hulp van V.S. 55 Milj. dollar voor Indonesië

De Amerikaanse economische... Hulp van V.S. 55 Milj. dollar voor Indonesië

Geest van eenheid

Regent Abas Wilgasonatri... Geest van eenheid

De Noord Sumatraanse olievelden en de SBII

De SBII (afdeling van Indonésische... De Noord Sumatraanse olievelden en de SBII

Omkooprij van kiesgerechtigden

Het landgerecht van Japara heeft... Omkooprij van kiesgerechtigden

AA-studenten keren terug

De AA-studenten van de... AA-studenten keren terug

Premier Ali tot Presidentiële reis goodwill voor Indonezië

Uit de rapporten, die door de regering... Premier Ali tot Presidentiële reis goodwill voor Indonezië

De goede indruk als gevolg van de reis

De goede indruk als gevolg van... De goede indruk als gevolg van de reis

De premier verklaarde dat aantal Ambonezen in Nederland

De premier verklaarde dat... De premier verklaarde dat aantal Ambonezen in Nederland

LAMPIRAN 09

Foto Koran Merdeka 1 November 1956



LAMPIRAN 10

Foto Koran Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode 3 November 1956

ninste 10 van de vernietig-
sche toestellen waren Rus-
Llyuchin-28 tweemotorige
nwerpers, aldus de woord-
r verder.

Geconfiscieerd
c Britse bezittingen in
e zijn Vrijdag verbeurd ver-
gens United Press heeft de
ische regering alle Franse
ritse banken in Egypte in-
genomen. Hiertoe behoren
ys, Ottoman, Credit Lyo-
en Banque Credit Lyonnaise
nque Comptoir National des
es de Paris.

**Olie-installaties
overgenomen**
Cairo wordt gemeld dat de
er van industrie en handel
rdag twee Britse en een
e oliemaatschappij over-
aldus een regeringscommu-
betreft hier de „Shell Pe-
maatschappij”, de „Anglo

Frans aanval op Egypte.

KBKI en SBII
Intussen zal de leiding van de
arbeidersbonden de KBKI en de
SBII (Islamietische arbeidersbond)
beraadslagen over de uitvoering van
de protest-maatregelen tegen de
Britse en Franse bedrijven.

MIJNRAMP
Zes man werden gedood door een
ontploffing in een mijn in Springfield
(VS) terwijl 108 man ingesloten zijn.
Tien arbeiders werden ernstig ge-
wond. Hulpbrigades zijn reeds met de
reddingswerkzaamheden begonnen.

wapenstilstandsovereenkomst op
aan alle troepen terug te trekken
tot achter de wapenstilstandslinie
en nauwgezet de bepalingen van
de wapenstilstandsovereenkomsten
na te leven.

3. Beveelt aan, dat alle leden zich
onthouden van het vervoeren van
militaire uitrustingen naar het
toneel van de vijandelijkeheden en
zich in het algemeen onthouden
van enige actie, die een uitvoe-
ring van deze resolutie kan be-
lemmeren.

4. Dringt erop aan, dat na het
effectief worden van de wapen-
stilstand stappen genaam worden
om het Suezkanaal te heropenen

zouden kunnen uitstellen
hinderen”;

2. dat indien het staakt-he-
eenmaal in werking is, ef-
stappen worden genomen
weder openstelling van
sloten Suezkanaal en het
len van de garantie de
scheepvaart door dit Kan-
De Algemeene Vergadering
daarop verdaagd.

Bij de debatten die aan de
ming voorafgingen, legde de
gedelegeerde, De Guiringaud
houding van zijn land uit
noodzaak om de situatie in
den-Oosten te beschouwen
geheel en met haar gevolgen.
„Indien de Franse regering
dwongen is geweest een actie
dernemen, welke op het eer-
recht niet in overeenstemming
te kunnen zijn met haar
dan geschiedt dit niet zonder
ge reden”, zei hij. „Het we-
schouwd in volledige over-
ming te zijn met de houdi-
Britse regering, dat de tradi-

LAMPIRAN 11

Foto Koran Merdeka 3 November 1956



LAMPIRAN 12

Foto Koran Merdeka 5 November 1956



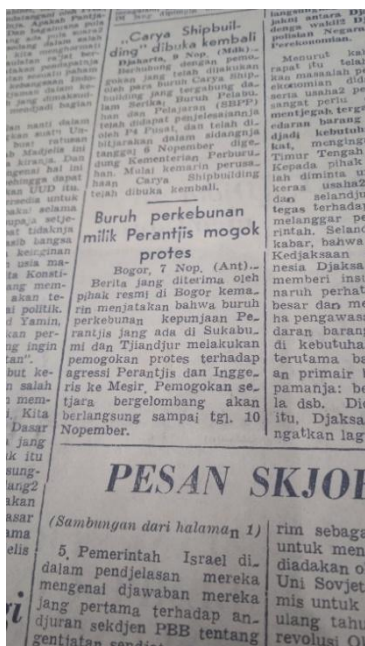
LAMPIRAN 13

Foto Koran Merdeka 9 November 1956



LAMPIRAN 14

Foto Koran Merdeka 12 November 1956



LAMPIRAN 15

Foto Koran Merdeka 13 November 1956



LAMPIRAN 16

Foto Koran Merdeka 6 Desember 1956



Foto Koran Java-Bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederland 22 Juli 1957

op bezittingen in arta begonnen

ditingen van rechte pering rust dat gepleegd, is n van de gezagsdrager mantel-omleg van de con-e geinstal-
echter, die wenst dat alle oneerlijke handelingen de kop ingedrukt worden, beschouwt Uw taak als verhevend, aldus overste Dachjar.
Luitenant-kolonel Dachjar zei verder, te rekenen op de medewerking van de maatschappij en regeringsinstaties om deze verheven taak te volbrengen.
Ook verklaarde luitenant-kolonel Dachjar dat met de installatie van de hulpcommissie voor bezitscontrole de werkzaamheden om controle uit te oefenen op de particuliere bezittingen in het gebied van Djakarta praktisch zijn begonnen.
Onlangs heeft de persofficier van de MKKB Djakarta Raya medegedeeld, dat momenteel reeds 200 namen van personen, wier bezittingen in het kader van de corruptiebestrijding onderzocht zullen worden, geregistreerd zijn. Het zijn zowel militairen als burgers.

geest van geling rojong voor de aanleg van een weg tussen Pajaba en Weda.

S.B.I.I. en monetaire maatregelen

In een verklaring van de S.B.I.I. (Islamietische vakbondorganisatie) wordt gezegd, dat de nieuwe maatregelen van de regering op financieel-economisch gebied een "zwaar last" voor de arbeiders in het algemeen en het volk in het algemeen zijn. Het loon van de arbeiders en andere werknemers komt niet meer overeen met de stijgende prijzen van de levensbehoeften.
Volgens de SBII zou er gevaar bestaan, dat de nieuwe monetaire en financiële regeling een geweldige stakingsof tot gevolg zal hebben.
Indien op korte termijn geen verbeteringen worden aangebracht, zal de SBII voorbeleggingen treffen om een massale actie te voeren ter verkrijging van hogere lonen binnen de grenzen van de mogelijkheden. De verklaring is ondertekend door secretaris-generaal R. Tony Pap.

de patiënten gedurende enige dagen aan hevige hoofdpijnen lijdende, waarna plotseling bloed uit hun neus kwam.

Bandung

De afgelopen week was de influenza-epidemie in Bandung aan het teruglopen en verwacht wordt dat dit ook blijvend zal zijn, aldus wordt van de zijde der Gemeentelijke gezondheidsdienst vernomen.
De noodpoliklinieken kunnen weer gesloten worden. In de afgelopen week was het aantal flu-slachtoffers 6248, terwijl de week daarvoor dit aantal nog 15.201 bedroeg. Dit is een daling van 60%. Het sterftecijfer daalde met 71.

De Dienst voor Godsdienstzaken

West-Java te Bandung zal een kadercursus openen voor adviseurs in kwesties van huwelijks-echtscheiding en reparatie-huwelijk. Deze cursus is speciaal bestemd voor kadervorming in de BP4 (Lichaam voor Advies in Huwelijks en Echtscheiding).

lisme niet toe te staan. Aan die landen hebben zich voorgenomen konafhankelijkheid, ongeacht alle striemen en bedrington, te verdedigen. Slechts op deze manier kunnen hun levensstandaard verhogen en gebied van een oorlog vrijwaren.

Menon zei verder, verheugd te zijn de Russische staatslieden op het neder te mogen verwelkomen. Hij dat de Russische staatslieden al een warme belangstelling hebben toond voor de Bandung-conferentie dat de betrekkingen tussen de Sovj Unie en elk van die landen gegroeft zijn op de vijf principes van co-existentie, welke duidelijk is vastgelegd op de Bandungconferentie. Menon bracht tenslotte een hiedronk uit op de Sjah van Afghanistan.

Toespraak van Khrushchev

De laatste spreker tijdens dit was de secretaris-generaal van de Russische communistische partij, Nikita Khrushchev, die de belangheid van de strijd voor de wereld

ste Dachjar Buitenlandse scholen Prof. drs. Sigit, decan van de

Prof. Sigit met ontslag Prof. drs. Sigit, decan van de

Missie naar Maluku en West-Iria Djuanda nog steeds optimistische

Foto Koran Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode 2 September 1957

In handelingen in Makassar verhoorde men, aan PIA, dat door de bezette overname van de Noord-Sulawesi werd toegelaten om in het gebied van Makassar te komen in de vorm van een commissie van de regering van de Soerabaja.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren. De commissie zal ook de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

De commissie van de Soerabaja werd in Makassar op 22 september gevestigd. De commissie zal de situatie van de bezette gebieden in de vorm van een rapport aan de regering van de Soerabaja presenteren.

Islamietische arbeidersbond eist verhoging van lonen

Met het oog op de huidige moeilijkheden, waarvan de arbeiders praten, eisen de Islamietische arbeidersbond van de regering een verhoging van de lonen. De bond eist een verhoging van de lonen van 10% per maand. De bond eist ook een verhoging van de lonen van 10% per maand.

M.v.a. verlenen en Regering openbaart parlementair geheim

De regering heeft de M.v.a. verlenen en Regering openbaart parlementair geheim. De regering heeft de M.v.a. verlenen en Regering openbaart parlementair geheim. De regering heeft de M.v.a. verlenen en Regering openbaart parlementair geheim.

Receptie ter gelegenheid van Malakka's onafhankelijkheid

Een feestelijke receptie ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Malakka werd gehouden in de stad. De receptie werd gehouden in de stad. De receptie werd gehouden in de stad.

Plagierisme bij gemeentewerf

Er is sprake van plagierisme bij de gemeentewerf. Er is sprake van plagierisme bij de gemeentewerf. Er is sprake van plagierisme bij de gemeentewerf.

Leverschietf ziek in Bandung

Een verschietf ziekte is in Bandung geconstateerd. Een verschietf ziekte is in Bandung geconstateerd. Een verschietf ziekte is in Bandung geconstateerd.

Orthopedische en Prothese fabriek

Een orthopedische en prothese fabriek is in Bandung opgericht. Een orthopedische en prothese fabriek is in Bandung opgericht. Een orthopedische en prothese fabriek is in Bandung opgericht.

Nieuw kantoor SPM in Palembang

Een nieuw kantoor van de SPM is in Palembang opgericht. Een nieuw kantoor van de SPM is in Palembang opgericht. Een nieuw kantoor van de SPM is in Palembang opgericht.

Deelnemers jeugd festival naar Peking

Een groep deelnemers van het jeugd festival is naar Peking vertrokken. Een groep deelnemers van het jeugd festival is naar Peking vertrokken. Een groep deelnemers van het jeugd festival is naar Peking vertrokken.

Goudkeuring weer

Een goudkeuring is in Bandung gehouden. Een goudkeuring is in Bandung gehouden. Een goudkeuring is in Bandung gehouden.

Handarbeid

Een handarbeid is in Bandung opgericht. Een handarbeid is in Bandung opgericht. Een handarbeid is in Bandung opgericht.

Critiek op innoering van zegelrecht

Er is kritiek op de innoering van het zegelrecht. Er is kritiek op de innoering van het zegelrecht. Er is kritiek op de innoering van het zegelrecht.

Aetherklanken

Een aetherklanken is in Bandung opgericht. Een aetherklanken is in Bandung opgericht. Een aetherklanken is in Bandung opgericht.

Komst cultureel missie uitgesteld

Een komst cultureel missie is uitgesteld. Een komst cultureel missie is uitgesteld. Een komst cultureel missie is uitgesteld.

Hijf werken voor handarbeid

Een hijf werken voor handarbeid is in Bandung opgericht. Een hijf werken voor handarbeid is in Bandung opgericht. Een hijf werken voor handarbeid is in Bandung opgericht.

LAMPIRAN 19

Foto Koran *Het Nieuwsblad voor Sumatra* 15 Oktober 1957

15 OKTOBER 1957 HET NIEUWSBLAD VOOR SUMATRA

OOSTKUST

facmouur †
van een miskraam
sen nacht in het
huis van Pema-
overleden moer-
ir, de echtgeno-
lige regimena-com-
munist.
zou hedenmiddag
has synden. Het
our was in 1947 in
et huwelijk getre-
mour zelf was uit-
comatie, maar ze
ang in A'jeh ge-
b Macmor arrie-
me het hynvliegtug
Medan. De overste
ar Siantar door.
r geplaatst
dkwartier
ingsdienst van de
Djakarta maakte
i tekend dat over-

**SBII distancieert zich
van de communisten**
De "Berikat Buruh Islam Indo-
nesia" (SBII) afdeling Noord-
Sumatra heeft dezer dagen een
verklaring uitgegeven, waarin zij
elke samenwerking met commu-
nistisch georiënteerde vakcentrales
of met arbeidersorganisaties die
voor het communisme zijn van de
hand wijst. Voorts wordt in de
verklaring gezegd dat de SBII af-
deling Noord-Sumatra de vorming
van een anti-communistisch fron-
tal voorgaant.
Deze besluiten zijn in een dezer
dagen gehouden plenaire zitting
van het bestuur genomen. Een en
ander is in overeenstemming met
de door de Alima-conferentie in
Palembang genomen besluiten,
waarbij het communisme veroor-
deeld wordt.

Medans allerlei
TTL heeft aangifte bij de politie
gedaan da, hij door T. die in de
Djalan Ruman Sakit woon is op-
gevoerd. De vorige week was T. bij
TTL gekomen, waarbij hij een
verklaring van tien nieuwe truckbanden
aan TTL ten verkoop aanbod.
Bij het loven en beden waren
zouden overtegekomen dat TTL
Rp. 5000 voor de banden zou be-
talen. Voor deze transactie gaf TTL
een cheque van Rp. 5000 aan T.
Na de ontvangst van deze cheque
was T. echter niet meer komen op-
dagen met zijn banden. T. bleef de
cheque reeds verzilverd te hebben.
Mevr. EP van Djalan Djokja
meide bij de politie dat eergater-
avond bij haar thuis werd ingetro-
ken. Ze mist een schrijfmachine,
een salonradio met pickup en een
wekker.

**Engelse kapitein in
Menado veroordeeld**
Het landgerecht van Manado,
heeft Rayond Perival Atkinson,
van Engelse nationaliteit en af-
komstig uit Singapore, kapitein
van een scheepvaartmaatschap-
pij, die op 25 september jl. door
de overheid in de haven Dong-
gala werd gearresteerd, veroor-
deeld tot een boete van Rp. 7500.
Het schip onder gezag van At-
kinson, voer onder Engelse vlag
in Indonesische wateren en had

**Nederlander bezuinigt
op openbare werken**
De van regeringwege voorge-
schreven bezuinigingswerking
kijpt in voensente mate gestalte
in werken over aistwegen uit
te stellen openbare werken, in
hoofzaak gemeentewerken. Na
Soerabaja dat het volgende uit-
sel meldde van onder andere de
voltooiing van het Botiekplan de
Limburg, dat de (landelijk werk-
zame) Sociale Venster ngstak te
Amsterdam begonnen is met de
bouw van een koelbaar longin-
stuit in de mijntrook, pij naast
eenzelfde instituut te Treebeek,
dat daar al enkele jaren besaard
wordt door de werkgevers en
werknemersorganisaties in de

LAMPIRAN 20

Foto Koran *Harian Abadi* 8 November 1958

Sidang SBN soksi gula

BURSA DJAKARTA

Perusahaan

Handwritten notes and signatures are visible on the page, including a signature that appears to be 'Pak...'

LAMPIRAN 21

Foto Koran Harian Abadi 17 November 1958



LAMPIRAN 22

Foto Koran Harian Abadi 21 November 1958



LAMPIRAN 23

Foto Koran Harian Abadi 26 November 1958



LAMPIRAN 24

Foto Koran Harian Abadi 14 Desember 1958



LAMPIRAN 25

Foto Koran Harian Abadi 28 Desember 1958



LAMPIRAN 26

Foto Koran Harian Abadi 2 Januari 1959



LAMPIRAN 27

Foto Koran Harian Abadi 12 Januari 1959



LAMPIRAN 28

Foto Koran Harian Abadi 7 Januari 1960



LAMPIRAN 29

Foto Koran Harian Abadi 11 Januari 1960



LAMPIRAN 30

Foto Koran Harian Abadi 16 Januari 1960



LAMPIRAN 31

Foto Koran Harian Abadi 18 Januari 1960



LAMPIRAN 32

Foto Koran Harian Abadi 23 Januari 1960



LAMPIRAN 33

Foto Koran Harian Abadi 23 Januari 1960



LAMPIRAN 34

Foto Koran Harian Abadi 29 Januari 1960



LAMPIRAN 35

Foto Koran Harian Abadi 29 Januari 1960



LAMPIRAN 36

Foto Koran Harijan Abadi 22 Maret 1960



LAMPIRAN 37

Foto Koran Harijan Abadi 28 November 1960

